

# **PEMBERDAYAAN KELUARGA**

**STUDI EVALUASI AKSK DI SULAWESI UTARA, SUMATERA BARAT,  
KALIMANTAN SELATAN DAN JAWA TIMUR**

*EDITOR*

*B. MUJIYADI. MSW*

KEMENTERIAN SOSIAL RI  
BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
TAHUN 2010

PERPUSTAKAN NASIONAL : KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

*Suradi, dkk*

Pemberdayaan Keluarga: Studi Evaluasi di Sulawesi Utara, Sumatera Barat,  
Kalimantan Selatan dan Jawa Timur; -Jakarta : P3KS Press, 2010

hlm. viii + 146; 14.8 cm x 21cm

Konsultan : Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd

Prof. Rusdi Muchtar, MA

---

Editor : Drs. B. Mudjiyadi, MSW

---

Penulis : Drs. Suradi, M.Si

Dra. Sri Gati Setiti, M.Si

Dra. Nunung Unayah

Muslim Sabarisman, AKS

*Cetakan pertama : Oktober 2010*

---

**ISBN : 978-979-3579-54-2**

---

**Penerbit :** P3KS Press (Anggota IKAPI DKI Jakarta)

Jln. Dewi Sartika no 200 Cawang III, Jakarta Timur,

Telp. 021-8017146

## **KATA PENGANTAR**

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, keluarga perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, agar mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Sosial RI memiliki komitmen yang besar dalam pemberdayaan keluarga. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) adalah salah satu program pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah, agar keluarga tidak jatuh di bawah garis kemiskinan akibat terjadinya guncangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

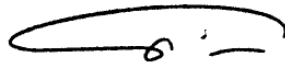
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni memberikan masukan bagi unit teknis terkait, Puslitbang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan penelitian tentang "Evaluasi Kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga". Penelitian dilaksanakan di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengaruh kegiatan AKSK masih belum optimal. Warga Dampingan Sosial (WDS) yang termasuk kategori tinggi setelah menerima kegiatan AKSK sebesar 32.25 persen. Sebenarnya kegiatan AKSK ini memiliki beberapa kekuatan, akan tetapi juga masih memiliki kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai masukan oleh Direktorat terkait dengan Pemberdayaan Keluarga di lingkungan Kementerian Sosial RI, sehingga kegiatan AKSK di masa depan akan semakin efektif. Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2010

Puslitbang Kesejahteraan Sosial  
Kepala

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal oval shape with a small loop and a dash at the end.

**Dr. Yusnar Yusuf, MS**

NIP. 19550325 19703 1 001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Hipotesis Penelitian .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi.....	23
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	49
BAB III : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	53
A. Aspek-Aspek dalam AKSK.....	53
B. Pengaruh Kegiatan AKSK Terhadap Kesejahteraan Keluarga.....	70
C. Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan AKSK.....	84

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	87
A. Kinerja Program.....	87
B. Kesejahteraan Sosial.....	106
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Rekomendasi.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	124
- Kasus Sulawesi Utara.....	124
- Kasus Sumatera Barat.....	126
- Kasus Jawa Timur.....	130
- Kasus Kalimantan Selatan.....	132
SEKILAS TENTANG EDITOR.....	137
SEKILAS TENTANG PENULIS.....	139
INDEX.....	142

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penduduk Kelurahan Buyungon Menurut Kelompok Umur.....	27
Tabel 2 : Penduduk Kelurahan Banuaran Menurut Kelompok Umur.....	32
Tabel 3 : Penduduk Kelurahan Pegambiran Ampalu Menurut Kelompok Umur.....	33
Tabel 4 : Penduduk Desa Tanipah Menurut Pendidikan.....	36
Tabel 5 : Penduduk Desa Marahaban Baru Menurut Pendidikan.....	39
Tabel 6 : Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	40
Tabel 7 : Responden Menurut Umur.....	49
Tabel 8 : Responden Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 9 : Responden Menurut Pendidikan.....	50
Tabel 10 : Responden Menurut Pekerjaan.....	51
Tabel 11 : Kondisi Ekonomi WDS Sebelum dan Sesudah Menerima Kegiatan AKSK.....	75
Tabel 12 : Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Responden Sebelum dan Sesudah Menerima AKSK.....	79
Tabel 13 : Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Responden Sebelum dan Sesudah Menerima AKSK.....	82
Tabel 14 : Kondisi WDS Sebelum dan Sesudah Menerima AKSK.....	83

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 : Kondisi Ekonomi WDS sebelum dan sesudah pemberdayaan.....	76
Diagram 2 : Pemenuhan Kebutuhan WDS sebelum Dan sesudah pemberdayaan.....	79
Diagram 3 : Kondisi Psikososial WDS sebelum dan sesudah pemberdayaan.....	83
Diagram 4 : Kondisi WDS sebelum dan sesudah pemberdayaan.....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kesatuan sosial terkecil dan terpenting dalam kehidupan masyarakat adalah keluarga. Dikatakan terpenting karena masa depan suatu bangsa sesungguhnya ikut ditentukan oleh situasi yang berlangsung di dalam keluarga. Apabila situasi di dalam keluarga itu mendukung proses tumbuh kembang individu-individu, maka akan lahir bangsa yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan; dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu, sangat tepat apabila keluarga merupakan lembaga sosial yang fundamental dalam pembangunan bangsa.

Pada Hari Keluarga Nasional tahun 2010 (HARGANAS) di Palu-Sulawesi Tengah, Gamawan Fauzi (Menteri dalam Negeri RI), menegaskan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah tugas semua instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu dimulai dari pemberdayaan keluarga, karena keluarga adalah wujud sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dipahami, bahwa pemerintah memiliki perhatian secara khusus terhadap keluarga, karena keluarga merupakan institusi pertama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai sebuah lembaga atau wujud sosial terkecil, keluarga dituntut untuk melaksanakan berbagai peranan penting. Secara sosiologis, menurut Surjono Soekanto (1990) sebagai sebuah lembaga sosial, keluarga mempunyai berbagai peranan, yaitu (1) pelindung bagi pribadi-pribadi anggotanya, dimana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam keluarga tersebut, (2) merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, (3) menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah pergaulan hidup dan (4)

merupakan wadah terjadinya proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, menegaskan delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, fungsi kebudayaan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pemeliharaan lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga tersebut harus dihidupkan, disegarkan dan dikembangkan secara seimbang untuk mencapai keadaan keluarga yang berkualitas. Keluarga merupakan wahana yang utama dan pertama untuk membawa anggotanya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan YME dengan penuh iman dan taqwa; merupakan wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan martabat bangsa; merupakan wahana utama dan pertama untuk menumbuhkan cinta kasih antar orang tua; orang tua dengan anak dan antar anak; menjadi pelindung yang utama dan pokok dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak; pengaturan reproduksi secara sehat dan berencana, merupakan wahana proses belajar; penyiapan diri untuk menjadi individu yang mandiri dan memelihara kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan berbagai peranan dan fungsi tersebut, keluarga perlu mengembangkan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam organisasi sosial pada umumnya. Menurut Budhisantoso (1994), di dalam keluarga ada pengaturan hubungan sosial antar anggotanya (*Social alignment*), cita-cita atau tujuan bersama yang mengikat (*Social media*), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam relasi sosial (*Social standard*) dan penegakkan ketertiban hidup bersama (*Social control*). Dengan adanya pengaturan tersebut keluarga akan bertanggung jawab dalam mengembangkan pola-pola hubungan antara anggota keluarga dengan hak dan kewajiban, atau kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan yang jelas. Sehingga masing-masing anggota keluarga dapat mengembangkan sikap dan pola-pola tingkah laku tertentu dalam berhubungan dengan sesama anggota keluarga secara tertib.

Situasi keluarga sebagaimana diuraikan tersebut, merupakan gambaran suatu keluarga yang diharapkan, yaitu keluarga yang sejahtera. Keluarga demikian dicirikan oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dan terlaksananya berbagai perananan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, pada kenyataannya masih ada keluarga yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi rentan. Mereka ini secara sosial ekonomi sangat labil karena berada di atas sedikit garis kemiskinan (Pusdatin Kesos, 2009). Maka dari itu, apabila terjadi perubahan yang berkenaan dengan situasi sosial ekonomi, baik lokal maupun nasional, maka mereka mengalami guncangan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kenaikan harga bahan bakar minyak, harga beras, konflik antar kelompok dan situasi pasar yang tidak menentu, dapat menjadi faktor yang dapat menarik mereka ke bawah garis kemiskinan.

Populasi keluarga rentan atau keluarga yang kondisinya sedikit di atas garis kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, yaitu 6.969.602 keluarga atau berkisar 28 juta jiwa (Pusdatin, 2009). Mereka masih dihadapkan pada berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, sandang, dan tempat tinggal. Selain itu, mereka juga masih dihadapkan pada ketidakmampuan mengakses pelayanan, seperti : pendidikan, kesehatan dan permodalan.

Sebagai upaya merespon kondisi keluarga rentan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Keluarga-Kementerian Sosial RI melaksanakan Program Pemberdayaan Keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga. Kegiatan ini diarahkan pada upaya pencegahan dengan cara mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga mereka dapat diselamatkan dari risiko jatuh di bawah garis kemiskinan.

Pemberdayaan Keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK), merupakan salah satu kegiatan yang strategis. Konsep dasar yang dibangun adalah terjadinya guncangan dalam kehidupan masyarakat, akan menyebabkan rumah tangga rentan menjadi miskin

kembali. Namun demikian, dokumen tentang data dan informasi kinerja AKSK tersebut sampai saat ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti bagaimana efektivitas AKSK dalam mencegah terjadinya kemiskinan atau mengembangkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Sesuai dengan posisi, tugas dan fungsinya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial perlu melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh AKSK terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga rentan. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan bagi penyempurnaan kebijakan dan program pada Direktorat Pemberdayaan Keluarga khususnya, dan umumnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Keluarga sebagai lembaga sosial memiliki posisi strategis dalam pembangunan, karena kualitas sumber daya manusia ikut ditentukan oleh keluarga. Berkenaan dengan itu, maka fungsi dan peranan keluarga semestinya dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa masih terdapat keluarga yang tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal; dan untuk keluarga demikian digunakan istilah keluarga rentan. Keluarga rentan adalah keluarga yang secara sosial ekonomi berada di atas garis kemiskinan, namun mereka masih dalam kondisi sangat labil. Mereka berpotensi jatuh miskin disebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga ditujukan untuk mencegah jatuhnya keluarga rentan ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan kondisi sosial dan ekonomi. Selama program pemberdayaan dilaksanakan, sudah ada hasil-hasil yang telah dicapai. Namun demikian, capaian hasil program tersebut belum memberikan informasi yang mendalam tentang kinerja program. Oleh karena itu, data dan informasi kondisi keluarga rentan pasca pemberdayaan belum banyak diperoleh.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek konteks, input dan proses dalam program pemberdayaan keluarga melalui kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga ?
2. Bagaimana pengaruh program pemberdayaan terhadap kesejahteraan keluarga ?
3. Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian Evaluasi Pemberdayaan melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Diketuainya aspek konteks, input dan proses dalam program pemberdayaan keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga.
2. Diketuainya pengaruh kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Diketuainya faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga.

### **D. KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Definisi dan Pengertian Keluarga**

Menurut Murdock dalam J. Morgan, 1975, keluarga sebagai kelompok sosial yang dicirikan oleh adanya kehidupan bersama, kerjasama ekonomi, dan melahirkan keturunan. Keluarga tersebut terbentuk melalui perkawinan yang syah antara dua orang lain jenis, dan di dalamnya terdapat anak dari hasil perkawinan atau adopsi. Kemudian Burges dan Locke dalam D. Michell,1983, mendefinisikan keluarga sebagai susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, hidup bersama di bawah satu

atap dan merupakan sebuah rumah tangga, ada interaksi dan komunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami-isteri, ayah-ibu, putra-putri, saudara laki-laki - saudara perempuan, dan memelihara kebudayaan bersama.

Setiap keluarga memiliki sejumlah peranan yang mesti dilaksanakan. Menurut Jhonson (1988), peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut : Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Selain memiliki peranan, setiap keluarga juga memiliki sejumlah fungsi yang mesti dilaksanakan. Apabila sejumlah fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keluarga akan mengalami disorganisasi sosial Menurut Zastrow (1999), beberapa fungsi keluarga, yaitu :

- a. *Replacement of the population. Replacement* yang berarti adanya fungsi regenerasi.
- b. *Care of the young.* Yang berarti pengasuhan dan perawatan, sampai anak memasuki usia remaja. Dalam posisi seperti ini

keluarga merupakan meta institusi di dalam kehidupan anak.

- c. *Sosialization of new members*. Fungsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa, dan lain-lain kepada anggota keluarga.
- d. *Regulation of Sosial behavior*. Fungsi pengaturan perilaku seksual. Kegagalan pengaturan perilaku seksual akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
- e. *Source of affection*. Fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana hal ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

Kemudian menurut Clayton (2003), fungsi yang dijalankan keluarga adalah :

1. Fungsi pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.
2. Fungsi sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
3. Fungsi perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
4. Fungsi perasaan dilihat dari bagaimana keluarga merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
5. Fungsi agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
6. Fungsi ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

7. Fungsi rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lainnya.
8. Fungsi biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya.
9. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman diantara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.

Selain peranan dan fungsinya, keluarga juga bertanggung jawab mengembangkan pola-pola hubungan antara anggota keluarga dengan hak dan kewajiban, atau kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan yang jelas, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat mengembangkan sikap dan pola-pola tingkah laku tertentu dalam berhubungan dengan sesama anggota keluarga secara tertib.

Keluarga hanya dapat bertahan kalau anggota-anggotanya merasa perlu dan berkepentingan terhadap keutuhannya. Dalam upaya mencapai keutuhan itu keluarga memerlukan aturan sebagai pedoman yang dipatuhi segenap anggotanya. Oleh karena itu, keluarga hendaknya mampu mengembangkan kelayakan sosial (*Social standard*) sebagai tolok ukur tentang apa yang baik dan buruk, apa yang patut dan tidak terpuji, tentang apa yang dihargai tinggi dan rendah.

Selain adanya kelayakan sosial, dalam upaya menanamkan kepatuhan anggotanya, di dalam keluarga perlu adanya pengendalian sosial (*Social control*). Dimungkinkan karena sebab-sebab tertentu anggota keluarga melakukan penyimpangan perilaku. Untuk itu perlu ditertibkan dengan cara memberikan hukuman bagi yang bersalah, atau sebaliknya memberikan ganjaran bagi yang patuh. Pemberian hukuman bukan bermaksud penyiksaan, dan sebaliknya pemberian ganjaran bukan bermaksud pemanjaan.



Dewasa ini setiap keluarga dihadapkan dengan berbagai permasalahan, sebagai dampak dari terjadinya perubahan sosial budaya yang cepat. Dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat dewasa ini, menurut Suyono Haryono (1994) keluarga hendaknya dipersiapkan dengan peranan ganda, yaitu:

- a. Setiap keluarga mampu mengadakan penyesuaian fisik agar bertanggung jawab sebagai pengayom seluruh anggota keluarganya sendiri. Dalam hal ini peranan keluarga sebagai wahana persemaian dan pelebagaan nilai-nilai luhur, mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, membangun seluruh potensi menjadi sumber daya insani dan mempunyai berbagai kemampuan lain untuk mendukung pembangunan bangsa.
- b. Setiap keluarga harus mampu meningkatkan kemampuannya karena harus selalu siap melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekitarnya yang terus berubah.

Penyiapan keluarga ke dalam peranan ganda ini, mengingat bahwa dewasa ini keluarga tidak akan mampu menolak hadirnya globalisasi dengan berbabagai ekses yang tidak dikehendaknya. Sehubungan itu, keluarga juga perlu dipersiapkan agar mampu mengenali berbagai unsur yang dibawa dalam proses globalisasi; dan mampu memilah dan memilih unsur yang bermanfaat dan memperkuat pelaksanaan berbagai fungsi keluarga. Sehingga terbangun sebuah keluarga yang akrab dengan globalisasi, tetapi tetap mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

## **2. Pengertian Pemberdayaan Keluarga**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* (Ginanjar, 1997). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi

kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari konsep pemberdayaan yang tepat, antara lain oleh Friedman dalam Ginanjar, (1997) disebut *alternative development*, yang menghendaki “ *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Kemudian menurut Payne (1997) yang dikutip oleh Adi (2008), pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna :

*To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of Sosial or personal blocks to exercising existing power, by incereasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client.*

Shardow (1998) dalam Adi (2008) mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Bistek yang dikenal di bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama “ *Self-Determination*”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Keberdayaan dalam konteks keluarga adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam keluarga dan membangun keberdayaan keluarga yang bersangkutan. Suatu keluarga yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik seperti di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam keluarga yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan dan kegotongroyongan. Keberdayaan keluarga adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu keluarga bertahan, dan dalam

pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan keluarga ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai bagian ketahanan nasional. Dengan demikian, maka memberdayakan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Dengan kata lain memberdayakan keluarga adalah memampukan dan memandirikan keluarga.

Dalam kerangka pikir tersebut, maka upaya memberdayakan keluarga haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi dan sumber-sumber yang dimiliki keluarga dapat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan, bahwa setiap manusia, dan setiap keluarga, memiliki potensi dan sumber-sumber yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada keluarga yang sama sekali tanpa daya. Karena, kalau keluarga tersebut tanpa daya, maka keluarga tersebut akan mengalami kepunahan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya keluarga tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi dan sumber-sumber yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya (Ginanjari, 1997)

Selanjutnya, upaya dimaksud perlu diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh keluarga. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, dengan cara menciptakan iklim dan suasana yang mendukung. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang memungkinkan suatu keluarga menjadi makin berdaya.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, upaya pemberdayaan keluarga perlu dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu :

- a. Menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi keluarga berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya

adalah pengenalan bahwa setiap keluarga memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada keluarga yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh keluarga (*strengthening*). Untuk itu diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat keluarga makin berdaya.

Upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar yang dapat diakses oleh keluarga pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di tempat terkonsentrasinya keluarga yang keberdayaannya amat kurang.

- c. Memberdayakan yang mengandung arti melindungi (*protecting*). Pada proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan keluarga, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi keluarga yang lemah sangat diperlukan.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan keluarga yaitu melalui mekanisme kelompok. Pendekatan ini secara sosiologis banyak membantu individu untuk belajar satu sama lain, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana dikemukakan oleh *Iver and Page* dalam Soekanto, (1990), bahwa anggota dalam sebuah kelompok akan mengalami hubungan timbal balik, saling mempengaruhi serta tumbuh kembangnya kesadaran untuk saling menolong. Pemikiran *Iver and Page* ini didukung oleh *Cooley* dalam Soekanto, (1990) bahwa dengan terbentuknya kelompok, tujuan anggota secara individu akan menjadi tujuan kelompok. Berdasarkan pemikiran tersebut, pendekatan menjadi lebih efektif dalam pemberdayaan keluarga, karena di dalam kelompok terjadi proses belajar secara intensif baik yang bersifat ekonomi, sosial budaya maupun mental/moral. Melalui sebuah kelompok, ambisi individu dapat dikendalikan dan sebaliknya mengedepankan kepentingan bersama yang dicapai secara bersama-sama.

Pendekatan kelompok dalam pemberdayaan keluarga ini menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam pendekatan kelompok, yaitu dengan memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk mengelola usahanya secara mandiri dan atau melibatkan anggota keluarganya, namun tetap dalam mekanisme kelompok. Pada perspektif ini, kelompok dilihat bukan secara fisik akan tetapi secara fungsional. Dengan kata lain, pengertian kelompok bukan pada himpunan dari sejumlah individu, tetapi lebih pada fungsi yang dijalankan oleh anggota melalui kelompoknya. Di dalam sistem ini, anggota kelompok dapat memanfaatkan anggota keluarganya (anak, isteri) untuk membantu menjalankan usahanya. Anggota kelompok tetap memenuhi kewajibannya antara lain pertemuan rutin kelompok, iuran sosial, aktif mengikuti aktivitas kelompok dan sebagainya.

### 3. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial budaya terkecil yang menjadi bagian masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka konsep-konsep umum yang berlaku di dalam masyarakat, dapat digunakan dalam upaya memahami sebuah keluarga. Sehubungan dengan itu, maka untuk memberikan pengertian tentang kesejahteraan keluarga, dapat digunakan pengertian tentang kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Lihat Suharto (2005). Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan definisi tersebut, kesejahteraan keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan material (makan, pakaian, tempat tinggal kesehatan), spiritual dan sosial pada keluarga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Haryanto dan Tamagola (1997) memberikan definisi, bahwa keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, definisi keluarga terdiri dari dua unsur, (1) kelembagaan keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang syah, dan (2) kemampuan memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial.

Direktorat Pemberdayaan Keluarga (2005) mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, penjangkauan sistem sumber, penyadaran pemecahan masalah, partisipasi sosial dalam komunitas, pengembangan investasi dan asset, serta keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam komunitas. Dimensi dalam definisi keluarga sejahtera tersebut akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan fungsi dan peranan keluarga, baik di dalam keluarga sendiri (*internal*) maupun dalam hubungan dengan lingkungan sosial yang lebih luas (*eksternal*).

#### 4. Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Keluarga

Pekerjaan sosial merupakan intervensi pertolongan yang ditujukan untuk membantu orang, baik sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, sehingga orang tersebut mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam Siporin, (1975). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan keluarga merupakan salah satu *domain praktik* pekerjaan sosial. Berkenaan dengan itu, maka di dalam pemberdayaan keluarga, pekerja sosial merupakan profesi yang utama, sementara itu profesi yang lain sebagai pendukung.

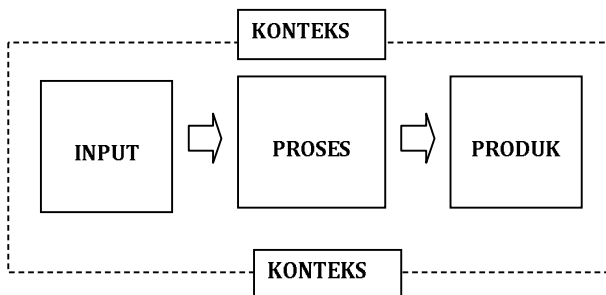
Menurut Soetarso (2001), ada sejumlah peranan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial yang relevan dalam pemberdayaan keluarga, yaitu:

- a. *Advokat*, yaitu mewakili kepentingan keluarga dan lingkungan sosialnya untuk memperoleh semua sumber yang dibutuhkannya guna pemecahan permasalahan dan peningkatan kesejahteraannya.
- b. *Fasilitator*, yaitu memberikan kemudahan berupa sumber dan peluang bagi organisasi dan lembaga penyedia pelayanan sosial dalam peningkatan kualitas dan jangkauan optimalisasi kesejahteraan keluarga.
- c. *Konselor*, yaitu memberikan konsultasi bagi keluarga dalam upaya pemecahan permasalahan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- d. *Asistensi*, yaitu menyediakan bantuan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi kepada keluarga, sehingga keluarga mampu membuat rencana usaha dan melaksanakannya dengan baik.
- e. *Negosiator*, yaitu menjalinkan hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak yang terkait untuk memperoleh berbagai dukungan yang diperlukan oleh keluarga.
- f. *Pemberdaya*, yaitu peningkatan pengetahuan, pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi dan kemampuan keluarga, dan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pemberdayaan keluarga.
- g. *Kemitraan*, yaitu menjalin hubungan dengan pemilik sumber serta menyalurkan pemilik sumber tersebut dengan keluarga dalam rangka peningkatan keberdayaan keluarga.

Berbagai peranan pekerja sosial tersebut dilaksanakan secara simultan ketika pekerja sosial memberikan pendampingan kepada keluarga. Berkaitan dengan peranan tersebut, maka pekerja sosial sebagai profesi dituntut untuk mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk memberikan pendampingan bagi keluarga. Pendampingan dimaksud mulai ketika keluarga menyusun rencana perubahan, sampai keluarga tersebut mampu mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL





Dalam kerangka konseptual penelitian ini, yang dimaksud dengan konteks adalah instrumen penyelenggaraan program seperti ; peraturan, pedoman pelaksanaan AKSK dan penyelenggara kegiatan AKSK, dukungan pemegang otoritas penyelenggaraan kegiatan AKSK, infrastruktur sosial dan ekonomi serta masyarakat dimana program diimplementasikan. Selanjutnya input adalah bahan dasar yang akan diproses yaitu; keluarga rentan, pendamping, program/kegiatan dan anggaran.

Sedangkan proses dalam penelitian ini adalah implementasi pelaksanaan kegiatan AKSK yang terdiri dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan. Produk adalah kondisi akhir kelompok dan Warga Damping Sosial (WDS) setelah menerima kegiatan AKSK.

## F. HIPOTESIS PENELITIAN

**Hipotesa dalam penelitian ini adalah :**

1.  $H_0 =$  *"Tidak ada Pengaruh Kegiatan AKSK terhadap Kesejahteraan Keluarga"*
2.  $H_1 =$  *"Ada Pengaruh Kegiatan AKSK terhadap Kesejahteraan Keluarga"*

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut, variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen adalah Kegiatan AKSK
2. Variabel dependen adalah Kesejahteraan Keluarga.

Selanjutnya variabel Kesejahteraan Keluarga dioperasionalkan ke dalam sub variabel-sub variabel, berikut :

- a. **Kondisi Ekonomi.** Termasuk ke dalam variabel ekonomi adalah penghasilan, kepemilikan, dan tabungan.
- b. **Pemenuhan Kebutuhan.** Termasuk ke dalam variabel pemenuhan kebutuhan adalah kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan.
- c. **Kondisi Sosial Psikologis.** Termasuk ke dalam variabel sosial-spiritual adalah relasi sosial dalam keluarga, dan aktiviats sosial dalam masyarakat.

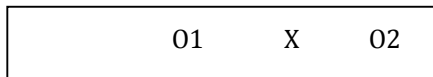
## G. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian evaluasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan desain *pra-eksperimen*. Menurut *Stufflebeam* yang dikutip oleh Isaac dan Michael (1983), ada empat komponen di dalam model evaluasi, yaitu *context*, *input*, *process* dan *product*. Berkenaan dengan itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk aspek *product*, yaitu mengetahui pengaruh program pemberdayaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk substansi dan implementasi aspek *context*, *input* dan *process* pada program Pemberdayaan Keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (ASKS).

Selain itu menurut *Craswel* (2002:161-162) bahwa ide untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam sebuah studi tunggal banyak berhubungan dengan pembahasan tentang menggabungkan metode, menghubungkan paradigma dengan metode, dan menggabungkan desain-desain dalam semua tahap penelitian. *Dick* (1979) dalam *Craswel* (2002 - 162).

Untuk pendekatan kuantitatif, desain penelitiannya sebagai berikut :



*Sumber : Sugiyono, 2007.*

Keterangan :

- 01 : Kondisi awal keluarga sebelum pemberdayaan
- X : Pemberdayaan atau perlakuan yang diberikan kepada keluarga
- 02 : Kondisi akhir keluarga pasca pemberdayaan

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan pertimbangan, bahwa lokasi tersebut telah memasuki pasca kegiatan AKSK, dan jumlah populasi. Selain itu penentuan lokasi berdasarkan keterwakilan dari gugus pulau besar, dan dukungan sumber daya. Maka secara purposif terpilih lokasi penelitian berikut :

- a. Sulawesi Utara
- b. Sumatera Barat
- c. Kalimantan Selatan
- d. Jawa Timur

## 3. Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga rentan yang telah menerima program pemberdayaan keluarga tahun 2009. Berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Keluarga, jumlah sasaran program pasca pemberdayaan tahun 2009 di empat provinsi sebagai berikut :

Lokasi penelitian AKSK

No.	Provinsi	JUMLAH KK
1.	Sulawesi Utara	200
2.	Sumatera Barat	200
3.	Kalimantan Selatan	200
4	Jawa Timur	200
	JUMLAH	800

Berdasarkan populasi 800 KK tersebut, diambil sebesar 20 persen, sehingga diperoleh sample 160 orang dari total populasi di empat provinsi sebagai responden.

Dalam upaya melengkapi data, juga dilakukan wawancara mendalam dengan informan, diantaranya penanggung jawab program pada instansi provinsi dan kabupaten/kota, dan pendamping provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa serta

aparatus desa.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

### a. Studi dokumentasi

Pengumpulan data dan informasi dengan mengkaji dokumen tertulis seperti laporan kegiatan pemberdayaan keluarga, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

### b. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terstruktur yang dilakukan kepada individu yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara secara individu dilakukan dengan penanggung jawab program, pendamping sosial, aparat desa dan keluarga (KK penerima program). Wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, kondisi keluarga pasca pemberdayaan dan tindak lanjut pemberdayaan.

### c. *Focus Group Discussion*

Teknik pengumpulan data tersebut didukung dengan diskusi kelompok terfokus (FGD), yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat di tingkat desa untuk menggali pemikiran-pemikiran ke depan dalam peningkatan taraf kesejahteraan keluarga.

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara diskusi terfokus berkaitan dengan program pemberdayaan keluarga melalui AKSK, dan menggali pemikiran aparat desa dan tokoh masyarakat untuk program tindak lanjut (*exit strategy*).

### d. Observasi

Pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan

pengamatan terhadap kondisi permukiman, kepemilikan, dan kegiatan usaha.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yang dikombinasikan dengan teknik kualitatif. Proses analisis dimulai dari *editing instrumen* untuk memperoleh data yang *valid*. Kemudian dilakukan *coding*, yaitu proses pemberian kode atas jawaban responden pada setiap item pertanyaan. Tahap berikutnya dilakukan pemrosesan data dengan menggunakan sistem SPSS-PC. Selanjutnya dilakukan *entry* data sebanyak jumlah responden keluarga rentan.

Analisis kuantitatif, untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga, analisis data yang digunakan dengan bantuan statistik non parametrik dari *wilcoxon* dalam Sugiyono (2007) dan Wahid Sulaiman, (2003). Metode ini dipilih dengan alasan (1) sampel berpasangan (*dependent sample*), (2) skala ordinal dan (3) *desain pretest – posttest* tanpa kelompok kontrol.

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian ditentukan dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05. Dengan memanfaatkan taraf signifikan sebesar 0.05, maka kriteria menerima atau menolak hipotesis penelitian sebagai berikut :

Apabila  $Asymp. Sig (2-tailed) < \alpha(0.05)$  , maka tolak  $H_0$ , yaitu:

Ada pengaruh Kegiatan ASKS terhadap Pemenuhan Kebutuhan, Kondisi Ekonomi dan Kondisi Sosial psikologis Keluarga Rentan.

Sedangkan pada analisis kualitatif akan diperoleh informasi tentang domain, taksonomi dan komponensial yang berkaitan dengan aspek konteks, informasi tentang klien, pendamping dan dana; serta informasi tentang pelaksanaan program di lapangan. Analisis kualitatif berupa deskripsi tentang aspek-aspek tersebut, yang didukung dengan tabel dan atau diagram.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN**

Pada Bab II ini disajikan data dan informasi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan responden penelitian. Pada gambaran umum lokasi penelitian diuraikan kondisi geografis, demografis dan kondisi Sosial budaya di Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kemudian gambaran responden penelitian, diuraikan data dan informasi tentang kondisi responden penelitian yang telah menerimanya kegiatan AKSK, dilihat dari aspek umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI**

##### **1. Sulawesi Utara**

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa, dengan ibu kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 15.272,44 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah utara Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Republik Filipina; sebelah timur Laut Maluku, sebelah selatan Teluk Tomini dan sebelah barat Provinsi Gorontalo.

Provinsi Sulawaesi Utara terbagi menjadi 15 Kabupaten/ Kota, 10 kecamatan dan 1.506 kelurahan/desa, serta dihuni oleh 2.415.782 jiwa. Penduduk. Penduduk Sulawesi Utara terdiri dari tiga kelompok etnis/suku bangsa utama, yaitu: (a) Suku bangsa Minahasa, (b) Suku bangsa Sangihe dan Talaud, dan (c) Suku

bangsa Bolaang Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse dan Moposad. Dengan demikian, bahasa yang ada di Sulawesi Utara dibagi ke dalam : (a) Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik), (b) Bahasa Sangihe Talaud (Sangie Besar, Siau, Talaud), dan (c) Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang). Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 Kabupaten/Kota, Kabupaten Minahasa Selatan dengan ibu kotanya Amurang, ditentukan sebagai lokasi penelitian. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki luas wilayah 1.553,83 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 17 kecamatan, 156 desa/kelurahan. Adapun batas-batasnya wilayahnya sebelah utara Kabupaten Minahasa, sebelah timur Kabupaten Minahasa Tenggara, sebelah selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan sebelah barat: Laut Sulawesi.

PETA 1. PROVINSI SULAWESI UTARA



Kabupaten Minahasa Selatan dihuni oleh 53.933 rumah tangga atau 200.265 jiwa. Dari jumlah tersebut yang termasuk penduduk usia produktif (15-54 tahun) berjumlah 113.456 jiwa atau 56.65 persen. Sebanyak 54.18 persen penduduk usia kerja (15 ke atas) memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Selain Mapalus dan Moposad yang telah dikenal luas sebagai bentuk kearifan lokal, di Minahasa Selatan terdapat "pengucapan syukur". Kearifan lokal ini merupakan bentuk terima kasih warga masyarakat kepada Tuhan atas panen dari hasil kebun, seperti: cengkeh dan kelapa serta hasil usaha yang lain. Pada tahun 2010, acara "pengucapan syukur" dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2010. "Pengucapan syukur" ini mengingatkan hari raya idul fitri di Jawa, dimana setiap rumah tangga menyajikan bermacam-macam masakan. Ada makanan khas yang dibuat setiap rumah tangga pada acara "pengucapan syukur" tersebut, yaitu *dodol* dan *nasi jaha* (lemang). Para tetangga dan handai taulan yang dekat maupun yang jauh-jauh pun, seperti dari Jakarta, Surabaya, Papua, berdatangan ke Minahasa Selatan untuk merayakan acara "pengucapan syukur" tersebut. Jalan raya trans sulawesi yang sehari-hari lengang kendaraan, pada hari itu padat dengan kendaraan bermotor roda empat dari arah Manado.

Kabupaten Minahasa Selatan memiliki 17 kecamatan, ada tiga kecamatan yang menjadi lokasi program AKSK tahun 2009, yaitu Kecamatan Amurang, Amburang Barat dan Amurang Timur. Tiga kecamatan tersebut kemudian ditetapkan menjadi lokasi penelitian, berdasarkan jumlah responden yang telah ditentukan.

Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri dari tiga kecamatan terdapat 3 (tiga) desa/kelurahan yang menjadi lokasi AKSK tahun 2009, dan sekaligus menjadi lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Ranomea, Kelurahan Buyungon, dan Desa Maluku.



a. Kelurahan Ranomea

Kelurahan Ranomea dipimpin oleh lurah (Samuel Kontu), karena merupakan tipe perkotaan. Secara administratif, Kelurahan Ranomea memiliki luas wilayah 2.454 ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Kelurahan Pondang, selatan kelurahan Bitung, barat Teluk Amurang, disebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Baru.

Kelurahan dapat ditempuh dari ibu kota kecamatan Amurang Timur sejauh 4 km, dari ibu kota Minahasa Selatan sejauh 2 km, dan dari ibu kota provinsi Manado sejauh 70 km.

Bencana longsor merupakan jenis bencana yang seringkali terjadi di Kelurahan Ranomea. Hal ini terjadi disebabkan topografi kelurahan yang berupa perbukitan dan drainase/saluran air yang belum memadai.

Kelurahan Ranomea dihuni oleh 2.656 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.333 dan perempuan sebanyak 1.323 jiwa. Kemudian dilihat dari kelompok umur, sebanyak 60 persen termasuk usia produktif, 20 persen usia lansia dan 20 persen usia anak-anak.

Sebagian besar (85 %) penduduk memiliki mata pencaharian sebagai di sektor pertanian. Kemudian TNI/Polri dan PNS sebanyak lima persen serta pedagang/pengusaha sebanyak 10 persen. Dilihat dari agama yang dianut penduduk, sebagian besar (90 %) penduduk Kelurahan Ranomea memeluk agama Kristen, dan selebihnya agama Islam dan Katholik.

Di Kelurahan Ranomea terdapat berbagai perkumpulan sosial, seperti perkumpulan kedukaan, rukun keluarga, kelompok arisan dan kolom. Kehidupan sehari-hari diwarnai dengan kegiatan gotong royong yang dikenal dengan mapalus dan moposat.

b. Kelurahan Buyungon

Kelurahan Buyungon termasuk tipe perkotaan, yang dipimpin oleh lurah (Fery Wenas). Secara administratif, Kelurahan Buyungon memiliki luas wilayah 60 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah, sebelah utara Kelurahan Randapo, sebelah selatan Desa Lobu/Randoketang Atas, sebelah timur Kelurahan Uwuran dua/Sungai Randowangko, dan sebelah barat Sungai Randowangko.

Kelurahan Buyungo menuju Kecamatan Amurang berjarak sekitar 4 km, bila menuju kota Kabupaten Minahasa Selatan sejauh dua km dan ke ibu kota provinsi sejauh 67 km.

Pada aspek demografis, Kelurahan Buyungon dihuni oleh penduduk sebanyak 3.032 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.491 jiwa.

Tabel : 1  
Penduduk Kelurahan Buyungon Menurut Kelompok Umur

NO	KELP. UMUR	JUMLAH	PERSEN
1.	Dibawah 17	1.061	34.99
2.	18 - 56	1.819	59.99
3.	57 ke atas	152	5.01
	JUMLAH	3.032	100.00

*Sumber : Kantor Kel. Buyungon, 2008.*

Di lihat dari pendidikan, pada jenjang SD sebanyak 600 orang, SMP 899 orang, SLA 1001 orang, sarjana 70 orang, pasca sarjana (magister) 2 orang dan tidak pernah/belum sekolah 250 orang. Kemudian dilihat dari jenis pekerjaan, sebagai nelayan 24 orang, tukang 54 orang, pedagang 800, tukang ojek 317 orang dan lain-lain 617 orang. Dilihat dari agama yang dianut, sebagian besar penduduk beragama Kristen, yaitu 2041 orang. Kemudian menyusul Islam 181 orang, Katholik 248 orang dan Budha 12 orang.

Di Kelurahan Buyungon terdapat berbagai perkumpulan sosial, seperti kolom, kelompok arisan, dan Posyandu. Mapalus, moposat dan pengucapan syukur, merupakan kearifan lokal syarat dengan pesan keserasian sosial, merupakan bentuk kerarifan lokal yang masih dilestarikan.

c. Desa Maluku

Desa Maluku termasuk tipe pedesaan, yang dipimpin oleh seorang kepala desa (Silvi Warongke). Secara administratif, Desa Maluku memiliki luas 45 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Piteg, selatan Desa Kotamenara, timur Desa Koneyan dan barat Desa Pinaling.

Untuk mencapai Desa Maluku, dari ibu kota kecamatan Amurang Timur sejauh 8 km, dari ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan sejauh 9 km dan dari ibu kota provinsi Manado sejauh 78 km.

Desa Maluku dihuni oleh 1.366 jiwa, dengan rincian laki-laki 767 jiwa dan perempuan 599 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, sebagian besar penduduk atau 60 persen termasuk berada pada usia kategori produktif (19-56 tahun). Kemudian dilihat dari pendidikan, sebanyak 50 persen penduduk hanya menamatkan SD dan 5 persen tidak pernah sekolah.

Sebagian besar atau 80 persen penduduk Desa Maluku memiliki mata pencaharian sebagai petani peladang. Secara topografis, kondisi tanah Desa Maluku sebagian terluas berupa perbukitan.

Kearifan lokal yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu mapalus dan moposat, yaitu bentuk gotong royong dalam kegiatan pertanian dan kegiatan tolong menolong di sekitar kerumah tanggaan. Kemudian tradisi 'pengucapan syukur', merupakan bentuk terima kasih kepada sang pencipta atas hasil panen dan hasil usaha selama setahun.

## 2. Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat berada di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2008 4.763.130. Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati. Sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan alami dan dilindungi. Terdapat dua Taman Nasional di provinsi ini, yaitu Taman Nasional Siberut yang terdapat di Pulau Siberut di Kabupaten Mentawai, dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional kedua ini wilayahnya membentang di empat provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Selain kedua Taman Nasional tersebut masih ada beberapa cagar alam.

Sumatera Barat dihuni oleh bangsa asli, yaitu Suku bangsa Minang Kabau. Norma yang dipegang teguh oleh masyarakat minang dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah "Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Agama". Bahasa daerah yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa Minangkabau dengan berbagai dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman yang berbatasan dengan Sumatera Utara, dituturkan juga Bahasa Batak dialek Mandailing, yang biasanya digunakan suku Batak Mandailing. Sementara itu di daerah Mentawai yang berupa kepulauan dan terletak beberapa puluh kilometer lepas pantai Sumatra Barat, bahasa yang digunakan adalah Bahasa Mentawai.

Di Sumatera Barat dikenal dengan rumah adat yang disebut dengan Rumah Gadang. Rumah adat asli setiap tiangnya tidaklah tegak lurus atau horizontal, tapi mempunyai kemiringan. Rumah adat tersebut tidak memakai paku, tapi memakai pasak kayu. Hal ini disebabkan daerah Sumatera Barat rawan terhadap gempa, baik vulkanik maupun tektonik. Jika dipasak dengan kayu, setiap ada gempa akan semakin kuat mengikatnya.

## PETA PROVINSI SUMATERA BARAT



Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi tujuh kota dan 12 kabupaten, dan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Secara geografis Kota Padang merupakan dataran dan daerah pantai, dengan luas wilayah 694,96 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Padang memiliki batas-batas wilayah sebelah utara Kabupaten Padang pariaman, sebelah selatan Kabupaten Pesisir, sebelah barat Samudera Indonesia dan sebelah timur Kabupaten Solok.. Secara geografis, 60 persen Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi hutan lindung. Ketinggian dataran Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan.

Kota Padang terbagi menjadi 11 kecamatan, 104 kelurahan. Secara demografis, berdasarkan sensus tahun 2008, Kota Padang dihuni oleh penduduk berjumlah 856.815 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, dilihat dari struktur usia, sebagian besar berada pada usia produktif. Dilihat dari Suku Bangsa, sebagian besar adalah Suku Minang. Pendatang yang ada di Kota Padang, antara lain orang Nias, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang India, orang Mentawai.

Kota Padang terbagi menjadi 11 kecamatan 104 kelurahan. Kecamatan Lubuk Begalung ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Secara administratif Kecamatan Lubuk Begalung memiliki luas wilayah 30,91 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh, sebelah selatan Sumudera Indonesia dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebelah barat Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Paang Selatan, dan sebelah timur Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Kabung. Kecamatan Lubuk Begalung terbagi menjadi 15 kelurahan.

Secara demografis, Kecamatan Lubuk Begalung dihuni oleh penduduk berjumlah 106.641 jiwa. Dilihat dari suku bangsa, sebagian besar penduduk adalah Suku Bangsa Minang yang menjadi penduduk asli. Adapun penduduk pendatang antara lain orang Jawa, orang Batak, orang Nias, orang Mentawai, orang Thionghoa, dan orang India.

Dua kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung, yang menjadi lokasi program AKSK tahun 2009, yaitu Kelurahan Banuaran dan Kelurahan Ampalu.

a. Kelurahan Banuaran

Kelurahan Banuaran memiliki luas wilayah 114 ha, yang dimanfaatkan untuk pertanian seluas 9 ha, permukiman seluas 98 ha dan prasarana umum seluas 4 ha. Kelurahan Banuaran memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara Kelurahan Gurun Laweh, selatan Kelurahan Pampangan, timur Kelurahan Parak Laweh dan sebelah barat Kelurahan Kampung Koto Baru.

Untuk mencapai Kelurahan Banuaran cukup mudah, karena berada di tengah-tengah Koto Padang. Apabila menggunakan kendaraan bermotor roda 4, dapat ditempuh selama 30 menit. Kelurahan Banuaran dihuni oleh 7.905 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kelurahan Banuaran sebagai berikut :

Tabel : 2.

## Penduduk Kelurahan Banuaran Menurut Kelompok Umur

NO	KELP. UMUR	JUMLAH	PERSEN
1.	0 - 14	2.697	34.12
2.	15 - 59	4.946	62.57
3.	60 ke atas	262	3.45
	JUMLAH	7.905	100.00

Sumber: Kantor Kel. Banuaran, 2008.

Dilihat dari suku bangsa, sebagian besar penduduk adalah Suku Bangsa Minang. Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi adalah bahasa Minang. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk adalah Islam. Perpaduan antara agama dan adat minang yang masih kuat, mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Penduduk Kelurahan Banuaran termasuk masyarakat yang terbuka terhadap orang luar. Mereka mudah bergaul dengan pendatang dari manapun dengan akrab dan ramah.

Terdapat sarana prasarana di Kelurahan Pegambiran Ampalu, yaitu SD sebanyak 2 unit, SLP satu unit, Tk sebanyak 3 unit, PAUD sebanyak 1 unit, Posyandu 7 unit dan Postu 1 unit.

b. Kelurahan Pegambiran Ampalu

Kelurahan Pegambiran Ampalu secara administratif bersebelahan dengan Kelurahan Banuaran. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 160 ha, yang dimanfaatkan untuk pertanian seluas 8 ha, permukiman seluas 150 ha dan prasarana umum seluas 2 ha. Kelurahan Pegambiran Ampalu memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara Bukit Pagambiran Ampalu, selatan Kelurahan Bt. Taba, timur Kelurahan Kampung Jua dan sebelah barat Kelurahan Kampung Pampangan.

Kelurahan Pegambiran Ampalu berada di tengah-tengah Koto Padang. Apabila menggunakan kendaraan bermotor roda 4, dapat ditempuh selama 25 menit. Kelurahan Banuaran dihuni oleh 18.293

jiwa. Dilihat adari kelompok umur, kondisi penduduk Kelurahan Pegambiran Ampalu sebagai berikut :

Tabel : 3.  
Penduduk Kelurahan Pegambiran Ampalu  
Menurut Kelompok Umur

NO	KELP. UMUR	JUMLAH	PERSEN
1	0 - 14	5.505	30.09
2	15 - 59	12.157	66.46
3.	60 ke atas	631	3.45
	JUMLAH	18.293	100.00

*Sumber : Kantor Kel. Pegambiran Ampalu, 2008.*

Sebagian besar penduduk Kelurahan Pegambiran Ampalu adalah Suku Bangsa Minang. Penduduk menggunakan bahasa Minang dalam berkomunikasi sehari-hari. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk adalah Islam. Perpaduan antara agama dan adat minang yang masih kuat, mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Penduduk Kelurahan Pegambiran Ampalu mudah bergaul dengan pendatang dari manapun dengan akrab, ramah dan bersikap terbuka.

Terdapat sarana prasarana di Kelurahan Pegambrian Ampalu, yaitu SD sebanyak 5 unit, SLP satu unit, TK sebanyak 5 unit, PAUD sebanyak 3 unit, dan Posyandu 18 unit.

### **3. Provinsi Kalimantan Selatan**

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. DPRD Kalsel dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya sepuluh provinsi, setelah pembubaran RIS.



Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 36.985 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kalimantan Selatan memiliki batas wilayah, sebelah utara Kalimantan Timur, barat Kalimantan Tengah, selatan Laut Jawa dan timur Kalimantan Timur.

#### PETA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2010 berjumlah 3,545,100 jiwa. Delapan etnik terbanyak di Kalimantan Selatan, yaitu Suku bangsa : Jawa, Banjar, Bugis, Madura, Bukit (Dayak Meratus), Mandar, Bakumpai, Dan Sunda. Berbagai agama berkembang, yaitu Islam (mayoritas), Protestan, Katolik Hindu, dan Buddha. Kemudian bahasa yang digunakan penduduk, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Banjar, Bahasa Bakumpai, Bahasa Bukit, Bahasa Dusun Deyah, dan Bahasa Maanyan.

Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Banjarmasin. Secara administratif terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota, 138 kecamatan dan 1.958 desa/kelurahan. Salah satu kabupaten yang menjadi lokasi AKSK, dan sekaligus menjadi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Barito Kuala. Penentuan lokasi di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pertimbangan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa ( 1) di Barito Kuala terdapat warga binaan program AKSK sebanyak 70 warga binaan. (2) memiliki aneka kegiatan UEP yang bervariasi. (3) bercorak pantai dan pedesaan. Hal tersebut

dibenarkan oleh penanggung jawab program pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar, dengan ibu kota di Marabahan. Luas wilayah 3.284 km<sup>2</sup>, yang dihuni oleh 245.914 jiwa dengan kepadatan 74,8 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Barito Kuala dibagi menjadi 16 kecamatan, yang terbagi lagi menjadi ke tiga wilayah pembangunan, yaitu

1. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya Marabahan, meliputi kecamatan Marabahan, Bakumpai terdiri 15 desa dan 3 kelurahan, Cerbon terdiri 8 desa, Barambai terdiri 11 desa, Tabukan terdiri 13 desa, Kuripan terdiri 9 desa, Belawang terdiri 28 desa dan Wanaraya.
2. Sub Wilayah Pembangunan dengan pusatnya Berangas, meliputi kecamatan Alalak terdiri 18 desa, Rantau Badauh terdiri 9 desa, 2 kelurahan, dan Mandastana terdiri 21 desa.
3. Sub Wilayah Pembangunan dengan pusatnya Tamban, meliputi kecamatan Tamban terdiri 16 desa, Anjir Pasar terdiri 15 desa, Anjir Muara terdiri 15 desa, Mekarsari terdiri 9 desa dan Tabunganen terdiri 14 desa.

Dari 16 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, 2 kecamatan menjadi lokasi kegiatan AKSK, dan sekaligus menjadi lokasi penelitian, Kecamatan Mandastana yang berjarak sekitar 30 Km dari Ibu Kota Banjarmasin dan Kecamatan Anjir Muara yang berjarak sekitar 70 Km dari Kota Banjarmasin. Selanjutnya, di Kecamatan Mandastana ditetapkan **Desa Tanipah**, dan di Kecamatan Anjir Muara ditetapkan **Desa Marabahan**.

a. Desa Tanipah.

Banjarmasin ke Desa Tanipah berjarak 30 km, yang dapat ditempuh selama dua jam perjalanan dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Sedangkan Ibu kota Kabupaten berjarak 40 Km, yang dapat ditempuh sekitar dua jam. Sepanjang perjalanan menuju lokasi melintasi beberapa sungai. Di dalam sungai-sungai tersebut terdapat ikan seluang, sepat dan

gabus. Mulut-mulut ikan-ikan tersebut dari kejauhan tampak seperti mengeluarkan gelembung, ketika sedang mencari udara untuk bernapas.

Ikan-ikan tersebut merupakan cadangan kebutuhan makan bagi penduduk di sekitar sungai. Hal ini memberi gambaran bahwa potensi alamnya sangat kaya, dan mampu memberi kehidupan bagi penduduk desa setempat.

Desa Tanipah memiliki luas wilayah 6,5 hektar. Batas-batas wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan pantai Hambawang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seri Ramahia, sebelah Timur berbatasan dengan desa Tatah Alayung dan sebelah barat berbatasan dengan desa Bangkit Baru. Dilihat dari orbitasi desanya ke Ibukota kecamatan berjarak 0,5 Km, Bila menuju Ibu Kota Kabupaten memiliki jarak 40 Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat dengan lama tempuh sekitar 2 jam. Menuju Ibu kota provinsi berjarak sekitar 30 Km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam.

Desa Tanipah dihuni oleh 852 jiwa penduduk, dengan rician penduduk laki – laki sebanyak 408 dan penduduk perempuan sebanyak 444 jiwa. Bila dilihat dari aspek pendidikannya, kondisi penduduk Desa Tapiah sebagai berikut :

Tabel : 4.  
Penduduk Desa Tanipah Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
1.	SD	170	19.95
2.	SLP	87	10.21
3.	SLA	55	6.46
4.	Belum/tidak sekolah	540	63.38
	JUMLAH	852	100.00

Sumber : Kantor Desa Tanipah, 2010.

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penduduk berpendidikan rendah. Kondisi ini tentu saja akan sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan pembangunan desanya. Kualitas SDM tersebut tergambar pada pilihan mata pencarian penduduk. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian sebagai petani dan nelayan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut berpengaruh kepada kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi masyarakat. Bila dilihat dari aspek spiritual, semua penduduk beragama Islam.

Di Desa Tanipah terdapat rukun kematian, perkumpulan remaja masjid dan arisan qurban/aiqikah. Perkumpulan-perkumpulan sosial dan keagamaan tersebut merupakan wadah kegiatan bagi masyarakat desa. Perkumpulan sosial menjadi tempat tukar pikiran dan curah pendapat, serta musyarah untuk mencapai mufakat.

Kehidupan sosial masyarakat cukup damai dan rukun. Antar warga tidak pernah terjadi konflik yang tidak terselesaikan. Begitu juga interaksi sosial dengan komunitas luar, juga berjalan cukup baik dan terlihat rukun. Belum pernah terjadi konflik antar kelompok ataupun antara desa. Semua itu bisa diwujudkan karena peranan tokoh masyarakat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat desa.

Di Desa Tanipah terdapat berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi warga masyarakat, yaitu : (1) sarana Perekonomian, seperti : warung kelontong / warung makan dan sembako; (2) sarana Pendidikan, seperti : TK, PAUD, TPA dan SD; (3) Kesehatan, seperti : dukun beranak, tukang urut, mantri, bidan, posyandu dan puskesmas; (4) Sarana Sosial, seperti : balai pertemuan warga, dan posyandu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial; (5) Sarana Keagamaan, seperti : Mushola dan mesjid; (6) Sarana Penerangan dari PLN ; (7) Sarana Perhubungan, seperti : ojek motor ; dan (8) Sarana Komunikasi yang dimanfaatkan penduduk, seperti hand phone. Namun demikian sering kali tidak ada sinyal. Sarana

komunikasi lainnya berupa kentongan kayu. Sarana informasi terdapat radio dan beberapa televisi.

b. Desa Marabahan Baru

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran program AKSK di Kabupaten Barito Kuala adalah di Kecamatan Anjir Muara, tepatnya di desa Marabahan Baru. Jarak tempuh desa ke Ibukota desa sekitar 3 Km dapat ditempuh selama 10 menit. Bila menuju Ibu kota Kecamatan berjarak sekitar tiga kilo meter, dapat ditempuh kurang lebih 10 menit. Sedangkan untuk menuju Kabupaten Barito Kuala jauhnya sekitar 40 Km dengan jarak tempuh sekitar 1, 5 jam. Menuju Provinsi Kalimantan Selatan berjarak sekitar 20 Km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat selama satu jam empat puluh lima menit. Sementara jarak dari Ibu kota Kabupaten berjarak sekitar 40 Km dan ditempuh sekitar dua jam. Sepanjang perjalanan menuju lokasi penelitian ini menyusuri sungai.

Dari Banjarmasin ke Desa Marabahan Baru berjarak 30 km, yang dapat ditempuh selama dua jam perjalanan dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Sedangkan Ibu kota Kabupaten berjarak 40 Km, yang dapat ditempuh sekitar dua jam. Sepanjang perjalanan menuju lokasi melintasi beberapa sungai, ada sungai yang besar maupun sungai yang kecil. Sungai tersebut di hidupi ikan-ikan seperti ikan gabus, ikan seluang dan ikan sepat yang oleh masyarakat setempat dimanfaatkan sebagai lauk pauk sehari-hari. Ikan-ikan tersebut merupakan cadangan kebutuhan makan bagi penduduk di sekitar sungai. Selain ikan banyak ditemukan kayu besi yang sangat kuat sebagai penyangga rumah panggung. Hal ini memberi gambaran bahwa potensi alamnya sangat kaya, dan mampu memberi kehidupan bagi penduduk desa setempat.

Secara geografis Desa Marabahan Baru memiliki luas wilayah 500 hektar. Batas-batas wilayah desa sebelah utara dengan Desa Anjir Muara Kota, sebelah selatan dengan Desa Sungai Barito, sebelah timur dengan Desa Anjir Muara Kota

dan sebelah barat dengan Sungai Anjir. Dilihat dari orbitasi desanya, ke Ibukota kecamatan berjarak 0,5 Km, menuju Ibu Kota Kabupaten berjarak 40 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua selama sekitar 2 jam. Kemudian menuju Ibu kota Banjarmasin berjarak sekitar 30 Km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Desa Marabahan Baru merupakan daerah rawan bencana alam, seperti kebakaran, angin besar/kencang dan kemarau panjang. Bencana alam, khususnya banjir, terjadi setiap tahun dan banjir yang paling besar terjadi pada tahun 2005.

Desa Marabahan Baru dihuni oleh 1.334 jiwa penduduk, dengan rician penduduk laki - laki 573 jiwa dan perempuan 661 jiwa. Dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat apa tabel berikut :

Tabel : 5.

Penduduk Desa Marabahan Baru Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
1.	SD	220	16.49
2.	SLP	380	28.49
3.	SLA	45	3.37
4.	S1	10	0.75
5.	Tidak sekolah	50	3.75
6.	Blm sekolah	629	47.15
	JUMLAH	1.334	100.00

*Sumber : Kantor Desa Marabahan Baru, 2010.*

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penduduk berpendidikan rendah. Kondisi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat, dan pembangunan desanya.

Kualitas SDM tersebut berkaitan erat dengan mata pencarian penduduk Desa Marabahan. Dilihat dari mata pencaharian penduduk, sebagian besar sebagai petani dan

nelayan, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel : 6.  
Penduduk Menurut Mata Pencapaian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSEN
1.	Petani dan nalayan	250	73.53
2.	Beternak	40	11.76
3.	PNS	10	2.94
4.	Usaha Swasta	9	2.65
5.	Buruh	30	8.82
6.	Polri	1	0.29
	JUMLAH	340	100

Sumber : Kantor Desa Marabahan Baru, 2010.

Jenis-jenis pekerjaan tersebut berpengaruh kepada kondisi ekonomi rumah tangga mereka dan secara lebih luas akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kemudian dilihat dari aspek sosial budaya, terdapat paguyuban rukun yasinan, HBSI, Karang Taruna, perkumpulan masjid dan rukun kematian. Sementara interaksi sosial dengan komunitas luar berjalan cukup baik, mereka tergabung dalam kegiatan arisan dan kegiatan keagamaan. Dilihat dari segi dinamika kehidupan terlihat lebih dinamis dibandingkan dengan penduduk desa Tanipah. Penduduk yang melakukan migrasi biasanya karena mencari pekerjaan, mengikuti suami karena kurangnya lapangan pekerjaan diwilayah ini. Aktivitas sosial penduduk diwujudkan dalam kegiatan Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat. Adat atau tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adalah mengikuti Tokoh utama yang masih menjadi panutan masyarakat setempat dan turut mendorong aktivitas penduduk dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial.

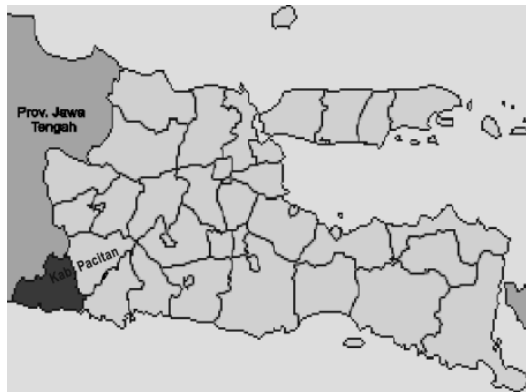
Sarana/infrastruktur didesa Marabahan Baru tersedia beberapa warung kelontong/warung makan dan sembako.

Sarana pendidikan yang tersedia adalah TK, PAUD dan SD. Sarana Kesehatan yang tersedia adalah dukun beranak dua orang, tukang urut empat orang, mantri satu orang, bidan dua orang, posyandu ada dua tempat. Adapun kegiatan keagamaan tercatat ada Mushola dan mesjid. Sarana penerangan sebagian wilayah sudah mendapat aliran listrik dari PLN, namun sebagian besar masih menggunakan lampu tempel minyak tanah. Sarana perhubungan yang tersedia, yaitu transportasi darat berupa ojek motor, dan sarana transportasi sungai berupa perahu kelotok.

#### 4. Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, dengan Ibukota di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur memiliki batas-batas wilayah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan, Selat Bali, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia.

PETA : PROVINSI JAWA TIMUR





Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2005 adalah 37.070.731 jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Malang, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya. Sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa. Namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal.

Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Dewasa ini banyak ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sejumlah kawasan industri lainnya.

**Kabupaten Pacitan** sebagai lokasi penelitian kegiatan AKSK. Penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bahwa ( 1) memiliki aneka kegiatan UEP yang bervariasi, dan ( 2) bercorak pedesaan yang tertinggal.

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur, memiliki batas-batas wilayah, sebelah utara Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan

Samudra Hindia, dan sebelah barat Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Secara geografis, sebagian besar ( 85 %) wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan sebagian besar berbukit tandus. Daerah ini kurang cocok untuk bercocok tanam padi, tetapi lebih cocok ditanami ketela pohon atau singkong yang menjadi komoditi alternatif mereka.

Pacitan juga dikenal Kota Seribu Goa. Yang memiliki keunikan dan suara berbeda satu sama lain yaitu: Gua Gong, Gua Tabuhan, Gua Kalak, dan Gua Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Selain gua-gua tersebut, di daerah pegunungan seringkali ditemukan fosil binatang atau tanaman purbakala.

Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Arjosari, Bandar, Donorojo, Kebonagung, Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Pringkuku, Punung, Sudimoro, Tegalombo dan Tulakan. Dua dari kecamatan tersebut diatas menjadi lokasi kegiatan AKSK, dan sekaligus menjadi lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Tulakan. Pada masing-masing kecamatan ditentukan satu desa yang memenuhi kriteria, yaitu Desa Ketoro di Kecamatan Tulakan dan **Desa Sempu** di Kecamatan Nawangan.

a. Desa Ketoro.

Desa Ketoro masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Ketoro berjarak sekitar 13 Km dari Kabupaten Pacitan. Dapat ditempuh selama 0,5 jam perjalanan dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Sepanjang perjalanan menuju lokasi desa Ketoro melewati lereng - lereng gunung dengan jalan sempit dan terjal, licin dan bekelok turun naik. Pada sisi kiri kanan jalan terdapat jurang yang dalam antara 15 - 100 m sebagian besar tanpa batas pengaman dan rambu-rambu lalu lintas. Sepanjang jalan yang dilalui tim peneliti terlihat pegunungan yang tanahnya kurang subur oleh karena itu hanya beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam dan tumbuh diwilayah ini.

Setelah menyusuri jalan berliku, tim peneliti harus melewati pasar tumpah yang kebetulan jatuh hari pasaran hari selasa. Pasar desa (Pasar tulakan) yang semrawut penuh dengan kendaraan dan binatang piaraan seperti sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam dan lain sebagainya untuk dipasarkan. Di daerah pasar Tulakan ini sering terjadi kemacetan kendaraan berjam-jam lamanya, hal ini disebabkan bersamaan dengan hari pasaran. Pasar tulakan merupakan pusat berputarnya roda perekonomian di Kecamatan Tulakan.

Secara geografis Desa Ketro memiliki luas wilayah 1,876 hektar. Batas-batas wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Pucang Ombo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonokarto, sebelah Timur berbatasan dengan desa Mranyan dan sebelah barat berbatasan dengan desa Wonosidi.

Dilihat dari orbitasi desanya ke Ibukota kecamatan Tulakan berjarak 13 Km, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua selama 0,5 jam. Menuju Ibu kota kabupaten Cilacap jarak sekitar 40 Km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Bila menuju Ibu kota Provinsi berjarak sekitar 275 Km, dapat ditempuh dengan kendaraan umum sekitar 7 jam lamanya.

Dilihat dari kondisi alamnya Desa Ketro memiliki tanah yang kurang subur karena terdiri dari batu kerikil hanya beberapa jenis tanaman yang cocok di wilayah ini. Adapun dari sumber flora yang tersedia adalah tanaman obat (TOGA) berupa cengkeh, dan aneka tanaman obat keluarga berupa jahe, sere, kencur, kunyit dan tanaman obat lainnya yang dapat ditanam di halaman rumah penduduk dan menjadi sumber kehidupan keluarga. Masyarakat hanya memanfaatkan kebun mereka untuk tanaman singkong, dan umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu mereka umumnya dimanfaatkan sebagai penghasilan tambahan. Sumber daya fauna yang tersedia, diantaranya: kambing, bebek dan ayam sebagai sumber gizi dan pendapatan keluarga.

Kondisi alam yang terdiri dari bukit dan pegunungan, maka sering kali terjadi bencana alam berupa tanah longsor, angin puting beliung, dan kemarau yang melanda penduduk diwilayah ini.

Data kependudukan yang diperoleh berdasarkan dokumen yang ada dikantor desa Ketrotan dan wawancara dengan sekretaris desa menunjukkan bahwa desa Ketrotan dihuni oleh 9306 jiwa penduduk, dengan rician penduduk laki – laki 4.628 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4678 jiwa.

Bila dilihat dari aspek pendidikannya maka tercatat berpendidikan SD berjumlah 3744 . Berpendidikan SLTP atau sederajat berjumlah 1496. SLTA atau sederajat berjumlah 771, kemudian berpendidikan S1 atau sarjana 46 dan yang tidak pernah sekolah berjumlah 125 orang. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penduduk berpendidikan rendah. Kondisi ini tentu saja akan sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan pembangunan desanya.

Kualitas SDM tersebut tergambar pada pilihan mata pencarian penduduk. Sebagian besar dari 2.135 jiwa penduduk memiliki mata pencaharian petani, bermata pencaharian beternak sebanyak 696 jiwa, Tercatat sebagai PNS sebanyak 50 orang, bekerja swasta sebanyak 1698 orang. Sebagai buruh sebanyak 1.155 orang . Sebagai ABRI atau Polisi ada 10 orang. Mereka yang tercatat menganggur/tidak punya pekerjaan sebanyak 1.261 jiwa. Jenis-jenis pekerjaan tersebut berpengaruh kepada kondisi ekonomi rumah tangga mereka dan secara lebih luas akan mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Bila dilihat dari aspek spiritual, ternyata mayoritas penduduk beragama Islam tercatat 9.299 orang. Hanya ada 7 orang yang beragama kristen. Dilihat dari aspek sosial budaya, terdapat paguyuban Yasinan, PKK, Sementara interaksi sosial dengan komunitas luar berjalan cukup baik. Dilihat dari segi dinamika kehidupan terlihat ada migrasi penduduk sebagai TKW keluar negeri. Ini dilakukan karena desanya miskin dan

sulitnya mencari sumber kehidupan setempat. Rendahnya potensi masyarakat ditunjukkan oleh minimnya potensi kesejahteraan sosial di masyarakat kecuali KUBE yang diprogramkan oleh pemerintah. Pada sisi lain karena desa yang masih tertinggal yang dicirikan dengan masyarakatnya yang homogen maka rasa solidaritasnya dan kebersamaan masih tinggi yang ditunjukkan oleh gotong toyongarganya.

Di desa Ketro ditemukan data Permasalahan Sosial Kesejahteraan sosial yang terekam dalam penelitian ini tercatat 123 orang Fakir miskin yang cukup memprihatinkan, terdapat 75 orang wanita rawan Sosial ekonomi, 183 penduduk yang menempati rumah tak layak huni dan tercatat 74 orang penyandang cacat.

Sarana/infrastruktur di desa Ketro tercatat sebagai berikut. Tersedia beberapa koperasi, warung kelontong/warung makan dan sembako. Sarana pendidikan yang tersedia adalah TK, PAUD, TPA dan SD. Sarana Kesehatan yang tersedia Dukun beranak, tukang urut, mantri, bidan, posyandu dan puskesmas. Kegiatan yang bersifat aktivitas sosial terdapat balai pertemuan warga dan posyandu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial. Sementara aktivitas keagamaan tercatat ada Mushola dan masjid. Sarana penerangan beberapa bagian wilayah sudah tersedia PLN, namun sebagian besar masih menggunakan lampu tempel minyak tanah. Sarana transportasi umumnya berupa ojek motor, angkutan pedesaan. Sarana komunikasi yang dimanfaatkan penduduk adalah Handphone, namun sering kali tidak ada sinyal, sementara komunikasi lainnya berupa kentongan kayu. Sarana informasi terdapat radio dan beberapa televisi dan surat kabar.

b. Desa Sempu.

Desa Sempu masuk wilayah Kecamatan Nawangan, yang menjadi salah satu desa sasaran AKSK di Kabupaten Pacitan. Jarak dari ibu kota Kabupaten Pacitan menuju Kecamatan Nawangan berjarak kurang lebih 37 Km yang dapat ditempuh

dengan kendaraan roda dua dan roda empat selama  $\pm 1.5$  jam, sedangkan jarak Kecamatan Nawangan ke desa Sempu sekitar 6 Km yang dapat ditempuh hanya dengan kendaraan roda dua selama 30 menit. Menuju Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 470 Km dengan waktu tempuh 11 jam dengan kendaraan roda dua atau roda empat.

Secara geografis Desa Sempu memiliki luas wilayah 1.127,5 hektar. Batas-batas wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Jeruk. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Munjing. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Banjar dan sebelah barat berbatasan dengan desa Jetis Lor.

Kondisi alam yang berbukit - bukit, menjadikan daerah ini rawan bencana, seperti longsor dan angin besar/kencang yang sering kali mengganggu kegiatan penduduk sehari - hari. Data kependudukan diperoleh berdasarkan dokumen yang ada di kantor desa dan wawancara dengan sekretaris desa., Desa Sempu dihuni oleh 6.032 jiwa penduduk, dengan rician penduduk laki-laki 3.032 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.000 jiwa.

Dilihat dari aspek pendidikannya maka tercatat 2.800 orang berpendidikan SD. Berpendidikan SLTP atau sederajat berjumlah 1.560. SLTA atau sederajat berjumlah 300, kemudian berpendidikan S1 atau sarjana 21. Berpendidikan S2 ada 12 orang. Namun demikian mereka yang berpendidikan tinggi tidak bekerja di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang ada sebagian besar penduduk berpendidikan rendah. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh kepada produktivitas masyarakat dan pembangunan desanya.

Kualitas SDM yang rendah tersebut tergambar pada pilihan mata pencaharian penduduk. Sebanyak 4.239 penduduk memiliki mata pencaharian petani atau nelayan, beternak 1.281 orang, sebagai pegawai (PNS) 32 orang, usaha swasta 300 orang, buruh 1.500 orang dan Polisi ada 2 orang. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan/masih belum bekerja ada 19 orang. Jenis-jenis pekerjaan tersebut berpengaruh kepada

kondisi ekonomi rumah tangga mereka dan secara lebih luas akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dilihat dari agama yang dianutnya, tercatat 6.132 orang beragama Islam.

Dilihat dari aspek sosial budaya, maka terdapat paguyuban rukun RT, rukun RW, Dusun dan rukun Desa. Sementara interaksi sosial dengan komunitas luar berjalan cukup baik.

Dilihat dari segi dinamika kehidupan masyarakatnya terlihat pasif atau kurang dinamis. Walaupun ada penduduk yang melakukan migrasi namun tidak tercatat dalam catatan administrasi desa. Aktivitas sosial penduduk diwujudkan dalam kegiatan gotong royong dalam memperbaiki rumah atau sambatan dan gotong royong untuk kepentingan umum seperti mendirikan rumah hewan. Adat /tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat bahwa Tokoh utama masih menjadi panutan masyarakat setempat dan turut mendorong aktivitas penduduk dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial seperti kegiattan AKSK.

Di Desa Sempu sudah tersedia sarana perekonomian, seperti warung kelontong/warung makan dan sembako, toko, dan koperasi. Kemudian sarana pendidikan, yaitu TK, PAUD, TPA dan SD. Sarana Kesehatan yang tersedia, yaitu dukun beranak, bidan dan posyandu. Sebagian wilayah desa sudah menggunakan listrik tenaga genset. Tetapi sebagian besar masih menggunakan lampu minyak tanah. Ojek motor merupakan sarana transportasi penduduk ke luar desa. Jalan-jalan desa kondisinya sempit dan berbukit-bukit, tanpa pengaman pinggir dan kiri kanan jurang dengan kedalaman antara 10 - 100 m. Telpon seluler sudah digunakan sebagian penduduk. Meskipun Desa Sempu termasuk tipe perdesaan, tersedia sarana informasi, seperti radio, surat kabar dan beberapa televisi.

## B. DESKRIPSI RESPONDEN PENELITIAN

### 1. Responden Menurut Umur

Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan AKSK tidak secara tegas mengatur batas minimal maupun maksimal umur WDS. Meskipun demikian, dikarenakan setiap WDS mengelola UEP, tentunya mereka berada pada kelompok umur produktif. Kondisi WDS menurut umur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 7  
Responden Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1.	19 - 40	74	46.25
2.	41 - 59	82	51.25
3.	60 ke atas	4	2.50
	JUMLAH	160	100.00

*Sumber : Hasil Penelitian, 2010.*

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa 96 orang WDS atau 97.50 persen berada pada kelompok umur produktif dan 4 orang WDS atau 2.50 persen yang berada pada kelompok umur kurang produktif. Secara fisiologis, umur berkaitan dengan kemampuan fisik seseorang, dimana kondisi ini akan mempengaruhi aktivitas WDS dalam mengelola kegiatan AKSK.

### 2. Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin WDS, tidak diatur secara eksplisit di dalam Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan AKSK. Oleh karena itu, pelaksana di daerah melakukan rekrutmen WDS laki-laki dan atau perempuan sebagai penerimaan kegiatan AKSK. Kondisi responden menurut jenis kelamin tampak pada tabel berikut :



Tabel : 8  
Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	90	56.20
2.	Perempuan	70	43.80
	JUMLAH	160	100.00

Sumber : Hasil Penelitian, 2010.

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa sebanyak 90 orang WDS atau 56.20 persen adalah laki-laki, dan sebanyak 70 orang WDS atau 43.80 persen adalah perempuan. Secara teknis sebenarnya tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan jenis kelamin tersebut. Tetapi, ketika disandingkan dengan WDS pada program lain, yaitu Pemberdayaan Perempuan, tampaknya diperlukan penjelasan secara mendalam untuk menghindarkan kesan tumpang tindih.

### 3. Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan berkaitan dengan kapasitas seseorang dalam menghadapi permasalahan dan mencari upaya pemecahannya. Pada kegiatan AKSK, pendidikan WDS akan berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan, baik secara individu maupun kelompok. Kondisi WDS menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel : 9  
Responden Menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak Sekolah	3	1.90
2.	SD tidak tamat	59	36.90
3.	SD tamat	52	32.50
4.	SLP tidak tamat	39	24.40
5.	SLP tamat	7	4.40
	JUMLAH	160	100.00

Sumber : Hasil Penelitian, 2010.

Data di atas menunjukkan, bahwa pada umumnya WDS berpendidikan rendah. Bahkan sebanyak 59 orang WDS atau 36.90 persen dapat dikatakan berpendidikan sangat rendah, yaitu tidak pernah sekolah dan SD tidak tamat. Kondisi tersebut memerlukan pekerja sosial yang memiliki ketekunan dan dedikasi tinggi untuk memberikan pendampingan pada WDS tersebut, sehingga benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang kegiatan AKSK.

#### 4. Responden Menurut Pekerjaan

Pada umumnya pendidikan yang dimiliki seseorang akan berkorelasi positif dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Pada tabel di atas dijelaskan, bahwa pada umumnya WDS pada kegiatan AKSK berpendidikan rendah. Kondisi WDS menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 10  
Responden Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	70	43.80
2.	Nelayan	11	6.90
3.	Buruh	11	6.90
4.	Dagang	65	40.60
5.	Tukang	2	1.30
6.	Guru	1	0.60
	JUMLAH	160	100.00

Sumber : Hasil Penelitian, 2010.

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa pada umumnya WDS penerima kegiatan AKSK memiliki pekerjaan yang lebih banyak memerlukan tenaga fisik, dibandingkan dengan pemikiran. Jenis pekerjaan tersebut tentu berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga WDS. Berdasarkan hasil lapangan, pekerjaan WDS tersebut pada skala mikro, sehingga

memberikan pendapatan yang rendah, yaitu di bawah satu juta rupiah per bulan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan AKSK, bahwa kegiatan AKSK pada dasarnya adalah kegiatan pengembangan dari usaha yang telah dirintis oleh WDS sebelumnya. Apabila jenis pekerjaan atau usaha WDS sudah diketahui, maka jenis usaha pengembangannya melalui kegiatan AKSK akan mudah ditentukan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Deskripsi hasil penelitian ini disajikan dalam tiga bagian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Diketuahuinya aspek kontek, input dan proses dalam program pemberdayaan keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga.
2. Diketuahuinya pengaruh kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Diketuahuinya faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga.

#### **A. ASPEK-ASPEK DALAM AKSK**

##### **1. Konteks**

Keberhasilan sebuah program dipengaruhi berbagai kondisi, yaitu instrumen penyelenggaraan program, seperti: peraturan, pedoman pelaksanaan, dan standard; penyelenggara program, dukungan pemegang otoritas, insfrastruktur sosial dan ekonomi serta masyarakat dimana program diimplementasikan. Sehubungan dengan itu, berbagai hal yang termasuk di dalam unsur konteks ini perlu diidentifikasi dan diinventarisasi dengan tepat dan cermat, sehingga ketika program diimplementasikan, kondisi yang berpengaruh tersebut memberikan dukungan atau sebagai sistem sumber.

Penyelenggara program seringkali melupakan unsur-unsur di dalam konteks ini, karena merasa programnya siap untuk diimplementasikan, panduan telah didistribusikan, pendamping telah diberikan sosialisasi dan pelatihan, ataupun dengan alasan karena kuota sasaran program secara definitif telah ditetapkan. Hal ini tentu

masih mengandung beberapa kelemahan, ketika sebuah program AKSK diimplementasikan dengan prinsip dan pendekatan pemberdayaan.

#### **a. Instrumentasi program**

Kegiatan AKSK telah dibekali dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga. Petunjuk yang disusun oleh Kementerian Sosial RI ini telah disebarluaskan kesetiap provinsi dan kabupten. Meskipun demikian, di lapangan petunjuk dimaksud sulit ditemukan lagi.

Instansi sosial provinsi dan kabupaten menggunakan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga yang di dalamnya mencakup AKSK yang disusun oleh Kementerian Sosial RI. Untuk kepentingan operasional, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berupaya menyusun pedoman pelaksanaan AKSK berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial RI, yang disesuaikan kondisi lokal. Pada Instansi Sosial yang lain, belum membuat pedoman pelaksanaan AKSK. Mereka menggunakan pedoman yang dibuat Kementerian Sosial RI, dan ketika di lapangan pelaksana Instansi Sosial provinsi maupun kabupaten melakukan penyesuaian-penyesuaian tidak tertulis.

#### **b. Penyelenggara Program**

Penanggung jawab dan pelaksana program pemberdayaan keluarga, pada Dinas Sosial di provinsi dan kabupaten, merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi kegiatan AKSK. Mereka melakukan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran program. Serangkaian kegiatan tersebut memerlukan modal dasar dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan komitmen, agar program AKSK dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang optimal.

Kondisi ideal tersebut sulit untuk dapat diwujudkan. Kondisi yang terjadi di daerah, seperti mutasi internal maupun eksternal antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut merupakan

faktor yang menyebabkan implementasi program AKSK belum mencapai tujuan secara optimal. Tenaga Dinas Sosial yang selama ini sudah cakap dan terampil, saat ini sudah sulit ditemukan lagi karena mutasi ke unit atau SKPD lain.

### **c. Otoritas Lokal**

Pada tingkat lokal atau desa/kelurahan, kepala desa/lurah merupakan pemegang otoritas pertama. Karena itu, implementasi program mesti melibatkan kepala desa dan aparatnya sejak tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagai pemegang otoritas, kepala desa bisa menerima program yang masuk ke wilayahnya apabila program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi warganya, dan pembangunan desa pada umumnya. Namun demikian, kepala desa/lurah juga bisa menolak program yang masuk ke wilayahnya, apabila program tersebut dinilai akan menimbulkan masalah baru.

Pada implementasi kegiatan AKSK, pada umumnya kepala desa/lurah dan aparatnya terlibat mulai tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Keterlibatan kepala desa/lurah ini diketahui dari diskusi dengan anggota kelompok maupun hasil pengamatan partisipasi. Meskipun demikian, dukungan dari aparat desa/kelurahan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, terutama berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan dan pengembangan usaha yang dikelola WDS.

### **d. Dukungan Masyarakat**

Warga masyarakat di luar kelompok/bukan sasaran kegiatan AKSK, dan tokoh masyarakat (RT/RW), memberikan dukungan dalam pengelolaan kegiatan AKSK. Informasi yang terhimpun dalam penelitian ini yang berkaitan dengan dukungan masyarakat, yaitu :

- 1) Sebagai kelompok binaan WDS untuk mengelola usaha tertentu atau sebagai kelompok pengembangan.

- 2) Meminjam peralatan catering, memesan kue-kue dan simpan pinjam kas WDS.
- 3) Bekerja pada proses produksi pada UEP yang dikelola WDS.
- 4) Memanfaatkan simpan pinjam yang dikelola WDS.
- 5) Memasarkan produk WDS.
- 6) Mengikuti bimbingan dan pelatihan UEP.

Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan dampak positif kegiatan AKSK bagi masyarakat. Bahwa kegiatan AKSK sesungguhnya tidak hanya mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya semata. Akan tetapi juga berusaha melakukan pengguliran kepada keluarga rentan yang belum mendapat bantuan (seperti kasus di prov. Jatim) serta memperhatikan kebutuhan warga masyarakat yang belum mendapatkan program AKSK.

#### **e. Lingkungan fisik/geografis**

Lingkungan fisik merupakan kondisi yang menentukan implementasi dan keberhasilan kegiatan AKSK. Lingkungan fisik dapat menjadi sumber yang menyediakan bahan-bahan produksi dan atau iklim yang mendukung proses produksi. Namun demikian, lingkungan fisik juga dapat menjadi tantangan, dan bahkan kendala yang menyebabkan implementasi dan kinerja kegiatan AKSK tidak optimal dan atau mengalami kegagalan. Karena itu, lingkungan fisik perlu dipertimbangkan secara matang oleh anggota kelompok dengan bimbingan pendamping, maupun Instansi Sosial kabupaten/kota pada saat merencanakan jenis usaha yang akan dikelola kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya lingkungan cukup mendukung implementasi kegiatan AKSK. Dukungan lingkungan dapat dicermati dari kesesuaian antara ketersediaan bahan produksi dengan jenis usaha dan pemasaran. Hanya ditemukan yaitu kasus, dimana pilihan UEP tidak sesuai

dengan lingkungan geografis, yaitu pada ternak kambing di Kalimantan Selatan. Pada satu kelompok yang diberi modal awal 13 ekor kambing tinggal 8 ekor, dan pada satu kelompok lagi terdapat 6 ekor seluruhnya mati, karena daerah tersebut rawan banjir air asam yang merendam kandang kambing.

## **2. Input**

Prinsip pada sistem manajemen dalam proses produksi, apabila bahan dasar (*raw material*) yang dimasukkan ke dalam mesin produksi berupa sampah, maka hasil yang akan dikeluarkan akan berupa sampah pula. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bahan dasar atau input yang akan diproses, yaitu keluarga rentan, pendamping, program/kegiatan, dan anggaran.

### **a. Keluarga rentan**

Penerima kegiatan AKSK adalah keluarga dewasa (perkawinan di atas 5 tahun) dalam kategori rentan dan mempunyai embrio usaha ekonomis produktif, terutama keluarga yang masuk kelompok Rumah Tangga Miskin (kode M) dan rumah Tangga Hampir Miskin (kode H) (lihat Dit PK, 2010).

Pedoman AKSK cukup longgar dalam menentukan kriteria sasaran kegiatan. Tidak secara tegas disebutkan identitas yang dipersyaratkan seperti kedudukan dalam rumah tangga, umur, status kependudukan dan lain-lain. Oleh karena itu, penanggung jawab, pelaksana dan pendamping membuat ukuran sendiri sesuai dengan pemahamannya.

### **b. Stimulan**

Walaupun di dalam petunjuk teknis (Dit PK, 2010), stimulan bukan tujuan akhir, tetapi pada prakteknya kegiatan AKSK lebih menonjol aspek ekonominya dibandingkan dengan aspek sosialnya. Setiap WDS mengembangkan usaha ekonomis produktif (UEP) yang dikelola secara individu maupun kelompok.



Di Sulawesi Utara, UEP dikelola secara kelompok dengan jenis usaha yang sama. Jenis UEP yang dikelola secara kelompok oleh WDS, yaitu penyewaan peralatan catering, peralatan pembuatan kue-kue dan nelayan. Peralatan ditempatkan di salah satu anggota atau ketua kelompok berdasarkan hasil musawarah, dengan pertimbangan peralatan tersebut aman dan mudah diambil bila sewaktu-waktu digunakan. Dari empat kelompok, satu kelompok dimana jenis bantuannya kurang sesuai. Tetapi bantuan yang berupa peralatan catering tersebut tetap dapat digunakan atau disewakan, dan kelompok memperoleh penghasilan dari sewa peralatan tersebut.

Di Sumatera Barat, UEP dikelola secara individu, sehingga jenis usahanya berbeda-beda pada setiap penerima AKSK. Jenis UEP yang dikelola WDS secara individu, yaitu dagang sembako, kue-kue, ternak kambing, dagang sayuran, meubeler, dan kelengkapan rumah tangga (sarung bantal, sprei, badcover), asesoris dan pakaian adat. Bantuan dinilai WDS sudah sesuai, karena dalam bentuk uang tunai. WDS merasakan keleluasaan dalam memanfaatkan dana tunai tersebut untuk kegiatan usaha yang dikelolanya. Karena berupa dana tunai, maka WDS bisa mengelola UEP lebih dari satu jenis, seperti jual makanan dan ternak kambing.

Di Kalimantan Selatan, satu kelompok mengelola UEP secara individu, dan empat kelompok mengelola UEP dengan jenis usaha yang sama. Jenis UEP yang dikelola WDS, yaitu ternak kambing, mesin perontok padi, bantuan sarana usaha (sepeda, gerobak, dan warungan/sembako). Bantuan UEP sudah sesuai dengan proposal yang dibuat oleh WDS. Tetapi karena tidak didahului dengan studi kelayakan, maka, ditemukan permasalahan dalam pengelolaan UEP tersebut. Secara ekonomi, bantuan sarana usaha dalam bentuk sepeda dan gerobak, memberikan keuntungan bagi WDS dalam bentuk menekan pengeluaran rutin WDS. Adanya bantuan sepeda dan gerobak, menekan pengeluaran WDS antar Rp. 120.000 – Rp. 150.000 per bulan. Pada UEP penyewaan perontok

padi, belum memberikan hasil bagi WDS, karena bantuan perontok padi tersebut diterima WDS, ketika musim panen sudah lewat. Kemudian pada UEP ternak kambing, juga belum memberikan hasil bagi WDS. Modal awal yang berupa kambing sebagian besar mati, karena kambing-kambing tersebut ditempatkan di lokasi rawan banjir, sakit dan WDS tidak paham beternak kambing. Gagalnya WDS mengelola UEP ternak kambing ini, membuat WDS patah semangat untuk mengelola UEP dari bantuan pemerintah.

Di Jawa Timur, UEP dikelola secara individu dengan jenis usaha, yaitu warung sembako, dan aneka makanan ringan, tanaman obat dan ternak kambing. Bantuan UEP yang dikelola oleh WDS memang sudah sesuai dengan proposal yang disusun oleh mereka. UEP tersebut sifatnya pengembangan dari usaha anyaman bambu yang menjadi mata pencaharian WDS. UEP yang dikelola WDS tersebut sudah memberikan keuntungan secara ekonomi. Sementara itu pada UEP ternak kambing, kurang berhasil, karena sebagian kambing terserang cikungunya dan kudisan. Meskipun ada kambing yang melahirkan, tetapi juga ada yang mati.

### **c. Pendamping**

Pendamping adalah seseorang yang mampu melaksanakan berbagai peranan sosial dalam upaya mendukung penerima kegiatan AKSK. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh pendamping lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknis, dibandingkan dengan kegiatan administratif.

Berkaitan dengan pendamping, penelitian ini mencermati beberapa hal yang berkaitan dengan rekrutmen, kompetensi, pelatihan dan aktivitasnya dalam melakukan pendampingan.

- 1) Rekrutmen pendamping pada lokasi penelitian tidak sama. Di Sumatera Barat pendamping direkrut dari unsur masyarakat setempat atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); di Sulawesi Utara pendamping direkrut dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan; di Kalimantan Selatan dari kepala desa dan

pegawai dinas pendidikan, dan di Jawa Timur dari unsur aparat desa dan tokoh masyarakat. Berkaitan dengan rekrutmen pendamping, di dalam pedoman teknis tidak mengatur secara tegas berkaitan dengan kualifikasi pendamping. Disebutkan di dalam pedoman teknis, bahwa " secara penuh melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berdomisili dan tinggal di lokasi kegiatan, yang mampu menjadi tenaga motivator dan dinamisator....". Di lapangan, TKSK belum dilibatkan sebagai pendamping pada kegiatan AKSK.

- 2). Kompetensi pendamping sebagian besar belum cukup memadai, yang dicermati dari pemikiran dan gagasannya tentang eksistensi AKSK, baik terkait dengan kriteria sasaran, manajemen AKSK dan exit strategy ketika kegiatan AKSK berakhir.
- 3). Pemantapan telah diikuti oleh sebagian besar pendamping. Namun demikian, waktu pelatihan yang terbatas, belum banyak memberikan pengetahuan tentang AKSK. Memang, di dalam pedoman teknis, tidak diatur secara eksplisit mengenai pemantapan pendamping AKSK ini. Bagi pendamping yang sudah berpengalaman atau sudah sering memberikan pendampingan pada program yang diselenggarakan oleh Instansi Sosial, kinerjanya cukup baik. Mereka aktif mencari informasi ke instansi sosial Kota/Kabupaten maupun instansi sosial provinsi.
- 4). Pada kasus Sumatera Barat, 2 (dua) pendamping dari unsur PSM melakukan pendampingan di wilayah desa/ kelurahan. Seorang pendamping, masing-masing mendampingi 20 orang WDS. Pada kasus Sulawesi Utara, seorang pendamping dari unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja Minahasa Selatan dan PSM melakukan pendamping di 3 (tiga) kecamatan lokasi AKSK, dengan WDS yang

didampingi berjumlah 40 orang. Di Kalimantan Selatan, dua orang pendamping direkrut dari kepala desa dan pegawai Diknas yang mendampingi 40 orang WDS. Kemudian pada kasus Jawa Timur, 2 (dua) orang pendamping dari unsur aparat desa, tokoh masyarakat masing-masing mendampingi 40 orang WDS.

- 5). Implementasi AKSK secara administratif selama 12 bulan. Namun demikian, hanya selama enam bulan kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI, yaitu Juli - Desember 2009. Pendamping menerima honor per bulan sebesar Rp 250.000 dipotong pajak 15 persen, sehingga menerima bersih Rp. 235.000. per bulan. Padahal pada praktiknya di lapangan, program tahun 2009 masih berlangsung hingga tahun 2010, karena terjadi keterlambatan ketika penyaluran bantuan UEP. Oleh karena itu, pendamping masih diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada WDS. Besarnya honor yang diterima oleh pendamping sebesar Rp. 235.000, apabila dikaitkan dengan beban kerja pendamping dan luasnya wilayah kerja, tentu tidak berarti apa-apa.

#### **d. Komponen Kegiatan**

Pedoman Teknis tidak secara eksplisit mengatur langkah-langkah atau alur kegiatan AKSK, dimana kegiatan tersebut melibatkan unsur aparat desa/kelurahan, instansi sosial kabupaten dan kota serta instansi sosial provinsi.

Alur kegiatan AKSK dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pendaftaran dan seleksi data, serta penentuan calon penerima AKSK.
- 2). Pengajuan daftar lokasi dan sasaran AKSK kepada instansi sosial kabupten/kota, yang diteruskan kepada instansi sosial provinsi.

- 3). Penyiapan bahan dan dokumen kegiatan di lokasi.
- 4). Rekrutmen pendamping.
- 5). Pemantapan pendamping dan penyiapan kondisi WDS.
- 6). Pendampingan.
- 7). Pemantapan WDS.
- 8). Penyusunan proposal oleh WDS,
- 9). Penyaluran bantuan usaha ekonomis produktif (UEP).
- 10). Pengendalian yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan pelaporan.

Mencermati alur kegiatan AKSK tersebut, ada kegiatan yang tidak disajikan secara tegas, padahal kegiatan tersebut sangat perlu. Kegiatan dimaksud, yaitu rekrutmen dan pemantapan tenaga pendamping. Ketidaktegasan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan serta pendamping.

**e. Anggaran**

AKSK merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga yang diarahkan pada optimalisasi peran dan fungsi keluarga, menitikberatkan pada upaya penyadaran sosial keluarga. Namun demikian, di lapangan aktivitas ekonomi lebih dominan daripada aktivitas sosialnya. Padahal, sesungguhnya bantuan UEP dimaksudkan sebagai strategi pemberdayaan keluarga, dan pada akhirnya diharapkan mendorong aktivitas sosial WDS. Bantuan UEP diberikan bersifat hibah murni, tanpa syarat dan tanpa penjaminan apapun.

Pada kegiatan AKS ini, teralokasikan anggaran setiap WDS Rp. 1,4 juta. Anggaran tersebut sudah memadai apabila kegiatan AKSK sifatnya pengembangan aktivitas ekonomi WDS yang telah dirintis sebelumnya. Meskipun pada praktiknya lain, dimana hampir separuh WDS belum memiliki embrio atau UEP sebelum menerima AKSK.

### **3. Proses**

Secara umum proses implementasi AKSK dapat dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan.

#### **a. Tahap awal**

Pada tahap ini dilakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- 1) Pendaftaran dan seleksi data, serta penentuan calon penerima AKSK. Kegiatan yang dilakukan adalah mendata calon penerima kegiatan AKSK, by name by address.
- 2) Pengajuan daftar lokasi dan sasaran AKSK kepada instansi sosial kabupaten/kota, yang diteruskan kepada instansi sosial provinsi.
- 3) Penyiapan bahan dan dokumen kegiatan di lokasi. Kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dan meng-up date data penerima kegiatan WSKS dan melengkapi persyaratan, penerbitan Surat Keputusan tentang penerima kegiatan AKSK.
- 4) Rekrutmen pendamping. Kegiatan yang dilakukan adalah merekrut pendamping sebanyak 2 (dua) orang per kota/kabupaten lokasi kegiatan AKSK. Pada rekrutmen pendamping ini ditemukan berbagai variasi latar belakang para pendamping, yaitu (1) dari unsur PSM, (2) dari unsur aparat desa dan (3) dari unsur instansi pemerintah.
- 5) Pemantapan pendamping. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi pendamping berkaitan dengan kegiatan AKSK. Pemantapan pendamping masih kurang, masih ditemukan pendamping yang belum memahami dengan tepat kegiatan AKSK.
- 6) Pemantapan WDS. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bimbingan sosial, motivasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan UEP yang dikelola WDS.

Pemantapan ini masih dirasakan kurang frekuensinya oleh WDS.

- 7) Penyusunan proposal oleh WDS. Kegiatan yang dilakukan adalah WDS menyusun proposal UEP yang dikoordinasikan di dalam kelompok. Sebagian besar proposal sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat WDS, dan hanya sebagian kecil sebanyak 2 kasus yang proposalnya tidak sesuai dengan kebutuhan WDS.

## **b. Tahap Pelaksanaan**

Proses pencairan dana, pembelanjaan dana, pengelolaan kegiatan UEP secara bersama-sama dalam kelompok sampai pada pengelolaan hasil usaha dan pengembangan usaha, Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap awal sampai tahap pelaksanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pada kegiatan AKSK, adalah :

### **1) Penyaluran bantuan usaha ekonomis produktif (UEP).**

Ada dua model penyaluran bantuan UEP, yaitu :

#### **(a) Sistem rekanan**

Tiga dari empat provinsi yang menjadi lokasi penelitian, menggunakan model penyaluran bantuan UEP dalam bentuk bahan atau barang berdasarkan proposal yang dibuat WDS, dan telah ditelaah oleh Instansi Sosial kabupaten/kota. Bantuan UEP dikirim Instansi Sosial melalui sistem rekanan.

#### **(b) Sistem cash transfer ke rekening kelompok**

Satu dari empat provinsi yang menjadi lokasi penelitian menggunakan model penyaluran bantuan UEP dalam bentuk uang tunai. Mekansime penyalurannya melalui Bank Pemerintah ke rekening kelompok (nama Ketua Kelompok).

## 2) Pengelolaan Usaha

Di dalam buku pedoman teknis tidak tersurat secara jelas pengelolaan UEP. Model kelompok (semacam KUBE) memang cukup pragmatis, meskipun dalam praktiknya relatif tidak mudah dilaksanakan. Temuan lapangan menunjukkan, tidak semua penerima program mengelola usaha sejenis dalam satu kelompok 10 orang, tetapi tetap dalam satu manajemen. Beberapa variasi bentuk usaha adalah :

### (a) Usaha dikelola secara perorangan.

Usaha yang dikelola secara per orangan ditemukan pada kasus Sumatera Barat, Jawa Timur dan 1 (satu) kelompok pada kasus Kalimantan Selatan. Penerima kegiatan AKSK membentuk kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok, sekaligus namanya tertera pada rekening bank. Kelompok dimanfaatkan untuk pembinaan, rencana pengembangan usaha dan anggota, dan wadah kegiatan sosial.

### (b) Pengelolaan usaha secara berkelompok

Usaha yang dikelola secara kelompok ditemukan pada kasus Sulawesi Utara, dan 4 (empat) kelompok pada kasus Kalimantan Selatan. Penerima kegiatan AKSK membentuk kelompok yang beranggotakan 5-10 orang. Kelompok ini memiliki jenis usaha yang sama dan mengelola secara bersama-sama. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Semua aktivitas WDS, baik sosial maupun ekonomis, dikelola di dalam kelompok.

Ketika WDS menyusun proposal, mereka memperoleh bimbingan dari instansi sosial kabupaten/kota maupun pendampingan. Namun demikian, di lapangan ditemukan bahwa beberapa UEP yang diusulkan WDS kurang



prospektif. Misalnya, bantuan peralatan catering, ternak kambing, perontok padi, dan mesin ketinting belum atau kurang memberikan keuntungan secara ekonomis.

Persoalan dimaksud, yaitu (1) kapasitas mesin ketinting dengan PK kecil (5.5 PK), sehingga nelayan hanya mampu mencari ikan di pinggir, (2) jumlahnya hanya satu unit, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh seluruh kelompok, dan (3) pemerintah tidak melindungi nelayan kecil, dimana kapal-kapal besar bebas mencari ikan di tempat nelayan kecil. Pada UEP mesin perontok padi pun belum memberikan keuntungan secara ekonomi. Bantuan berupa perontok padi diterima WDS, ketika panen sudah usai. Kemudian pada UEP ternak kambing, seluruhnya mati, karena seringkali kebanjiran.

### **3) Administrasi Kegiatan**

Administrasi kegiatan dimaksud berkaitan dengan pembukuan atau pencatatan keseluruhan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan AKSK. Tujuan dari administrasi kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan anggota kelompok tentang manajemen pengelolaan usaha, dan membiasakan anggota untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan usaha, serta untuk kepentingan pemantauan.

Pada kasus Sulawesi Utara, satu dari empat kelompok sudah melakukan pencatan/pembukuan, seperti buku rapat, buku inventaris barang, dan buku kas. Kemudian pada kasus Sumatera Barat, empat dari delapan kelompok juga melakukan pembukuan/pencatatan atas kegiatan yang dilakukan, seperti buku kas, buku rapat, buku tamu dan buku kas, dan buku simpan pinjam. Sementara itu pada kasus Kalimantan Selatan, sebagian besar kelompok belum membuat administrasi atas kegiatan dan pengelolaan usaha yang dilaksanakan.

#### **4) Pertemuan Kelompok.**

Setiap anggota kelompok diharapkan akan membicarakan cara-cara pengelolaan usaha dan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan dengan mekanisme kelompok. Melalui pertemuan kelompok secara rutin, akan terjadi proses pemberlajaran bagi anggota kelompok. Meskipun pada umumnya anggota kelompok berpendidikan rendah, melalui pertemuan kelompok mereka akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, baik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Dari empat lokasi penelitian, semua WDS sudah memiliki jadwal rutin pertemuan kelompok, yaitu sebulan sekali. Acara pada pertemuan tersebut antara lain mengevaluasi kegiatan, menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota, arisan dan tukar menukar pengalaman usaha. Terbatasnya waktu pertemuan antar anggota WDS tersebut menyebabkan masih rendah terjadi transfer pengetahuan dan pemikiran berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kelompok, baik pada aspek ekonomi maupun sosial.

#### **5) Pertemuan Pendampingan**

Pertemuan anggota WDS dengan pendamping dimulai sejak dari proses penyusunan proposal (kasus Sulawesi Utara dan Jawa Timur). Pada tahap tersebut pendamping membimbing WDS untuk menyusun proposal kegiatan. Selain itu pendampingan mengenai penggunaan anggaran, pengelolaan usaha dan pengembangan usaha. Setiap WDS dapat menghubungi pendamping kapan saja apabila diperlukan. Tetapi untuk pertemuan rutin yang terjadwal, dilaksanakan sebulan sekali dengan agenda pembinaan yang sudah dipersiapkan sesuai kebutuhan.

## 6) Pengelolaan hasil usaha

Pengelolaan hasil usaha ini tentunya mengikuti cara pengelolaan usaha. Sebagaimana temuan penelitian yang diuraikan di atas, ada 2 (dua) variasi cara pengelolaan usaha. Berdasarkan cara pengelolaan usaha, maka pengelolaan hasil usaha sebagai berikut :

- (a) Bagi usaha yang dikelola secara perorangan, hasilnya langsung diambil oleh masing-masing WDS.

UEP yang dikelola oleh WDS secara perorangan ditemukan pada kasus Sumatera Barat, satu kelompok di Kalimantan Selatan dan kasus Jawa Timur. Meskipun WDS membentuk kelompok kecil (5 orang atau 10 orang ), kelompok tidak terlibat langsung pada UEP yang dikelola WDS.

- (b) Bagi usaha yang dikelola secara kelompok, hasilnya dibagi sama besar kepada 10 orang anggota, setelah dikurangi biaya operasional dan kas kelompok.

UEP yang dikelola oleh WDS secara kelompok dengan jenis usaha yang sama, pada kasus Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan (4 kelompok).

Dari empat lokasi penelitian yang mengelola UEP secara kelompok sebanyak 8 (delapan) kelompok, sebagian belum memberikan manfaat ekonomi. UEP yang belum memberikan manfaat ekonomi, yaitu UEP nelayan pada kasus Sulawesi Utara, UEP ternak kambing dan mesin perontok padi pada kasus Kalimantan Selatan belum memberikan hasil. Sementara sepeda, gerobak sudah memberikan hasil menekan biaya transportasi keluarga. UEP yang sudah memberikan keuntungan secara ekonomi, baru mampu membagi hasil berkisar Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per bulan.

Tambahan penghasilan sebesar tersebut cukup kecil, dibandingkan dengan modal awal yang disiapkan oleh Kementerian Sosial RI sebesar RP. 1.4 juta per orang, waktu dan tenaga yang dicurahkan WDS untuk mengelola UEP.

**c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian dari manajemen program yang dilaksanakan sebagai upaya pengendalian, agar proses dan hasil dari pelaksanaan AKSK tercapai sesuai rencana. Penanggung jawab dan pelaksanaan program serta pendamping provinsi, kabupaten dan desa menyatakan, bahwa monev penting dilaksanakan, dan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan program. Berdasarkan hasil monev, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan kegiatan AKSK di lapangan.

Pada umumnya pengendalian telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten dan desa. Temuan penelitian, menunjukkan bahwa masih belum ada kesungguhan Daerah untuk melaksanakan pengendalian kegiatan pada AKSK. Instansi sosial provinsi maupun kabupaten melakukan moneva secara insidental, dengan alasan terbatasnya anggaran. Pada Kasus Sumatera Barat dan Jawa Timur, meskipun honor pendamping desa rendah, yaitu Rp. 235.000, pendamping aktif melakukan monitoring dari kelompok ke kelompok. Sedangkan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pertemuan seluruh kelompok, dilaksanakan sebulan sekali. Pada kasus di lokasi penelitian lain, monitoring dilaksanakan bersamaan dengan monitoring pada kegiatan yang lain.

Dokumen hasil moneva lebih pada aspek administratif, dan belum menyajikan aspek fungsional dari implementasi AKSK. Format pelaporan belum ada keseragaman dan materi pelaporan, berbeda-beda antar masing-masing komponen. Hal ini menyebabkan hasil pengendalian sulit dianalisis.

#### **d. Terminasi**

Istilah terminasi sangat dikenal di dalam intervensi pekerjaan sosial, baik mikro, meso maupun makro. Terminasi merupakan tahap pengakhiran kegiatan, karena semua tahapan telah dilalui sesuai waktu yang direncanakan, dan tujuan dari intervensi tersebut telah tercapai. AKSK sebagai model dari intervensi pekerjaan sosial, tentunya pada akhir proses pemberdayaan menetapkan terminasi.

Temuan lapangan menunjukkan, bahwa akhir dari implementasi AKSK tidak ada kejelasan dan tidak ada program tindak lanjut bagi WDS. Padahal, mereka secara administratif telah selesai dari proses pemberdayaan atau sudah pada tahap terminasi. Di lapangan yang terjadi, bahwa setelah selesai pemberdayaan selama satu tahun atau telah memasuki tahap terminasi, WDS dan para pendamping sosial desa lepas oleh instansi sosial. Kemudian instansi sosial daerah mencari lokasi baru untuk program tahun berikutnya, dan begitu seterusnya.

### **B. PENGARUH KEGIATAN AKSK TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Aspek produk dalam penelitian ini mencakup dua sasaran, yaitu kondisi akhir kelompok, dan WDS setelah mereka menerima kegiatan AKSK. Kedua sasaran pada aspek produk ini perlu dicermati untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang pengaruh dari implementasi kegiatan AKSK.

#### **1. Secara Kelompok**

Usaha kelompok sesungguhnya dirancang bukan sekedar wadah kegiatan sekelompok orang, tetapi sebagai implementasi metode bimbingan kelompok (*groupwork*) pada intervensi pekerjaan sosial. Melalui kelompok setiap individu akan mengalami proses belajar, baik hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun sosial. Namun demikian, implementasi kegiatan AKSK, ketika di lapangan kelompok dipahami sebatas "wadah kegiatan bersama". Oleh karena itu, ada kecenderungan terbentuknya kelompok sebagai sarana untuk mengelola satu jenis usaha yang dikelola secara bersama-sama.

### **a. Kondisi Ekonomi**

Kegiatan AKSK menggunakan pendekatan kelompok dengan jumlah anggota antara 5 – 10 orang WDS. Fungsi kelompok tersebut, yaitu (1) untuk memfasilitasi pencairan dana, dimana pencarian dana kegiatan AKSK melalui rekening ketua kelompok, (2) memudahkan dalam bimbingan dan monitoring, (3) membicarakan penyelesaian masalah dan pengembangan UEP.

Temuan lapangan menunjukkan, bahwa konsep kebersamaan ini ketika di lapangan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan anggota, rendahnya kesadaran anggota, rendahnya pemahaman anggota terhadap hakikat kelompok dan peran yang dominan pada pengurus kelompok. Kondisi tersebut tentu berdampak pada pengelolaan kegiatan kelompok.

Pada kasus Sulawesi Utara menggunakan pendekatan kelompok untuk kegiatan sosial maupun ekonomi. Dari UEP, kelompok memperoleh penambahan uang kas dengan perhitungan 60 persen dibagi anggota, dan 40 persen dimasukkan kas kelompok. Selain itu kas kelompok bertambah dari hasil simpan pinjam.

Pada kasus Sumatera Barat, kelompok tidak mengelola kegiatan ekonomi (UEP), tetapi mengelola kegiatan sosial. Kegiatan ekonomi (UEP) dikelola secara individu, atau pada masing-masing WDS. Kelompok memperoleh uang kas dan iuran dana sosial yang dibayarkan oleh anggota sebesar Rp. 3.000 - 5.000 per bulan. Selain itu kas kelompok bertambah dari hasil simpan pinjam.

Pada kasus Kalimantan Selatan, dari lima kelompok penerima kegiatan AKSK, dua kelompok mengelola UEP secara perorangan, dan 3 (tiga) kelompok mengelola UEP secara kelompok. Pada UEP yang dikelola secara perorangan, sudah menyumbang uang kas kelompok. Sedangkan pada UEP yang dikelola secara kelompok, belum memberikan keuntungan

ekonomis kepada kelompok, sehingga belum ada uang kas kelompok. Bahkan, satu kelompok UEP ternak kambing gagal, karena seluruh kambing mati kebanjiran dan mati karena sakit.

## **b. Kondisi Sosial Psikologis**

Keuntungan sosial secara kelompok dicermati dari aktivitas bersama yang dilakukan WDS di dalam kelompok. Pertemuan kelompok WDS memperkuat kebersamaan, terjadinya proses belajar untuk saling menghargai pendapat orang lain, menerima perbedaan pandangan antar WDS dan sebagian kecil sudah peduli terhadap permasalahan yang dihadapi WDS.

Pada kasus Sumatera Barat, dua kelompok penerima AKSK sudah memiliki program santunan sosial bagi anggota/keluarga anggota yang meninggal sebesar Rp. 50.000, sakit sebesar Rp. 25.000 dan hajatan sebesar Rp. 20.000 hal yang sama juga sudah dilakukan di Jawa Timur. Sedangkan pada kasus yang lain belum ada kegiatan santunan sosial.

Pada umumnya WDS secara kelompok sudah mengembangkan jejaring kerja dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan AKSK. Jejaring kerja tersebut terjadi pada kegiatan penyediaan bahan produksi, bantuan tenaga pada proses produksi dan pemasaran hasil produksi. Masyarakat sekitar mendukung kegiatan yang dilaksanakan WDS dengan memanfaatkan simpan pinjam. Selain itu, pada Kasus Sumatera barat, 4 (empat) kelompok sudah memiliki kelompok binaan baru. Demikian juga kasus di Jatim telah memberikan pengguliran kepada kelompok/anggota baru. Hal ini menggambarkan adanya kepercayaan terhadap kegiatan dan kemampuan WDS.

## **2. Secara Individual**

### **a. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi WDS, dapat diketahui melalui penelitian evaluasi ini dicermati aspek penghasilan, tabungan, kepemilikan alat-alat rumah tangga dasar, dan harta milik. Skor pada

aspek-aspek/sub aspek tersebut kemudian diinterpretasikan melalui teknik analisis kuantitatif dengan bantuan statistik non parametric.

Khusus pada variabel ekonomi, hipotesis uji pada penelitian ini, yaitu :

Ho = Tidak ada pengaruh AKSK terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Dengan hipotesa alternatif :

H1 = Ada pengaruh AKSK terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Pengujian hepotesis penelitian tersebut menggunakan uji statistik non parametric dari willcoxon. Dimana uji statistik ini selain mengetahui adanya perbedaan, juga mengetahui besarnya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Dari uji statistik willcoxon tersebut diperoleh hasil sebagai barikut :

#### **NPar Tests**

##### **Descriptive Statistik**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Sebelum	160	8.39	1.500	6	14
Sesudah	160	9.18	1.648	6	15

#### **Wilcoxon Signed Ranks Test**

##### **Ranks**

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah -	Negative Ranks	0(a)	.00	.00
Sebelum	Positive Ranks	64(b)	32.50	2080.00
	Ties	96(c)		
	Total	160		

*a Sesudah < Sebelum*

*b Sesudah > Sebelum*

*c Sesudah = Sebelum*



### Test Statistiks(b)

	VAR0000 2 - VAR0000 1
Z Asymp. Sig. (2-tailed)	-7.056(a) .000

a Based on negative ranks.

b Wilcoxon Signed Ranks Test

Hasil analisis dengan bantuan **statistik deskriptif** diperoleh hasil sebagai berikut :

1). Untuk variable sebelum perlakuan :

- Jumlah sample = 160
- Nilai rata-rata = 8.39
- Nilai standar deviasi = 1.500
- Nilai minimum = 6
- Nilai maksimum = 14

2). Untuk variable sesudah perlakuan :

- Jumlah sample = 160
- Nilai rata-rata = 9.18
- Nilai standar deviasi = 1.648
- Nilai minimum = 6
- Nilai maksimum = 15

Dari tabel **rank** diperoleh informasi :

- Bertanda negative sebanyak = 0
- Bertadna positif sebanyak = 64
- Bernilai nol = 96

Dari tabel *test statistik* diperoleh informasi :

- Exact Sig, (2-tailed) = 0,000

Karena nilai exact sig < taraf nyata pada  $\alpha=0,05$ , maka dapat menolak  $H_0$ . Artinya, ada pengaruh pemberdayaan keluarga melalui kegiatan AKSK terhadap kondisi ekonomi WDS.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi kegiatan AKSK terhadap kondisi ekonomi WDS, total skor pada variable kondisi ekonomi WDS tersebut dibuat kategori, sehingga menghasilkan informasi sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel : 11  
Kondisi Ekonomi WDS Sebelum dan Sesudah  
Menerima Kegiatan Aksk

Kategori	Skor	Sebelum		Sesudah	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
Rendah	6 - 10	148	92.5	124	83.75
Sedang	11 - 14	12	7.5	25	15.63
Tinggi	15 - 18	0	0.00	1	0.62
JUMLAH		160	100	160	100

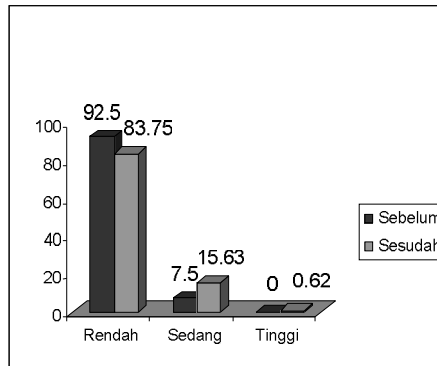
Sumber : Hasil Penelitian, 2010

**N = 160, Skor terendah = 6, Skor tertinggi = 18**

Tabel tersebut di atas menyajikan data, bahwa pada kategori rendah (skor 6-10), menunjukkan adanya pengaruh dari 148 orang menurun menjadi 124 orang atau ada kemajuan pada 24 orang. Kemudian pada kategori sedang (skor 11-14), menunjukkan adanya pengaruh dari 12 orang menjadi 25 orang atau ada kemajuan pada 13 orang. Selanjutnya pada kategori tinggi (skor 15-18), menunjukkan adanya pengaruh dari 0 (nol) orang menjadi 1 (satu) orang atau ada kemajuan pada 1 (satu) orang.

Data dalam persen untuk variabel ekonomi, antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut

Diagram 1 :  
Kondisi Ekonomi WDS Sebelum  
dan Sesudah Pemberdayaan



#### b. Pemenuhan Kebutuhan

Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan WDS melalui penelitian evaluasi ini dicermati aspek pangan, pakaian, tempat tinggal, sumber air bersih, penerangan dan jamban. Skor pada aspek-aspek tersebut kemudian diinterpretasikan melalui teknik analisis kuantitatif dengan bantuan statistik nonparametric.

Khusus pada variabel pemenuhan kebutuhan dasar, hipotesis uji pada penelitian ini, yaitu :

$H_0$  = Tidak ada pengaruh AKSK terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dengan hipotesa alternatif :

$H_1$  = Ada pengaruh AKSK terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Pengujian hipotesis penelitian tersebut menggunakan uji statistik nonparametric dari willcoxon. Dimana uji statistik ini selain

mengetahui adanya perbedaan, juga mengetahui besarnya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Uji statistik willcoxon tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

**NPar Tests**

**Descriptive Statistik**

	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
Sebelum	160	23.36	3.553	13	29
Sesudah	160	24.88	4.073	14	32

**Wilcoxon Signed Ranks Test**

**Ranks**

		<b>N</b>	<b>Mean Rank</b>	<b>Sum of Ranks</b>
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	0(a)	.00	.00
	Positive Ranks	109(b)	55.00	5995.00
	Ties	51(c)		
	Total	160		

*a Sesudah < Sebelum*

*b Sesudah > Sebelum*

*c Sesudah = Sebelum*

**Test Statistik(b)**

VAR	00002 -
VAR	00001
Z	-9.159(a)
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

*a Based on negative ranks.*

*b Wilcoxon Signed Ranks Test*

Hasil analisis dengan bantuan statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut :

1). Untuk variable sebelum perlakuan :

- Jumlah sample = 160
- Nilai rata-rata = 23.36
- Nilai standar deviasi = 3.553
- Nilai minimum = 13
- Nilai maksimum = 29

2). Untuk variable sesudah perlakuan :

- Jumlah sample = 160
- Nilai rata-rata = 24.88
- Nilai standar deviasi = 4.073
- Nilai minimum = 14
- Nilai maksimum = 32

Dari tabel rank diperoleh informasi :

- Bertanda negative sebanyak = 0
- Bertanda positif sebanyak = 109
- Bernilai nol = 51
- Exact Sig, (2-tailed)=0,000

Karena nilai exact Sig < tarafnya pada  $\alpha=0,05$ , maka dapat menolak  $H_0$ . Anasirnya, ada pengaruh pemberdayaan keluarga melalui AKSK terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan WDS

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi kegiatan AKSK terhadap pemenuhan kebutuhan dasar WDS, total skor pada variable pemenuhan kebutuhan dasar WDS tersebut dibuat kategori, sehingga menghasilkan informasi sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 12 :  
Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Responden  
Sebelum dan Sesudah Menerima AKSK

Kategori	Skor	Sebelum		Sesudah	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
Rendah	11-18	14	8.75	7	4.37
Sedang	19-26	95	59.38	80	50.00
Tinggi	27-33	51	31.87	73	45.63
JJUMLAH	160	100	160	100	

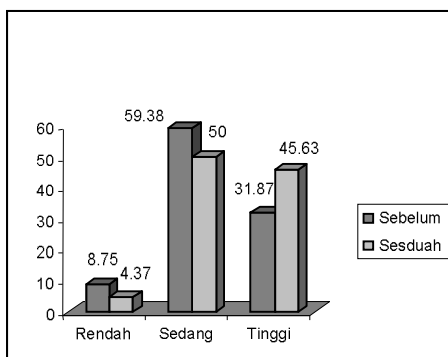
*N = 160, Skor minimum = 11; Skor maksimum = 33*

*Sumber : Hasil Penelitian, 2010*

Tabel tersebut di atas menyajikan data, bahwa pada kategori rendah (skor 11-18), menunjukkan adanya pengaruh dari 14 orang menurun menjadi 7 orang atau ada kemajuan pada 7 orang. Kemudian pada kategori sedang (skor 19-26), menunjukkan adanya pengaruh dari 95 orang menjadi 80 orang atau ada kemajuan pada 15 orang. Selanjutnya pada kategori tinggi (skor 27-33), menunjukkan adanya pengaruh dari 51 orang menjadi 73 orang atau ada kemajuan pada 22 orang.

Persandingan data dalam persen untuk variabel pemenuhan kebutuhan, antara kondisi sebelum dan sesudah pemberdayaan dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 2 :  
Pemenuhan Kebutuhan WDS Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan



**c. Kondisi Sosial-Psikologis**

Untuk mengetahui kondisi sosial WDS, melalui penelitian evaluasi ini dicermati aspek pendidikan dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Skor pada aspek-aspek/sub aspek tersebut kemudian diinterpretasikan melalui teknik analisis kuantitatif dengan bantuan statistik nonparametrik.

Khusus pada variabel kondisi sosial, hipotesa uji pada penelitian ini, yaitu :

Ho = Tidak ada pengaruh AKSK terhadap kondisi sosial keluarga.

Dengan hipotesa alternatif

H1 = Ada pengaruh AKSK terhadap kondisi sosial keluarga.

Pengujian hepotesis penelitian tersebut menggunakan uji statistik nonparametric dari willcoxon. Dimana uji statistik ini selain mengetahui adanya perbedaan, juga mengetahui besarnya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Dari uji statistik willcoxon tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

**NPar Tests**

**Descriptive Statistiks**

N	Mean	Std.	Minimum	Maximum	Deviation
Sebelum	160	15.81	.795	15	18
Sesudah	160	17.52	.526	15	18

## Wilcoxon Signed Ranks Test

### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	4(a)	22.00	88.00
	Positive Ranks	142(b)	74.95	10643.00
	Ties	14(c)		
	Total	160		

*a Sesudah < Sebelum*

*b Sesudah > Sebelum*

*c Sesudah = Sebelum*

### Test Statistiks (b)

	VAR00002 - VAR00001
Z Asymp. Sig. (2-tailed)	-10.508(a)  .000

*a Based on negative ranks.*

*b Wilcoxon Signed Ranks Test*

Hasil analisis dengan bantuan statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1). Untuk variable sebelum perlakuan :
  - Jumlah sample = 160
  - Nilai rata-rata = 15.81
  - Nilai standar deviasi = 0.795
  - Nilai minimum = 15
  - Nilai maksimum = 18
- 2). Untuk variable sesudah perlakuan :
  - Jumlah sample = 160



- Nilai rata-rata = 17.52
- Nilai standar deviasi = 0.526
- Nilai minimum = 16
- Nilai maksimum = 18

Dari tabel rank diperoleh informasi :

- Bertanda negative sebanyak = 4
- Bertanda positif sebanyak = 142
- Bernilai nol = 14

Dari tabel test statistik diperoleh informasi :

- Exact Sig, (2-tailed) = 0,00

Karena nilai exact sig < taraf nyata  $\alpha = 0,05$ , maka dapat menolak  $H_0$ . Artinya, ada pengaruh AKSK terhadap kondisi sosial-psikologis WDS.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi AKSK terhadap kondisi sosial psikologis WDS, total skor pada variable kondisi sosial psikologis WDS tersebut dibuat kategori, sehingga menghasilkan informasi sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 13  
Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Responden  
Sebelum Dan Sesudah Menerima Aksk

Kategori	Skor	Sebelum		Sesudah	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
Rendah	6 - 10	0	0.00	0	0.00
Sedang	11 - 15	66	41.25	0	0.00
Tinggi	16 - 18	94	58.75	160	100.00
JUMLAH		160	100	160	100

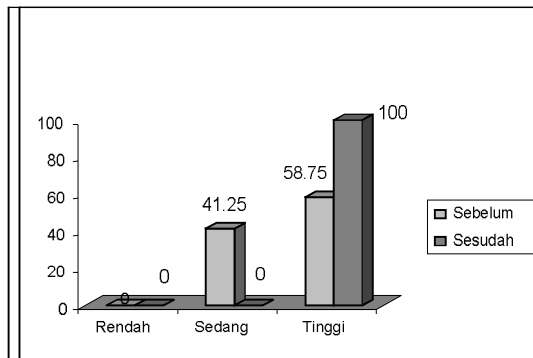
*Sumber : Hasil Penelitian, 2010*

*N = 160, Skor minimum = 6; Skor maksimum = 18*

Tabel tersebut di atas menyajikan data, bahwa pada kategori rendah (skor 6-10), tidak ada perubahan. Kemudian pada kategori sedang (skor 11-15), menunjukkan adanya pengaruh sebanyak 66 orang masuk kategori tinggi. Selanjutnya pada kategori tinggi (skor 16-18), menunjukkan adanya pengaruh dari 94 orang menjadi 160 orang atau ada kemajuan pada 66 orang.

Persandingan data dalam persen untuk variabel sosial psikologis, antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat pada diagram 8 berikut :

Diagram 3 :  
Kondisi Psiko-Sosial WDS Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan



Secara kumulatif, pengaruh kegiatan AKSK sebagaimana terlihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14 :  
Kondisi WDS Sebelum dan Sesudah Menerima AKSK

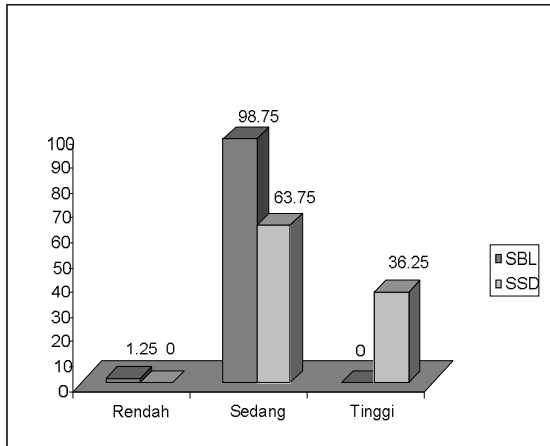
Kategori	Skor	Sebelum		Sesudah	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
Rendah	23 - 38	2	1.25	0	0
Sedang	39 - 54	158	98.75	102	63.75
Tinggi	55 - 69	0	0	58	32.25
JUMLAH		160	100	160	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2010

N = 160, Skor minimum = 23; Skor maksimum = 39

Persandingan data dalam persen untuk variabel kondisi kesejahteraan WDS, antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat pada diagram 4 berikut :

Diagram 4 :  
Kondisi WDS Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan



### C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PEMBERDAYAAN AKSK

Keberhasilan atau kegagalan dari implemmentasi program ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Dua faktor ini tidak dapat dilepaskan pada setiap implemmentasi program apapun, tidak terkecuali AKSK.

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat pengaruh implementasi AKSK. Berdasarkan temuan lapangan, faktor yang mendukung implementasi AKSK, yaitu :

- a. Semangat WDS untuk berubah ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan warga untuk melaksanakan jadwal kegiatan, membayar iuran sosial dan mengikuti pendampingan.

- b. Dukungan kepala desa dan tokoh masyarakat lokal pada proses pengelolaan usaha kelompok. Pada umumnya kepala desa mengikuti semua rangkaian kegiatan pengelolaan usaha kelompok mulai tahap persiapan hingga pengelolaan. Pada tahap persiapan kepala desa memberikan pertimbangan dalam penentuan jenis usaha kelompok. Kemudian pada tahap pengelolaan, kepala desa memberikan arahan dan bimbingan kepada WDS.
- c. Dukungan warga masyarakat di luar usaha kelompok dalam proses produksi maupun dalam pemasaran produk usaha kelompok. Sejauh ini warga masyarakat di luar tidak menunjukkan kecemburuan sosial terhadap penerima AKSK membantu anggota kelompok. Sebaliknya, membantu dan bekerja sama dengan mereka.
- d. Kondisi lingkungan geografis yang menyediakan sumber atau bahan-bahan dalam proses produksi. Pada umumnya lingkungan menyediakan bahan-bahan yang murah, dan bahkan cuma-cuma bagi proses produksi kelompok.
- e. Proses distribusi honor pendamping berjalan lancar. Pendamping menerima honor melalui BRI tepat pada waktunya. Persoalannya, honor pendamping sudah diterima dan sudah habis, padahal sebenarnya mereka itu belum melaksanakan tugas-tugas pendampingan.
- f. Keterlibatan instansi sektoral (pertanian, peternakan) dan dunia usaha dalam proses produksi kelompok.

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dipahami sebagai kondisi yang memperlemah pengaruh implementasi AKSK. Berdasarkan temuan lapangan, faktor yang menghambat implementasi AKSK, yaitu :

- a. Proses pencarian dana untuk kegiatan usaha kelompok melalui BRI berjalan lancar. Tetapi dana kegiatan tersebut baru dapat

dicairkan pada pertengahan tahun anggaran 2009, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan AKSK.

- b. Pada umumnya WDS berpendidikan rendah, sehingga relatif sulit untuk memahami informasi yang berkenaan dengan pengelolaan usaha kelompok. Selain pendidikan yang rendah, waktu pelatihan keterampilan untuk mengelola usaha kelompok dirasakan masih kurang.
- c. Keterbatasan sarana kerja pada pendamping desa dan kecamatan, menyebabkan kegiatan pendampingan kurang intensif. Para pendamping sangat memerlukan pedoman kerja yang praktis, tetapi sampai akhir masa kerja pendampingan tidak diperoleh.
- d. Pengendalian oleh instansi sosial provinsi maupun instansi sosial kabupaten dalam bentuk monitoring dan evaluasi, masih rendah. Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan, tetapi belum sungguh-sungguh. Kegiatan monitoring dan evaluasi AKSK dilaksanakan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi pada program lain yang lokasinya berdekatan atau searah jalan.
- e. Adanya intervensi dari instansi sosial dalam penentuan jenis usaha kelompok, padahal jenis usaha tersebut kurang diminati dan tidak prospektif menurut anggota kelompok. Akibatnya, ditengah jalan anggota kelompok menghendaki pergantian jenis usaha.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini disajikan analisis hasil penelitian, yaitu analisis yang berkenaan dengan kinerja program dan analisis kesejahteraan sosial. Analisis kinerja program mencakup aspek konteks, input, proses dan produk dari kegiatan AKSK. Kemudian analisis kesejahteraan Sosial, mencoba mencermati pengaruh kegiatan AKSK dalam perspektif kesejahteraan sosial.

#### **A. KINERJA PROGRAM**

##### **1. Aspek Konteks**

Termasuk di dalam aspek konteks ini, adalah instrumentasi program, penyelenggara program, otoritas lokal, dukungan masyarakat dan lingkungan fisik/geografis. Unsur-unsur di dalam aspek konteks ini perlu diidentifikasi dengan baik, karena ikut mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan program.

##### **a. Instrumentasi program**

Pedoman teknis pelaksanaan AKSK telah disusun dan didistribusikan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga ke seluruh instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, tidak semua instansi Sosial kabupaten/kota dan pendamping di lapangan memiliki pedoman teknis tersebut. Artinya, jumlah pencetakan pedoman masih jauh dari kebutuhan di lapangan.

Selain persoalan jumlah, pedoman tersebut menurut instansi Sosial di Daerah dan pendamping lapangan tidak mudah untuk dilaksanakan, karena meskipun namanya

Pedoman Teknis, substansi yang dimuat di dalamnya masih bersifat umum. Instansi Sosial di Daerah dan Pendamping berupaya memahami pedoman teknis tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan menterjemahkannya ketika mereka melaksanakan kegiatan di lapangan.

Kekurangan pada pedoman teknis tersebut tentu akan mempengaruhi implementasi kegiatan AKSK di lapangan. Terjadinya bias dalam seleksi WDS, rekrutmen pendamping, dan tidak optimalnya pendampingan dan pengelolaan UEP, merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan AKSK.

b. Penyelenggara Program

Berbagai kondisi yang terjadi di daerah, seperti mutasi internal di lingkungan instansi sosial maupun eksternal antar SKPD, merupakan kondisi yang menyebabkan implementasi kegiatan SKPD belum mencapai tujuan secara optimal. Sebagaimana dikeluhkan oleh sebagian pendamping provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa “penempatan orang pada unit teknis dari instansi lain atau bukan dari NIP tujuh belas, banyak pengaruhnya terhadap kinerja program kesejahteraan sosial”.

Selain persoalan tersebut, ditemukan kasus yang klasik, yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama antara jajaran Instansi Sosial di provinsi dengan jajaran instansi sosial di kabupaten/kota. Hal ini sebagai eksekusi dari otonomi daerah. Sesungguhnya hal tersebut tidak boleh terjadi, apabila masing-masing pihak menyadari tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 27 dan 28, mengatur tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian pada Pasal 29 dan 30, mengatur tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Otoritas Lokal

Kepala desa/lurah adalah pemegang otoritas pada tingkat lokal, bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Pada kegiatan AKSK, kepala desa/lurah memang tidak masuk dalam struktur. Tetapi posisinya tetap strategis, karena tanggung jawab yang melekat dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa/lurah. Temuan lapangan menunjukkan, bahwa pada umumnya kepala desa/lurah mengikuti secara langsung kegiatan AKSK, mulai persiapan sampai akhir program. Keikutsertaan kepala desa/lurah ini dapat dipahami sebagai unsur kekuatan program.

Penelitian ini tidak menemukan kepala desa/lurah selaku pemegang otoritas lokal yang melakukan intervensi lebih jauh terhadap kegiatan AKSK. Hal ini menunjukkan sudah adanya pemahaman dari unsur pemerintah lokal tentang maksud dan tujuan dari kegiatan AKSK dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Aparat desa/kelurahan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan AKSK. Karena merasa bertanggung jawab, pada kasus Jawa Timur, kepala desa menugaskan aparat desa untuk menjadi pendamping pada kegiatan AKSK.

d. Dukungan Masyarakat

Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan AKSK perlu diidentifikasi dalam upaya menggali sumber-sumber yang dapat diakses oleh WDS, dalam kegiatan AKSK. Pada pendekatan pekerjaan sosial ditekankan pentingnya lingkungan sosial ini yang dikenal dengan pendekatan intervensi dua arah atau *dualistic approach*. Sehubungan dengan itu, dalam model intervensi pekerjaan sosial, Anne Minahan dan Allen Pincus (1973) yang dikutip oleh Suradi (2005) medesain sebuah sistem dasar yang juga berlaku dalam intervensi komunitas, yaitu sistem klien, sistem pelaksana perubahan, sistem kegiatan dan sistem tindakan.



Berdasarkan sistem dasar tersebut, maka desain program pemberdayaan sosial atau intervensi komunitas, perlu menetapkan dengan tegas peranan masyarakat sekitar dalam kiatannya dengan pelaksanaan AKSK. Diharapkan masyarakat sekitar menjadi salah satu sistem sumber, dan mendukung capaian tujuan kegiatan. Pada penelitian ini warga masyarakat di luar WDS pada umumnya mendukung kegiatan AKSK. Bentuk dukungan atau keterlibatan masyarakat seperti bantuan tenaga, pemasaran produk, dan simpan pinjam; menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan AKSK.

e. Lingkungan fisik/geografis

Lingkungan fisik atau kondisi geografis perlu dipertimbangkan dengan cermat, sehingga mampu menyediakan sumber yang mendukung pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan jenis UEP. Penelitian ini menemukan kondisi geografis yang kurang mendukung pelaksanaan program. Dimana UEP mengelola usaha ternak kambing, padahal lingkungannya rawan banjir dan rawan penyakit. Kurangnya dukungan lingkungan fisik ini mengakibatkan UEP mengalami kegagalan.

Berkaitan dengan lingkungan fisik atau kondisi geografis ini, diperlukan pencermatan terhadap proposal yang diajukan oleh WDS. Perlu dilakukan telaah yang komprehensif, sehingga jenis usaha yang dikelola WDS memperoleh dukungan maksimal dari lingkungan. UEP ternak kambing di Kalimantan Selatan yang dinilai gagal, sebagai contoh kasus kurangnya studi kelayakan terhadap UEP yang dikelola WDS.

## **2. Aspek Input**

Termasuk di dalam aspek input pada kegiatan AKSK, yaitu: keluarga rentan (WDS), pendamping, komponen program/kegiatan, dan anggaran.

a. Keluarga rentan

Keluarga rentan sebagaimana didefinisikan oleh Pusdatin

Kesos (2009), adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10 persen di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kemudian di dalam Pedoman Teknis ditegaskan (Dit P-Keluarga, 2010), bahwa sasaran AKSK adalah keluarga dewasa (perkawinan di atas 5 tahun) dalam kategori rentan dan mempunyai embrio UEP, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Atau masyarakat miskin pada Klaster II dan Klas III.

Ada perbedaan definisi operasional yang digunakan antara Pusdatin Kesos dengan Direktorat Pemberdayaan Keluarga mengenai “keluarga rentan”. Pusdatin Kesos mendefinisikan keluarga dengan usia perkawinan sampai dengan 5 tahun, atau keluarga muda, dan secara ekonomi memiliki penghasilan 10 persen di atas garis kemiskinan. Sementara Direktorat Pemberdayaan Keluarga mendefinisikan keluarga adalah keluarga dengan usia perkawinan di atas 5 tahun, secara ekonomi termasuk ke dalam kategori miskin (RTM) dan hampir miskin (RTHM). Perbedaan definisi tersebut tentu akan membawa konsekuensi pada ketersediaan data, desain kegiatan dan alokasi anggaran.

Kemudian berkaitan dengan keluarga rentan yang menjadi sasaran kegiatan AKSK, pada pedoman teknis tidak ditegaskan jenis kelamin, umur, status domisili dan status perkawinan. Karena itu menjadi sulit untuk memperoleh kepastian siapa sebenarnya WDS pada kegiatan AKSK tersebut. Tidak adanya ketegasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja kegiatan, karena sebaik apapun sebuah kegiatan apabila inputnya tidak baik, tidak memberikan keberhasilan pada kegiatan yang dilaksanakan.

b. Eksistensi Kelompok

Kelompok bukan sekedar wadah kegiatan WDS, ketika digunakan cara pandang dari perspektif pekerjaan sosial.

Kelompok mesti dipahami sebagai metode atau teknologi intervensi sosial dengan pendekatan kelompok, yang dalam pekerjaan sosial dikenal dengan metode groupwork. Dalam perspektif ini, kelompok merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan sumber-sumber pada individu-individu guna pemecahan masalah maupun pemenuhan kebutuhan. Individu-individu akan terlibat proses belajar di dalam kelompok, untuk menemukan cara-cara dan keterampilan baru dalam upaya mengeluarkan diri dari lingkaran kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Iver, Page dan Cooley (Soekanto, 1990), bahwa anggota dalam suatu kelompok akan mengalami hubungan timbal balik, saling mempengaruhi serta tumbuh kembangnya kesadaran untuk saling menolong. Terbentuknya kelompok akan memberikan kesadaran, bahwa tujuan anggota secara individu akan menjadi tujuan kelompok.

Apabila kelompok hanya dipahami sebagai wadah kegiatan, maka kelompok sebagai sesuatu (thing) yang bersifat statis dan fungsinya menjadi tidak optimal, bukan sebagai metode untuk melakukan perubahan (methode). Pemahaman demikian ini tentu berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan AKSK. Ketika kelompok dipahami sebagai metode perubahan, maka di dalamnya akan diisi dengan unsur-unsur yang memenuhi standar pemberdayaan sosial, seperti : pekerja sosial (pendamping), metode dan teknik-teknik intervensi, dan pengorganisasian sistem dasar.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka pendekatan kelompok pada kegiatan AKSK, merupakan pendekatan yang tepat. Melalui kelompok WDS mengalami proses belajar sosial untuk mengelola UEP, penambahan pengetahuan baru, tukar pikiran dalam mengatasi masalah, dan membangun kepercayaan, baik antar WDS maupun dengan masyarakat sekitar.

### c. Pendamping

Salah satu unsur di dalam kegiatan AKSK adalah pendamping pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Rekrutmen pendamping dari lingkungan birokrasi pada instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota tentu tidak efektif. Kesibukan mereka melaksanakan tugas-tugas administrasi, tidak memungkinkan mereka melaksanakan intervensi langsung kepada WDS secara intensif. Pendamping seyogyanya adalah orang-orang yang melaksanakan intervensi langsung atau tugas-tugas teknis pendampingan di lapangan, dan memiliki banyak waktu untuk melakukan pendampingan secara intensif.

Oleh karena pendamping melaksanakan tugas-tugas teknis pendampingan, maka mereka mestinya menguasai metode dan teknik-teknik intervensi langsung dalam pemberdayaan masyarakat atau intervensi komunitas. Kalaupun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, sekurang-kurangnya mereka memiliki pengamalan yang memadai di bidang intervensi komunitas. Pada penelitian ini diperoleh informasi, bahwa implementasi AKSK belum didukung dengan kualifikasi pendamping yang memiliki pengalaman di bidang intervensi komunitas. Pendamping belum memahami tugasnya sebagai pendamping, sehingga proses pendampingan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Di dalam konteks pemberdayaan sosial dalam perspektif pekerjaan sosial, pendamping adalah pekerja sosial yang karena itu mereka melaksanakan peranan sebagai pekerja sosial. Ada beberapa peranan yang mestinya dilaksanakan oleh pendamping, antara lain peranan sebagai fasilitator, pemberdaya, mediator dan motivator (lihat Soetarso, 2001). Berperanan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan bagi WDS untuk mengakses pelayanan sosial. Berperanan sebagai pemberdaya, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada WDS, sehingga ditemukan cara-

cara baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi bagi WDS dalam kehidupan bermasyarakat. Berperanan sebagai mediator, yaitu menyalurkan WDS dengan pemilik sumber dalam upaya pemberdayaan. Berperanan sebagai motivator, yaitu mampu memberikan semangat kepada WDS dalam mengelola KUBE maupun melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik.

Berdasar tugas dan peranan pendamping sebagai pekerja sosial tersebut, maka di dalam rekrutmen pendamping perlu ditentukan kualifikasi pendamping yang tegas. Pendidikan, pengalaman dalam intervensi komunitas, komitmen dalam pemberdayaan masyarakat, tempat domisili, dan kompetensi pribadi, merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan utama pada waktu rekrutmen pendamping kegiatan AKSK.

Kebijakan rekrutmen pendamping pada kasus Sumatera Barat perlu dipertimbangkan. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mengeluarkan kebijakan, bahwa setiap kegiatan didampingi oleh pendamping tertentu. Tidak dibenarkan seorang pendamping menjadi pendamping pada kegiatan yang lain. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan, dengan mendampingi satu jenis kegiatan, maka tenaga dan pikiran pendamping akan terfokus pada warga dampingannya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pendamping menerima honor selama enam bulan sebesar Rp. 235.000. Padahal, meskipun secara administratif kegiatan AKSK telah selesai, tetapi di lapangan pendamping masih dilaksanakan. Berkaitan dengan honor pendamping, bisa mengundang kecemburuan. Di lapangan sudah terjadi, pendamping membanding-bandingkan, antara honor yang diterima oleh pendamping kegiatan AKSK, Pemberdayaan FM dan PKH. Situasi ini pertanda tidak baik, karena akan menurunkan motivasi kerja pendamping, yang pada akhirnya mereka akan mengundurkan diri.

#### d. Komponen Program/Kegiatan

Desain AKSK merupakan program kesejahteraan sosial bagi keluarga rentan melalui penguatan kondisi sosial ekonomi keluarga rentan. Di dalam kegiatan AKSK dilaksanakan dua tujuan mendasar, yaitu peningkatan ketahanan sosial dan penguatan ekonomi keluarga rentan, sehingga mereka mampu melaksanakan peranan dan fungsinya secara optimal.

Diperlukan pemahaman yang tepat ketika mendesain sebuah program pemberdayaan sosial. Hal ini dikarenakan kegiatan AKSK yang sasarannya RTM dan RHM telah menjadi agenda dan program prioritas nasional. Kegiatan AKSK yang diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Keluarga, merupakan bagian tidak terpisahkan dari kementerian negara dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Berdasarkan pemahaman itu, maka penyelenggara kegiatan AKSK dituntut untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang orisinal, dan terus menerus mengikuti perkembangan masyarakat.

#### e. Anggaran

Secara nominal, anggaran yang dialokasikan pada kegiatan AKSK sudah memadai. Pada setiap orang (WDS) menerima dana kegiatan sebesar Rp. 1,4 juta. Permasalahannya, dari empat lokasi penelitian, hanya pada kasus Sumatera Barat dan Jawa Timur yang menerima uang tunai yang langsung di transfer ke rekening kelompok. Sementara pada lokasi yang lain, diterima WDS dalam bentuk barang (bahan dan peralatan kerja). Kreativitas dan keberanian Instansi Sosial tersebut patut diapresiasi, karena mereka mau melakukan perubahan terhadap RKA/KL.

Pada WDS yang menerima uang tunai, mereka akan lebih leluasa menggunakan uangnya untuk kegiatan UEP. Ketika mereka menerima uang tunai, dan berubah pikiran untuk mengelola jenis UEP dari yang direncanakan sebelumnya, maka mereka tidak menemui kesulitan. Sebagaimana diketahui, bahwa WDS pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga mengalami keterbatasan untuk menentukan UEP yang prospektif.

Sedangkan WDS yang menerima barang (bahan dan peralatan kerja) langsung dari Instansi Sosial, mereka suka atau tidak suka mesti mengelola UEP seperti yang telah diusulkan di dalam proposal melalui kelompok. Hal ini tidak memberikan keleluasaan bagi WDS untuk mengelola UEP lain. Padahal, di lapangan terjadi permasalahan dimana WDS merasa tidak tepat mengelola UEP tersebut karena manfaat ekonominya rendah.

### **3. Aspek Proses**

Unsur-unsur di dalam aspek input merupakan bahan dasar yang di proses melalui AKSK. Di dalam tahap proses ini dilaksanakan berbagai kegiatan yang dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu: tahap awal, tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta terminasi.

#### **a. Tahap Awal**

Pada tahap awal pemberdayaan, dilaksanakan identifikasi, seleksi, telaah proposal kegiatan UEP, dan alokasi dana stimulan UEP seleksi dokumen-dokumen pendukung dalam proses pencairan dana, sosialisasi dan penyampaian informasi tentang program, pemantapan kondisi sosial WDS serta pemantapan pendamping.

Semua kegiatan tersebut secara administrasi sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sementara itu, permasalahan masih terjadi pada pendamping kegiatan AKSK. Seleksi pendamping merupakan upaya untuk memperoleh pendamping yang memenuhi kualifikasi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dalam intervensi komunitas. Namun demikian, kegiatan AKSK ini belum mendapatkan pendamping yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Berbagai kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap proses pendampingan, dan selanjutnya akan mempengaruhi capaian tujuan kegiatan AKSK.

Distribusi stimulan UEP melalui mekanisme "rekanan" melalui Instansi sosial, sesungguhnya kurang mendukung proses pemberdayaan keluarga rentan. Sebagaimana prinsip yang berlaku dalam pekerjaan sosial, bahwa salah satu dari prinsip pemberdayaan sosial adalah memberikan kesempatan kepada klien agar mereka menentukan cara-cara yang terbaik untuk dirinya atau *self-determination*. Kesempatan untuk menentukan cara-cara terbaik bagi diri sendiri ini akan memberikan keyakinan bagi mereka, bahwa bantuan akan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dengan bantuan itu mampu mengatasi masalah yang dihadapi atau *help people help the self* (lihat Iskandar, 1992).

Selain kurang memberikan kesempatan bagi WDS, sistem tersebut kurang memberikan pendidikan bagi WDS untuk bertanggung jawab atas bantuan yang diterima. Mereka pada umumnya tahu persis, bahwa bantuan yang diberikan tersebut bersifat hibah, dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, rasa memiliki atas bantuan yang diterima tersebut menjadi lemah. Untuk itu tugas pendamping adalah membangun kesadaran bagi WDS, bahwa bantuan UEP dari pemerintah tersebut perlu dijaga keberlanjutannya. Perlu ada sanksi yang disepakati, apabila WDS menyalahgunakan bantuan pemerintah tersebut.

Sosialisasi kegiatan dan pematapan pendamping secara administratif telah dilaksanakan. Meskipun demikian, sosialisasi dan pematapan pendamping tersebut dirasakan masih kurang di lapangan ditemukan ada pendamping yang tidak mengikuti pelatihan pendampingan, dan mereka hanya diberikan penjelasan dari instansi sosial. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa beban pendamping cukup berat karena mereka melaksanakan sejumlah tugas dan peranan selama dan setelah proses pemberdayaan. Namun demikian, pembekalan pengetahuan dan keterampilan sosial bagi mereka masih jauh dari memadai. Mereka yang pada umumnya tidak memiliki ilmu dan pengalaman di



bidang intervensi komunitas, diberikan pembekalan dalam bentuk pelatihan selama tiga hari. Tentu sulit untuk dipahami, dalam waktu yang sangat pendek seseorang yang tugasnya memberikan pendampingan kepada fakir miskin, diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan sosial yang diperlukan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pengelolaan UEP, administrasi kegiatan, pertemuan rutin kelompok, pertemuan pendampingan dan pengelolaan hasil usaha. Pada bab sebelumnya telah dideskripsikan, bahwa pada ke empat lokasi penelitian, kegiatan AKSK dilakukan dengan pendekatan kelompok. Namun demikian, pada kasus Sumatera Barat (8 kelompok), Kalimantan Selatan (4 dari 6 kelompok) dan Jawa Timur (4 kelompok), masing-masing WDS mengelola UEP yang bervariasi. Sedangkan pada kasus Sulawesi Utara (4 kelompok) dan Kalimantan Selatan (2 kelompok), mengelola UEP secara bersama-sama di dalam kelompok.

Sistem pengelolaan UEP tersebut semuanya dibenarkan, karena di dalam pedoman teknis tidak diatur secara tegas mengenai sistem pengelolaan UEP, apakah secara individu atau secara kelompok. Kreativitas pelaksana di Daerah memberikan hasil yang lebih baik, dibandingkan dengan UEP yang dikelola secara bersama-sama dalam satu kelompok. Pada sistem tersebut, kepada WDS diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Instansi sosial provinsi untuk menentukan sendiri jenis UEP berdasarkan minat dan keterampilan yang dikuasai oleh WDS secara individual.

Administrasi kegiatan perlu dikerjakan oleh WDS, baik secara individual maupun kelompok. Administrasi merupakan dokumen penting untuk mengetahui aktivitas WDS, baik sosial maupun ekonomi, kemajuan usaha dan hasil yang telah dicapai dari UEP yang dikelolanya. Tersedianya administrasi yang baik, akan menjadi bahan bagi pendamping, pelaksana maupun penanggung jawab

program dalam memberikan bimbingan dan pementapan usaha WDS.

Pertemuan rutin kelompok merupakan media belajar bagi WDS untuk mengembangkan kompetensinya, baik sosial maupun ekonomi. Permasalahan yang dihadapi WDS dapat diketahui secara dini, sehingga dapat dipecahkan secepat mungkin. Melalui pertemuan rutin kelompok, WDS dapat dibantu untuk menyusun rencana pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil usahanya. Pada praktiknya, pertemuan rutin kelompok dan pertemuan pendamping dilaksanakan secara bersamaan di satu tempat sebulan sekali.

Oleh karena WDS bertemu sebulan sekali, maka WDS di empat lokasi penelitian kurang memperhatikan bidang sosial. Sebagian besar WDS belum memiliki kegiatan santunan sosial bagi PMKS yang ada di sekitarnya, padahal mereka mengetahui. Mereka masih berorientasi pada pengembangan aset dan omzet dari UEP yang dikelolanya.

Hasil usaha UEP seringkali dijadikan ukuran keberhasilan sebuah program sosial. Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa sebagian besar WDS telah membagikan hasil usaha kepada anggota dengan berbagai variasi sesuai kesepakatan. Pada kasus lokasi yang mengelola UEP secara individu, mereka memperoleh keuntungan langsung dari hasil UEP, tanpa membagi kepada anggota WDS yang lain. Setiap bulan berkisar Rp. 50.000 – Rp. 75.000. Kemudian pada UEP yang dikelola secara kelompok, hasil usaha yang dibagikan kepada WDS berkisar antara Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per bulan.

Sedangkan pada UEP ternak kambing dan mesin perontok padi pada kasus Kalimantan Selatan, UEP nelayan pada kasus Sulawesi Utara, belum membagi hasil, dan UEP ternak kambing pada kasus Jawa Timur, sampai penelitian ini dilakukan belum memberikan keuntungan ekonomis bagi WDS.

Masih dalam kaitannya dengan pengelolaan hasil usaha, sebagian besar WDS tidak mengisi iuran kesetiakawanan sosial (IKS). Selain alasan ekonomi, kosongnya IKS dan kas kelompok disebabkan oleh kurangnya penjelasan dari pendamping lokal. Ditemukan kasus, bahwa WDS tidak mengetahui apabila mesti mengisi IKS.

c. Monitoring dan Evaluasi

Setiap program yang diimplementasikan seyogyanya diikuti dengan sistem pengendalian, agar setiap tahapan dan hasil yang dicapai dari program tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian program. Dimana keduanya memegang peranan penting, karena menentukan keberhasilan suatu program. Implikasi dari pemahaman ini, bahwa diperlukan kesungguhan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program yang diimplementasikan.

Pada implementasi kegiatan AKSK, instansi sosial provinsi dan kabupaten belum melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan sungguh-sungguh. Alasan yang disampaikan sangat klasik, seperti keterbatasan tenaga, sarana kerja dan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama pada beberapa program yang lokasinya berdekatan. Alasan klasik seperti ini terjadi setiap tahun dan pada semua program. Artinya, sistem pengendalian program di daerah belum dilaksanakan dengan kesungguhan. Padahal, di dalam siklus perencanaan, hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan penyusunan rencana pada tahun berikutnya.

Lemahnya sistem pengendalian ini, merupakan peluang yang lebar terjadinya kesalahan pada implementasi program, dan atau rendahnya capaian tujuan pada akhir program. Tetapi di dalam laporan tertulis, dapat disampaikan data kuantitatif maupun kualitatif keberhasilan program.

#### d. Terminasi

Pada setiap program pemberdayaan sosial atau intervensi komunitas, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, ada batas waktu akhir yang telah ditentukan di dalam perencanaan. Batas waktu akhir program tersebut di dalam perspektif pekerjaan sosial dikenal dengan istilah terminasi.

Batas akhir kegiatan AKSK pada akhir tahun anggaran atau Desember. Berdasarkan tahun anggaran yang berlaku, kegiatan AKSK telah berakhir pada Desember 2009. Tetapi ketika memasuki tahun anggaran 2010 program masih dilaksanakan dikarenakan ada keterlambatan pada pencairan anggaran. Sementara honor pendamping sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2009. Padahal, secara administrasi pada tahun 2010 itu telah memasuki tahap terminasi.

Selain tidak tepat waktu, pengakhiran program tidak ada ketegasan dari instansi sosial. Tidak ada penyerahan secara resmi kepada pemerintah lokal, bahwa kegiatan AKSK telah selesai, dan tindak lanjut program tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah lokal. Program berakhir begitu saja, dan instansi sosial mencari lokasi baru untuk program tahun anggaran berikutnya.

#### 4. Aspek Produk

Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil akhir yang dicapai dari kegiatan AKSK. Produk mencakup dua sasaran, yaitu secara kelompok dan secara individual.

##### a. Secara Kelompok

Pada uraian sebelumnya dijelaskan, bahwa kegiatan AKSK merupakan program penanggulangan kemiskinan (Klaster II dan Klaster III). Sehubungan dengan itu, sasaran program menjadi dua, yaitu kelembagaan atau kelompoknya itu sendiri, dan WDS secara individual. Produk yang dihasilkan oleh WDS pada kegiatan AKS ini dapat dilihat dari dua kondisi, yaitu :

## 1) Kondisi Sosial

Setelah memperoleh kegiatan AKSK, pada umumnya WDS merasakan mendapatkan manfaat sosial, seperti semakin mengenal warga masyarakat, memperoleh pengetahuan baru, permasalahan yang dihadapi WDS dapat diselesaikan, dan semakin memperkuat kerukunan serta kepedulian terhadap rumah tangga yang tidak memperoleh AKSK. Bentuk kepedulian WDS tersebut, antara lain memberikan bimbingan UEP, dan memberikan kesempatan memperoleh pinjaman kas kelompok kepada warga yang tidak memperoleh AKSK.

## 2) Kondisi Ekonomi

Manfaat secara ekonomi bagi kelompok masih sangat rendah. Sebagian besar kelompok secara ekonomi belum mengalami penambahan aset, dan sebagian besar kelompok belum memiliki kas. Apalagi pada kasus Sumatera barat, dimana UEP dikelola secara individu, sehingga semua keuntungan WDS, diambil seluruhnya untuk pengelolaan UEP maupun memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi sosial dan ekonomi pada WDS dalam kelompok, telah sesuai dengan perspektif sosiologis yang dikembangkan oleh Iver and Page ini didukung oleh Cooley (Soekanto, 1990), dimana dengan terbentuknya kelompok, maka tujuan anggota secara individu akan menjadi tujuan kelompok. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran tersebut pendekatan menjadi lebih efektif dalam pemberdayaan keluarga, karena di dalamnya kelompok tersebut terjadi proses belajar secara intensif mengenai banyak hal, baik yang bersifat ekonomi, sosial budaya maupun mental/moral. Melalui sebuah kelompok, ambisi individu dapat dikendalikan dan sebaliknya mengedepankan kepentingan bersama yang dicapai secara bersama-sama.

b. Secara Individual

1) Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan dengan statistik, bahwa kegiatan AKSK memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi WDS. Dari total responden sebanyak 160 orang, pada kategori rendah terjadi penurunan sebesar 8.75 persen, pada kategori sedang terjadi kenaikan 8.13 persen dan pada kategori tinggi terjadi peningkatan sebesar 0.62 persen.

Apabila tabel 10 dibaca pada kolom sesudah pemberdayaan, maka terdapat 83.75 persen yang masih termasuk kategori rendah, 15.63 persen termasuk kategori sedang, dan 0.62 persen termasuk kategori tinggi. Interpretasi dari sebaran angka-angka tersebut menunjukkan, bahwa keberhasilan kegiatan AKSK belum maksimal.

2) Pemenuhan Kebutuhan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan statistik, bahwa kegiatan AKSK memberikan pengaruh terhadap pemenuhan WDS. Dari total responden sebanyak 160 orang, pada kategori rendah terjadi penurunan sebesar 4.38 persen, pada kategori sedang terjadi penurunan 9.38 persen, dan pada kategori tinggi terjadi peningkatan sebesar 13.76 persen.

Apabila tabel 11 dibaca pada kolom sesudah pemberdayaan, maka terdapat 4.37 persen yang masih termasuk kategori rendah, 50 persen termasuk kategori sedang, dan 45.63 persen termasuk kategori tinggi. Interpretasi dari sebaran angka-angka tersebut menunjukkan, bahwa keberhasilan kegiatan AKSK belum maksimal.

3) Kondisi Sosial psikologis

Berdasarkan hasil perhitungan dengan statistik, bahwa

AKSK memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial WDS. Dari total responden sebanyak 160 orang, pada kategori rendah tetap sebesar 0 persen, pada kategori sedang terjadi penurunan sebesar 41.25 persen dan pada kategori tinggi terjadi peningkatan sebesar 41.25 persen.

Apabila tabel 12 dibaca pada kolom sesudah pemberdayaan, maka terdapat 4,37 persen yang masih termasuk kategori rendah, 50 persen termasuk kategori sedang, dan 45,63 persen termasuk kategori tinggi. Interpretasi dari sebaran angka-angka tersebut menunjukkan, bahwa secara statistik keberhasilan kegiatan sudah maksimal. Namun demikian apabila dicermati dari skor-skor yang muncul, kenaikan dari kategori sedang menjadi kategori tinggi masih berada di atas sedikit garis batas kategori sedang. Artinya, meskipun seluruh responden pada aspek sosial psikologis tersebut kategori tinggi, tetapi posisinya masih labil.

Berdasarkan analisis kinerja program tersebut, kegiatan AKSK memiliki kekuatan dan kelemahan, yaitu :

### **1. Kekuatan AKSK**

Kegiatan AKSK memiliki kekuatan, yaitu:

- a. WDS merencanakan sendiri usaha yang dikelolanya. WDS menyusun proposal dengan bimbingan dan instansi sosial dan pendamping tentang UEP yang akan dikelolanya.
- b. Kesempatan bagi WDS untuk mengelola UEP secara individu. WDS mengelola UEP secara individu, sehingga mereka dapat memanfaatkan tenaga suami/istri dan anak-anak dalam mengelola UEP. Selain itu tidak perlu menyusun jadwal pembagian kerja, yang biasanya rawan konflik kepentingan.
- c. Cash transfer. Penyaluran bantuan secara langsung dengan menggunakan jasa perbankan ke rekening kelompok. Penyaluran stimulan melalui bank akan mengenalkan

- WDS dengan sistem perbankan. Selain itu, cash transfer melalui jasa perbankan juga dalam pendistribusian honor pendamping. Hal ini mengurangi risiko bagi instansi sosial
- d. AKSK bersifat open system. Terbuka kesempatan bagi warga masyarakat di luar WDS untuk mengakses pelayanan pada WDS, seperti simpan pinjam, bimbingan dan pelatihan UEP.
  - e. Kelompok bukan semata-mata sebagai wadah kegiatan bersama WDS, tetapi kelompok yang dibentuk merupakan strategi perubahan. WDS mengelola UEP secara individu, tetapi memanfaatkan kelompok untuk tukar pikiran, penambahan pengetahuan baru, dan memperkuat kepedulian sosial.
  - f. Stimulan yang dialokasikan untuk UEP bagi WDS, besarnya wajar. Pada kegiatan AKSK, setiap WDS dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1,4 juta. Besarnya stimulan ini rasional, karena sesuai dengan daya serap WDS untuk membiayai UEP yang dikelola.
  - g. UEP yang dikelola WDS bersifat mikro dan dapat diperoleh hasilnya setiap hari.
  - h. Stimulan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penghasilan WDS, tetapi juga pada upaya menekan/memperkecil pengeluaran WDS. Pada kasus Kalimantan Selatan, stimulan berupa sepeda dan gerobak, menekan pengeluaran WDS berkisar Rp. 50.000 - Rp. 70.000 per bulan.

## **2. Kelemahan AKSK**

### **Kegiatan AKSK memiliki kelemahan, yaitu :**

- a. Kriteria WDS belum tegas, masih ada kerancuan antara sasaran pada kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan fakir miskin (cluster II dan cluster III).



Kriteria pendamping belum jelas. Petunjuk teknis belum secara eksplisit mengatur kriteria dan kualifikasi pada rekrutmen pendamping. Karena itu, di lapangan ditemukan pendamping dari unsur PSM, aparat desa, instansi sosial, dan instansi dari SKPD non instansi sosial.

- b. Kegiatan ekonomi masih dominan dibandingkan dengan kegiatan sosial. Hal ini sulit untuk dibedakan antara core business Kementerian Sosial dengan kementerian yang lain.
- c. Pemantapan pendamping belum cukup membekali kemampuan mereka dalam kegiatan pendampingan. Waktu maupun materi pada kegiatan pendamping belum memberikan pengetahuan yang memadai bagi pendamping tentang kegiatan AKSK.
- d. Monitoring dan evaluasi (moneva) belum didukung anggaran yang memadai. Moneva belum dilaksanakan secara serius, karena belum dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan alasan anggaran terbatas.
- e. Kegiatan AKSK didesain selama satu tahun. Waktu yang dialokasikan ini belum cukup untuk melakukan perubahan, terutama pada aspek sosial WDS.

## **B. KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Kesejahteraan sosial dapat dicermati dalam tiga aspek utama, yaitu konsep, strategi dan dampak kegiatan AKSK dalam perspektif kesejahteraan sosial.

### **1. Konsep kegiatan AKSK**

*Fredlander* (1980) yang dikutip oleh *Adi* (2008) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai : *Sosial welfare is the organized of Sosial service and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health* (kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu

individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). Kemudian di dalam *Pre-Conference Working for the 15th Internatioal Conference of Sosial Welfare* (Sulistiati, 2004) yang dikutip oleh Huda (2009), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.

Pada konteks kegiatan AKSK, desain kegiatannya menggambarkan sebuah sistem yang terorganisasi yang dilakukan oleh pemerintah (baca : Kementerian Sosial RI). Kegiatan AKSK ini, konsep dasarnya dibangun oleh Kementerian Sosial RI, dan pada kegiatan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Warga Dampungan Sosial), agar mereka tercegah tidak jatuh di bawah garis kemiskinan lagi akibat adanya goncangan dalam masyarakat.

Secara konsep kegiatan AKSK sudah cukup memadai. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih dihadapkan permasalahan, seperti koordinasi antara Kementerian Sosial dengan Instansi Sosial di daerah, dan Instansi Sosial di daerah dengan pihak-pihak terkait. Masih belum optimalnya pengorganisasian kegiatan dapat dilihat dari terlambatnya pencairan anggaran, rekrutmen pendamping, pelaporan, jenis UEP yang dikelola WDS dan penentuan strategi pemberdayaan.

## **2. Strategi Kegiatan AKSK**

Sesuai amanat undang-undang, kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara dapat terwujud dengan model pembangunan partisipatif. Model ini merupakan sebuah model pembangunan yang memadukan antara kebijakan pemerintah, dengan partisipasi aktif warga negara. Kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dimaksud sebagaimana diatur di dalam

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Di sisi lain, warga negara sebagai pelaku utama (*subject*) dalam kegiatan pembangunan, dan oleh karena itu hendaknya mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, perlu pergeseran pendekatan pembangunan masyarakat, dari pendekatan belas kasihan atau bersifat karitas, bergeser ke arah strategi pemberdayaan (lihat Ginanjar, 1996). Strategi pemberdayaan tersebut di dalamnya mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) mengembangkan potensi diri keluarga rentan melalui penciptaan situasi sosial yang kondusif. Kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu bimbingan memotivasi guna memberikan kesadaran bahwa keluarga rentan memiliki potensi yang dapat dikembangkan; (2) memperkuat potensi keluarga rentan melalui peningkatan pendidikan, derajat kesehatan dan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar; dan (3) memberikan perlindungan, membela dan berpihak bagi kepentingan kepada keluarga rentan.

Diskusi mengenai pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dengan partisipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul (1987) yang dikutip oleh Hikmat (2006), bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif warga negara ke dalam efektivitas, efisiensi dan sikap kemandirian. Kemudian menurut Craig dan Mayo (1995) yang dikutip oleh Hikmat (2006), partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Kemudian menurut Adi (2008) apabila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap

perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (pemerintah, LSM), masyarakat cenderung akan menjadi lebih tergantung pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin tinggi.

Berdasar pada pemikiran di atas, bahwa ada alur yang jelas antara kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan partisipasi. Kesejahteraan sosial bagi warga negara dapat diwujudkan dengan pendekatan pemberdayaan, yang dalam praktiknya meletakkan partisipasi oleh setiap warga negara di dalamnya. Pada konteks kegiatan AKSK, secara konseptual sudah mengakomodasi strategi pemberdayaan dan mengedepankan partisipasi WDS, yang keduanya merupakan hakikat dari kesejahteraan sosial. WDS difasilitasi untuk menyusun rencana, mengelola usaha kelompok dan kegiatan lain bersifat sosial secara mandiri dengan bimbingan pekerja sosial (pendamping).

### **3. Dampak Kegiatan AKSK**

James Midgley (1997) yang dikutip oleh Huda (2009), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi. Di dalam kondisi tersebut menurut Medgley harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu (1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan terpenuhi, dan (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Kemudian menurut Haryanto dan Tomagola (1997), kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi hidup sejahtera, di dalamnya mencakup tiga aspek, yaitu (1) kebutuhan dasar, yang terdiri dari pangan, sandang, papan dan kesehatan, (2) kebutuhan sosial psikologis, yang terdiri dari pendidikan, rekreasi, dan interaksi sosial; dan (3) kebutuhan pengembangan, yang terdiri dari tabungan, pendidikan khusus/kejuruan dan akses terhadap informasi. Ketiga aspek tersebut menggambarkan suatu herarki, dimana jenis kebutuhan yang menuntut pemenuhan paling awal

adalah kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan sosial-psikologis dan paling akhir kebutuhan pengembangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kebutuhan menabung merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis dipenuhi terlebih dahulu.

Pada konteks kegiatan AKSK, kesejahteraan sosial merupakan kondisi atau dampak dari implementasi kegiatan AKSK. Konsep atau variabel kesejahteraan sosial ini kemudian dioperasionalkan ke dalam tiga sub variabel, yaitu (1) kondisi ekonomi, (2) pemenuhan kebutuhan dan (3) kondisi sosial psikologis. Pada ketiga aspek tersebut dilakukan pengukuran, dan berdasarkan pengukuran tersebut dibuat kategori pada WDS, yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi.

Dari pengukuran terhadap ketiga sub variabel menunjukkan, bahwa WDS yang berada pada kategori rendah setelah menerima program sebesar 0 (nol) persen, pada kategori sedang sebesar 63.75 persen, dan pada kategori tinggi sebesar 36.25 persen. Berdasarkan total hasil pengukuran tersebut, maka tujuan kegiatan AKSK untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi WDS belum tercapai secara maksimal, yaitu baru 36.25 persen. Kemudian sebesar 63.75 persen WDS sudah mengalami perubahan, tetapi masih berada pada kategori rentan.

Dari perspektif kesejahteraan sosial, kegiatan AKSK belum optimal meningkatkan taraf hidup keluarga guna mencegah mereka jauh di bawah garis kemiskinan. Secara statistik, sebagian besar atau 63.75 persen WDS masih berada pada kategori sedang. Mereka pada umumnya masih dihadapkan permasalahan, terutama pada aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam pandangan Siporin (1975), mereka belum memiliki keberfungsian sosial (*Social dysfunctioning*). Menurut Siporin (1975), bahwa seseorang dikatakan memiliki keberfungsian sosial (*Social functioning*), apabila (1) memiliki kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan, (2) memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan (3) mampu melaksanakan berbagai peranan sosial sesuai dengan posisi dan status sosialnya. Ketiga kegiatan di dalam pendekatan pemberdayaan tersebut menjadi dasar dalam merancangembangkan program pemberdayaan bagi keluarga rentan. Berkenaan dengan itu, kegiatan yang penting dilakukan sebelum program dibuat, yaitu studi kelayakan yang di dalamnya termasuk asesmen. Melalui studi kelayakan dapat diidentifikasi potensi diri keluarga rentan, sumber daya lingkungan, prospek usaha yang dikelola, dan sistem dasar dalam intervensi komunitas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada bab-bab sebelumnya telah dideskripsikan temuan-temuan lapangan, dan dilakukan analisis terhadap keempat aspek penelitian, yaitu aspek konteks, input, proses dan produk. Berdasarkan deskripsi temuan lapangan di empat provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Pelaksanaan Program AKSK**

###### **a. Konteks**

###### **1) Instrumentasi program**

Penyelenggaraan AKSK telah dibekali dengan pedoman teknis bagi penanggung jawab, pelaksana dan pendamping. Namun demikian ada persoalan jumlah dan distribusi pada pedoman teknis tersebut. Selain itu menurut pelaksana pedoman teknis memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal.

###### **2) Penyelenggara Program**

Mutasi internal di lingkungan instansi sosial maupun eksternal di daerah dan masih adanya ego sektoral, menyebabkan penyelenggaraan AKSK masih menghadapi permasalahan di lapangan.

###### **3) Otoritas Lokal**

Kepala desa/lurah mengikuti secara langsung implementasi kegiatan AKSK, mulai persiapan sampai kegiatan akhir

4) Dukungan Masyarakat

Masyarakat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKSK, dan sekaligus sudah memanfaatkan kegiatan AKSK.

5) Lingkungan fisik/geografis

Pada umumnya kondisi lingkungan fisik/geografis, baik sebagai media usaha (peternakan, pertanian, perikanan, kerajinan), dan infrastruktur mendukung kegiatan AKSK.

b. Input

1) Keluarga Rentan ( klien )

Sebagian besar WDS telah sesuai kualifikasi yang telah ditentukan, yaitu kelompok rentan (RTM dan RTHM). Akan tetapi terjadi bias, ketika Daerah melakukan rekrutmen WDS perempuan, yang sama persis dengan sasaran pada kegiatan pemberdayaan perempuan.

2) Bantuan UEP

Bantuan UEP dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi Sosial ekonomi RTM dan RTHM. Bantuan diterima oleh WDS dalam bentuk barang atau peralatan kerja dan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening kelompok WDS melalui jasa perbankan.

3) Pendamping

Pada umumnya pendamping belum melaksanakan tugasnya dengan baik, karena : (1) masa kerja secara administratif sesudah habis pada Desember 2009, (2) kompetensi masih relatif rendah, (3) kesibukan tugas-tugas sehari-hari, dan (4) mulai ada kecemburuan berkenaan dengan honor yang diterima jauh lebih rendah dibanding dengan honor yang diterima pendamping pada program pemberdayaan FM dan PKH.



#### 4) Komponen Kegiatan

Pelatihan pendamping masih belum memadai, belum memberikan pengetahuan dan keterampilan sosial dalam pendampingan.

#### 5) Anggaran

Sebagian anggaran terserap untuk kegiatan UEP. Sementara anggaran untuk bimbingan sosial WDS dan pemantapan pendamping masih sangat rendah.

### c. Proses

#### 1) Tahap awal

Pada tahap awal ini diawali dengan pemetaan sosial dalam upaya mendapatkan data calon penerima kegiatan AKSK. Kemudian pengajuan daftar lokasi dan sasaran AKSK kepada instansi sosial kabupaten/kota, yang diteruskan kepada instansi sosial provinsi, penyiapan bahan dan dokumen kegiatan di lokasi, dan penyiapan kondisi sosial penerima AKSK, termasuk pembentukan kelompok usaha.

#### 2) Tahap Pelaksanaan

Alternatif penyaluran stimulan usaha ekonomis produktif (UEP) melalui dua sistem, yaitu :

- Sistem rekanan

Dua dari empat provinsi yang menjadi lokasi penelitian, menggunakan model penyaluran bantuan UEP melalui sistem rekanan.

- Sistem cash transfer ke rekening kelompok Dua dari empat provinsi yang menjadi lokasi penelitian menggunakan model penyaluran bantuan UEP dalam bentuk uang tunai ke rekening kelompok.

Pengelolaan UEP dilaksanakan dalam dua cara, yaitu :

- Usaha dikelola secara perorangan, tetapi membentuk kelompok kecil.

- Pengelolaan usaha dikerjakan bersama-sama/ berkelompok 10 orang .

Sebagian besar WDS, baik yang mengelola UEP secara individual maupun kelompok belum menyiapkan administrasi kegiatan. Pertemuan dan pertemuan pendamping dilaksanakan bersamaan, sekali dalam sebulan. Pengelolaan hasil usaha sesuai dengan cara pengelolaan UEP, yaitu :

- Bagi usaha yang dikelola secara perorangan, hasilnya langsung diambil oleh pengelola/ perorangan.
- Bagi usaha yang dikelola secara kelompok, hasilnya dibagi sama besar kepada 10 orang anggota, setelah dikurangi biaya operasional. Sebagian besar UEP secara ekonomi baru mampu membagi hasil berkisar Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per bulan.

3) Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Instansi sosial di daerah belum menganggap penting kegiatan ini dalam siklus perencanaan program. Kemudian terminasi atau pengakhiran pelaksanaan AKSK tidak ada kejelasan, bagaimana tindak lanjut setelah program ini berakhir.

## **2. Pengaruh Program AKSK terhadap keluarga**

Pengaruh program AKSK terhadap pemberdayaan keluarga dapat dilihat melalui dari aspek produk yang meliputi kelompok dan individu.

### **a. Secara Kelompok**

Pada aspek ekonomi, pada umumnya aset maupun modal usaha yang dimiliki kelompok belum bertambah. Iuran kesetiakawanan sosial (IKS) dan kas kelompok sebagian belum dilaksanakan.

Sedangkan pada aspek sosial, AKSK dirasakan manfaatnya bagi WDS berupa penambahan pengetahuan, keterampilan, kerukunan, bantuan pemecahan masalah dan pemikiran pengembangan usaha.

b. Secara Individual

1). Kondisi Ekonomi

Setelah adanya kegiatan AKSK terjadi perubahan, yaitu pada kategori rendah sebesar 83.75 persen, pada kategori sedang sebesar 15.63 persen dan pada kategori tinggi sebesar 0.62 persen.

2). Pemenuhan kebutuhan

Setelah adanya kegiatan AKSK terjadi perubahan, yaitu kategori rendah sebesar 4.37 persen, pada kategori sedang sebesar 50 persen, dan pada kategori tinggi sebesar 45.63 persen.

3). Kondisi Sosial psikologis

Setelah adanya kegiatan AKSK terjadi perubahan, yaitu kategori rendah sebesar 0 persen, pada kategori sedang sebesar 0 persen dan pada kategori tinggi sebesar 100 persen.

Secara kumulatif dari ketiga sub variable menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pasca kegiatan AKSK adalah WDS pada kategori rendah sebesar 0 (nol) persen kategori sedang sebesar 63.75 persen dan kategori tinggi sebesar 36.25 persen.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan AKSK

a. Faktor- faktor pendukung keberhasilan program AKSK

Berdasarkan temuan lapangan, faktor yang mendukung implementasi AKSK adalah semangat WDS untuk berubah, dukungan kepala desa dan tokoh masyarakat lokal, dukungan masyarakat diluar kelompoknya, lingkungan geografis dan proses distribusi honor melalui perbankan

BRI serta keterlibatan instansi sektoral dan dunia usaha dalam proses produksi

b. Faktor- faktor penghambat keberhasilan program AKSK

Sedangkann temuan lapangan terhadap faktor yang menghambat implementasi AKSK meliputi : proses pencairan bantuan yang terlambat pendidikan WDS yang masih rendah, keterbatasan sarana kerja pendamping desa dan kecamatan, belum dialokasikannya dana untuk monitoring. Adanya ketidak sesuaian bantuan jenis usaha karena intervensi dari instansi sosial.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan lapangan direkomendasikan kepada direktorat yang terkait pemberdayaan keluarga untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan pemberdayaan keluarga terutama yang menyangkut aspek:

### **1. Input**

a. Kriteria Sasaran warga dampingan sosial (WDS)

Sehubungan dengan terjadinya bias atau kesamaan antara sasaran AKSK dengan sasaran pemberdayaan perempuan dan fakir miskin, maka perlu adanya penyempurnaan kriteria WDS dengan merumuskan definisi keluarga rentan yang menjadi sasaran program.

b. Bentuk bantuan diharapkan tidak hanya menitik beratkan pada UEP, karena UEP hanyalah stimulan, tetapi perlu diutamakan pada bimbingan kesejahteraan keluarga, baik melalui perorangan maupun kelompok.

c. Penyaluran stimulant UEP sebaiknya diarahkan pada sistem cash transfer yang terbukti lebih efektif.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu ditata kembali tentang pelaksana AKSK terutama pendamping, yang menyangkut kriteria, tugas dan tanggung jawab, kompetensi dan honor. Direkomendasikan dari unsur

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang pada waktu yang sama tidak menjadi pendamping kegiatan yang lainnya.

e. Komponen kegiatan

Pelatihan pendampingan belum memadai, oleh karena itu perlu ditingkatkan utamanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan sosial bagi pendampingan dalam bentuk modul pemantapan pendamping.

f. Anggaran

Anggaran sebagian besar terserap untuk kegiatan UEP, sementara untuk bimbingan sosial keluarga dan pemantapan pendamping yang masih terbatas. Sehubungan dengan itu komponen anggaran perlu ditata kembali secara proporsional.

## **2. Proses**

- a. Proses pelaksanaan AKSK perlu disempurnakan terutama dalam proses pencairan bantuan yang terlalu panjang, kegiatan monitoring dan evaluasi masih lemah, serta terminasi yang belum jelas. Oleh karena itu perlu penataan dan penyempurnaan kembali pedoman program AKSK sesuai hasil penelitian dan temuan lapangan.
- b. Perlu dilaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh semua pihak yang terlibat dan dilaksanakan secara berjenjang.
- c. WDS pasca pemberdayaan perlu penegasan pelimpahan pada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan program lanjutan.
- d. Jangka waktu program sebaiknya 20 bulan efektif karena pola pikir, sikap dan gaya hidup manusia perlu waktu untuk berproses.

## **3. Hasil Kinerja AKSK**

- a. Diharapkan hasil kinerja AKSK dirumuskan kembali beserta indikator-indikatornya (Output, Outcomes) dan dampaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Anonim, 2001, "Kendala Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia", *Disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa S1 dan S2 di lingkungan FISIPOL UGM yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Ruang Seminar FISIPOL UGM Yogyakarta*
- Clayton, Richard R. 2003. *The Family, Mariage and Sosial Change*, Jakarta : Wikipedia.
- Direktorat Pemberdayaan Keluarga, "Pedoman Pemberdayaan Keluarga, dan Asistensi Kesejahteraan Keluarga", Departemen Sosial RI, Jakarta, 2005.
- , "Menuju Indikator Kesejahteraan Keluarga", Departemen Sosial RI, Jakarta, 2005.
- Gidden, Anthony, 1999. *Jalan Ketiga : Pembaharuan Demokrasi Sosial* (Ketut Arya Mahardika : penterjemah), Jakarta : Gramedia.
- Goode, William J, 1985, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bina Aksara.
- Hitmat, Herry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Revisi), Bandung : Humaniora Utama Prerss.
- Haryanto, Rohadi dan Tamrin Amal Tomagola, 1997, "Indikator Keluarga Sejahtera : Instrumen Pemantau Keberdayaan Keluarga untuk Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Jurnal Sosiologi Indonesia.
- Hawari, Dadang, 1994. "Kecenderungan Permasalahan Keluarga dalam PJP II : Eksistensi Keluarga dalam Masyarakat Modern dan Industri", Jakarta : Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.

- Ihromi, TO (ed), 1998, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Iskandar, Jusman, 1992, *Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial*, Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Jhonson, C.L., 1988, *Ex Familia*, New Brunswick : Rutger University Press.
- Jordan, Morgan, 1975. *The Social Worker in Family Institution*, London : Rotledge & Kagan Paul
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : CSIS
- Khairuddin, 1985, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Michell, Duncan, 1983, *A Dictionary of Sociology*, London : Broadway House.
- Nursasi, Astuti Yuni, 2009, "Konsep Keluarga Sejahtera", Jakarta : <http://repository.ui.ac.id/>
- Sadli, Saparinah. 1980. *Keluarga sebagai Lingkungan Psiko Sosial*, Jakarta : Dinas Sosial DKI Jakarta.
- Santoso, S. Budhi, 1994, "Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pembinaan Kualitas Sumber Daya Manusia", Jakarta : Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Siporin, Max, 1975, *Introduction to Sosial Work Practice*, New York ; maxMillan Publishing, co.
- Soehartono, Irawan. 1997. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rineka Cipta.
- Seorjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soelaiman, Holil, 1994, "Keluarga dalam Perubahan Sosial Ekonomi yang Cepat dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Sosial", Jakarta : Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Subeno, Hadi, 1995, "Membangun Ketahanan dan Kemandirian Keluarga", Jakarta : Suara Karya.

- Suradi, 1996, "Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pecegahan Kenakalan Remaja", Jakarta : Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, Dep. Sosial.
- , 2005, *Permasalahan Keluarga di Perkotaan: Kasus Kota Bandung*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Suyono, Haryono, 1994, "Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang", Jakarta : Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN.
- Zastrow, Charles H, 1999, *The Practice of Sosial Work*, USA : Cole Publishing Co.



## **LAMPIRAN PENERIMA PROGRAM AKSK**

### **KASUS SULAWESI UTARA**

#### **1. KELOMPOK ANUGERAH**

- Lokasi di Kelurahan Ranomea Kec. Amurang
- Jenis UEP nelayan
- Jumlah anggota kelompok 10 orang
- Pengelolaan UEP secara kelompok
- Jenis bantuan mesin ketinting 5.5 pk (usulan mesin ketinting)
- Pengelolaan UEP secara kelompok
- Pengembangan aset belum ada.
- Kas kelompok belum ada.
- Buku-buku administrasi ada (sangat terbatas)
- Dampak ekonomi terhadap individu belum ada (sama dgn sebelum menerima bantuan).
- Dampak sosial, ada perkumpulan kelompok mingguan, kerukunan sosial semakin kuat.
- Bimbingan dari Dinas Sosial Naker Kab. Minahasa Selatan.

#### **2. KELOMPOK ESA KARYA**

- Lokasi di Kelurahan Buyungon Kec. Amurang
- Jenis UEP pembuatan kue-kue
- Jumlah anggota kelompok 10 orang
- Pengelolaan UEP secara kelompok
- Jenis bantuan peralatan pembuatan kue-kue
- Pengelolaan usaha dikelola secara kelompok
- Pengembangan aset sudah ada (pembelian alat pembuatan kue-kue).
- Kas kelompok ada.
- Buku-buku administrasi ada (terbatas)

- Dampak ekonomi terhadap individu sudah ada (Rp.30.000 per bulan).
- Dampak sosial, ada perkumpulan kelompok mingguan, kerukunan sosial semakin kuat.
- Bimbingan dari Dinas Sosial Naker Kab. Minahasa Selatan.

### 3. KELOMPOK CITA WAYA

- Lokasi di Kelurahan Rumoong Bawah
- Jenis UEP pembuatan kue-kue
- Jumlah anggota kelompok 10 orang
- Pengelolaan UEP secara kelompok
- Jenis bantuan peralatan pembuatan kue-kue
- Pengelolaan usaha dikelola secara kelompok
- Pengembangan aset sudah ada (pembelian alat pembuatan kue-kue).
- Kas kelompok ada.
- Buku-buku administrasi ada (terbatas)
- Dampak ekonomi terhadap individu sudah ada (Rp.20.000 sebanyak 4 x dan peminjaman kas kelompok).
- Dampak sosial, ada perkumpulan kelompok mingguan, kerukunan sosial semakin kuat.
- Bimbingan dari Dinas Sosial Naker Kab. Minahasa Selatan.

### 4. KELOMPOK BERKAT USAHA

- Lokasi di Desa Maluku Kec. Amurang Timur
- Jenis Usaha penyewaan alat-alat catering
- Jumlah anggota kelompok 10 orang
- Jenis bantuan peralatan catering (usulan peralatan pembuatan kue-kue)
- Pengelolaan usaha dikelola oleh secara kelompok
- Pengembangan aset sudah ada.
- Kas kelompok ada.
- Buku-buku administrasi ada (cukup baik)
- Dampak ekonomi terhadap individu sudah ada (peminjaman kas kelompok dari hasil penyewaan alat catering).

- Dampak sosial, ada perkumpulan kelompok mingguan, kerukunan sosial semakin kuat.
- Bimbingan dari Dinas Sosial Naker Kab. Minahasa Selatan.

## **KASUS SUMATERA BARAT**

### a. KELOMPOK YA BARIK

- Alamat : Kelurahan Banuaran, Kec. Lubuk Begalung
- Jenis usaha jualan kelontong, jualan makanan, jualani kue-kue, dan produksi sprai.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan UEP secara individu
- Omzet per bulan rata-rata Rp. 500.000
- Ada penambahan anggota kelompok.
- Kegiatan kelompok pertemuan rutin tiap bulan. Agendanya membicarakan perkembangan usaha.
- Kas kelompok belum ada.
- Kegiatan/santunan sosial belum ada.
- Pembagian usaha kelompok tidak ada (karena usaha dikelola perorangan).
- Administrasi ada (buku kas, buku inventaris, buku tamu, buku penualan, buku absen pertemuan.
- Pemasaran produk di lingkungan setempat dan di tempat lain.
- Pelatihan yang pernah diikuti P3K, sulaman pita, memasak/ membuat kue-kue.
- Bimbingan yang pernah diikuti bimbingan kongsi kematian, majelis tagum dan pembinaan keluarga.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

### b. KELOMPOK YA KHOLIQ

- Alamat Desa banuaran, Kec. Lubuk Begalung.
- Jenis UEP Perabotan rumah tangga
- Jumlah anggota kelompok 5 orang

- Pengelolaan usaha beragama : jualan, pembuatan perabot (meubeler).
- Pengelolaan UEP secara individu
- Perkembangan usaha (omzet dan aset) ada tetapi belum dihitung.
- Ada penambahan jumlah anggota.
- Kegiatan kelompok sebulan sekali.
- Kas kelompok belum ada.
- Kegiatan sosial dalam bentuk santunan sosial belum ada.
- Administrasi kegiatan belum ada.
- Pemasaran produk di lingkungan setempat.
- Dalam proses produksi sudah melibatkan orang luar, digaji per minggu.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

c. KELOMPOK AL MUTAQOBHIR

- Alamat Kelurahan Banuaran Kec. Lubuk Begalung.
- Jenis UEP jualan harian.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Jenis usaha proses kulit manis, lotek, kelontong, bengkel elektro.
- Pengelolaan UEP secara individu
- Perkembangan usaha (omzet dan aset) ada tetapi belum dihitung.
- Pertemuan kelompok sebulan sekali berupa arisan.
- Kas kelompok belum ada.
- Kegiatan sosial/santunan sosial belum ada.
- Administrasi kegiatan belum ada.
- Pemasaran hasil di lingkungan sekitar.
- Pelatihan yang telah diikuti dari AKSK tidak ada.
- Bimbingan sosial dari AKSK oleh Dinsos Kota Padang.

d. KELOMPOK YA JABAR

- Alamat Kelurahan banuara Kec. Lubuk Begalung.
- Jenis UEP dagang/warung sembako yang dikelola secara individu.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan UEP secara individu

- Omzet per bulan 1.000.000 / orang.
- Kas kelompok belum ada.
- Belum ada pengembangan kelompok.
- Kegiatan kelompok menabung Rp. 30.000 per orang.
- Kegiatan santunana sosial belum ada.
- Administrasi kegiatan berupa catatan pertemuan.
- Pemasaran di lingkungan setempat.
- Pelatihan Belum ada.
- Bimbingan kewirausahaan.
- Pertemuan kelompok per bulan membahas pendapatan dari kegiatan usaha.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

e. KELOMPOK YA GAFAR

- Alamat Kelurahan Pegambiran Ampalu.
- Jenis UEP jualan teh poci.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan UEP secara individu
- Omzet per bulan Rp. 1.500.000.
- Kas kelompok ada.
- Belum ada pengembangan kelompok.
- Pembagian hasil usaha setiap bulan dengan perhitungan 1/3 per orang.
- Santuan sosial terbatas bagi anggota. Keluarga anggota meninggal Rp. 50.000, sakit Rp. 25.000 dan suka cita Rp. 20.000.
- Administrasi berupa catatan pertemuan.
- Pemasaran produk di lingkungan setempat.
- Pelatihan dari AKSK belum ada, bimbingan dari Dinas Sosial Kota.
- Pertemuan kelompok sebulan sekali.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

f. KELOMPOK YA QOHAS

- Alamat Kelurahan Ampalu, Kec Pegambiran.
- Jenis UEP dagang : kelontong/sembako, makanan.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan usaha secara individu.
- Omzet per bulan Rp. 1.500.000 per orang.
- Kas kelompok tidak ada.
- Kegiatan/santunan sosial belum ada.
- Administrasi kegiatan belum ada.
- Pelatihan belum pernah ada.
- Bimbingan dari Dinas Sosial Naker Kota.
- Pertemuan kelompok sebulan sekali, diisi kegiatan arisan.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

g. KELOMPOK YA WAHAS

- Alamat Kelurahan Ampalu Kec. Pegambiran.
- Jenis usaha sprej, sarung bantal, pakaian adat, asesoris.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan usaha secara individu.
- Omzet per bulan RP. 1.800.000 per orang.
- Kegiatan/santunan sosial belum ada.
- Adminstrasi kegiatan belum ada.
- Pelatihan belum pernah.
- Bimbingan dari Nasos Naker Kota Padang.

h. KELOMPOK YA MUSAWIR

- Alamat Kelurahan Ampalu Kec, Pegambiran.
- Jenis UEP dagang kelontong dan kambing.
- Jumlah anggota kelompok 5 orang
- Pengelolaan usaha secara individu dan kelompok
- Omset tidak diketahui.
- Belum ada penambahan aset.
- Belum ada kegiatan/santunan sosial.
- Administrasi kegiatan belum ada.

- Pertemuan kelompok sebulan sekali, berupa arisan bulanan.
- Pelatihan belum ada.
- Bimbingan dari Dinsos Naker Kota Padang.

## **KASUS JAWA TIMUR , ( KELOMPOK SIDOMAJU)**

### **1. Kube, Sembako,**

1. Alamat : Desa Ketro, Kecamatan Tulakan.
2. Jenis UEP: sembako
3. Kegiatan sudah dicatat dengan baik
4. Proses dan hasil kegiatan sudah terbukukan. dengan baik
5. Jumlah anggota perkelompok 10 orang, saat diteliti kegiatan lancar
6. Jualan setiap hari pasaran, dengan berpindah pindah pasar.
7. Dana juga dimanfaatkan untuk usaha gorengan, diluar hari pasaran.
8. Kas kelompok berkembang, telah digulirka menjadi 86 anggota
9. Dana sosial, dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
10. Rencana pengembangan UEP, pemanfaatan dana utk aneka dagangan.
11. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
12. Anggota AKSK seluruhnya laki-laki, yang memanfaatkan Ibu-ibu
13. Bimbingan dari Nasos Jawa Timur ada .

### **2. Kube, aneka jajanan/kripik pisang**

- a. Alamat : Desa Ketro, Kecamatan , Tulakan.
- b. Jenis UEP : soto, cendol, gorengan, bakso, kue basah, es buah dll.
- c. Kegiatan sudah dicatat dengan baik
- d. Proses dan hasil kegiatan sudah tdbukukan. dengan baik
- e. Jumlah anggota kube 10 orang.
- f. Jumlah anggota 10 orang
- g. Saat diteliti semuanya berjalan maju dan lancar.
- h. Kas kelompok berkembang
- i. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- j. Rencana pengembangan UEP , modifikasi aneka jajanan

- k. Masyarakat antusias dan menunggu pengguliran.
- l. Dana sosial sudah berjalan .
- m. Anggota KUBE seluruhnya laki-laki, pemanfaatan dana oleh anggota keluarga.
- n. Bimbingan dari Nasos Jawa Timur ada .

### **3. Kube , ternak kambing, tanaman obat dan polowijio**

- a. Alamat : Desa Ketro, Kecamatan Tulakan , Kab Pacitan
- b. Jenis UEP: ternak kambing
- c. Kegiatan masih berjalan walau ada ancaman.
- d. Jumlah satu kelompok, masih tetap
- e. Pemanfaatan dana sepenuhnya ditangan anggota.
- f. Ada yg dibelikan kambing semua, ada yg sebag utk kambing & usaha lain.
- g. Telah membawa manfaat usaha, keluarga dan masyarakat
- h. Kas kelompok sudah ada
- i. Dana sosial, dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- j. Rencana pengembangan UEP, mencari cara beternak kambing yg benar.
- k. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- l. Anggota KUBE seluruhnya laki-laki, yang menerapkan anggota kel
- m. Bimbingan dari Nasos Jawa Timur ada .

### **4. Kube peralatan rumah tangga dari bambu**

- a. Alamat : Desa Sempu, Kecamatan Nawangan
- b. Jenis UEP : aneka peralatan rumah tangga dari bambu
- c. Proses kegiatan dicatat dan dibukukan dengan baik.
- d. Jumlah 10 buah, saat diteliti masih 10 buah
- e. Hasil usaha dikumpulkan di tempat pengepul dikirim ke Pacitan
- f. Kondisi alam sulit kendaraan, ditempuh dengan dipikul jalan kaki.
- g. Telah membawa manfaat usaha, keluarga dan masyarakat
- h. Kas kelompok tercatat cukup rapi
- i. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.



- j. Rencana pengembangan UEP dg peralatan yang lebih praktis.
- k. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- l. Pengembangan fariasi dagangan
- m. Anggota KUBE laki dan perempuan
- n. Bimbingan dari Nasos Jawa Timur ada .

## 5. Kube tanaman obat keluarga

- a. Alamat: **Desa Sempu**, Kecamatan tulakan, Kabupaten Pacitan.
- b. Jenis UEP : aneka tanaman obat (jahe, kencur, cengkeh, lengkuas dll).
- c. Proses kegiatan dicatatat dibukukan. dengan baik
- d. Jumlah anggota dalam kelompok 10 orang saat diteliti masih tetap utuh.
- e. Proses dan hasil kegiatan secara tradisionil, dipul dan dikirim kepabrik.
- f. Usaha dapat berjalan dengan lancar kendalanya dana.
- g. Telah membawa manfaat untuk usaha, keluarga dan masyarakat
- h. Kas kelompok masih tercatat dengan baik.
- i. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- j. Rencana pengembangan UEP, berharap penambahan modal usaha
- k. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- l. Pengembangan fariasi dagangan dengan sentuhan tehnologi.
- m. Anggota KUBE seluruhnya laki tetapi pemanfaat semua anggt kel.
- n. Bimbingan dari Nasos Jawa Timur ada .

## **KASUS KALIMANTAN SELATAN**

### 1. KELOMPOK SEMANGAT BARU.

- a. Alamat : **Desa Marabaha baru, Kecamatan Anjir Muara.**  
Kabupaten Batola
- b. Jenis UEP : **(ternak kambing )**
- c. Anggota KUBE 10 orang seluruhnya laki-laki.
- d. Kegiatan disatukan dalam dua kandang yang dibuat sec gotong

royong.

- e. Kegiatan dicatat seadanya .
- f. Proses dan hasil kegiatan belum terbukukan. dengan baik
- g. Jumlah kambing 11 ekor , mati 3 ekor.
- h. Telah beranak 1 ekor anak kambing
- i. Kas kelompok nihil
- j. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- k. Rencana pengembangan UEP, belum ada
- l. Dana sosial direncanakan akan di kembangkan jenis usaha lain.
- m. Dampak sosial, ada perkumpulan kelompok , kerukunan sosial semakin kuat.
- n. Pelatihan belum pernah.
- o. Bimbingan dari Nasos Kalimantan selatan ada .

#### **6. Nama Kube Karya bersama,**

- a. Alamat : Desa Marabahan baru, Kecamatan Marabahan , Kabupaten Batola
- b. Jenis UEP: (ternak kambing)
- c. Anggota KUBE 5 orang seluruhnya laki-laki.
- d. Jumlah kambing 6 ekor
- e. Dirawat dalam dua kandang yang dibuat secara swadaya.
- f. Awal kegiatan yang diminta tenda, tetapi diberikan kambing.
- g. Proses dan hasil kegiatan belum terbukukan. dengan baik
- h. Saat diteliti semuanya mati.
- i. Kas kelompok nihil
- j. Dana sosial, dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- k. Rencana pengembangan UEP, belum ada
- l. Masyarakat masih trauma.
- m. Dana sosial belum ada.
- n. Kegiatan sosial : yasinan, arisan dll.
- o. Anggota KUBE seluruhnya laki-laki

#### **7. Nama Kube "Harapan baru".**

- a. Alamat : Desa Marabahan baru, Kecamatan Anjir muara, Kabupaten Batola
- b. Jenis UEP: mesin perontok padi
- c. Anggota KUBE 10 orang , seluruhnya laki-laki
- d. Jumlah mesin perontok satu unit.
- e. Kegiatan merawat mesin Rp 1000,-dan iuran bersama Rp 2000,-.
- f. Selama ini belum ada hasil
- g. Kas kelompok nihil
- h. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- /bulan
- i. Kegiatan sosial dan pengembangan usaha masih bersifat rencana.
- j. Rencana pengembangan UEP , belum ada

#### 8. Kube Melati .

- a. Alamat : Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola
- b. Jenis UEP : sepeda
- c. Anggota KUBE mayoritas perempuan
- d. Proses kegiatan dicatat dengan baik
- e. Proses dan hasil kegiatan terbukukan. dengan baik
- f. Jumlah sepeda 10 buah, saat diteliti masih 10 buah
- g. Telah membawa manfaat usaha, keluarga dan masyarakat
- h. Kas kelompok masih tercatat Rp 206.000,-
- i. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- j. Rencana pengembangan UEP, penambahan modal usaha
- k. Memotong mata rantai tengkulak ikan.
- l. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- m. Pengembangan fariasi dagangan

#### 9. Kube Dahlia

- a. Alamat: Desa Mandastana, Kecamatan Anjir muara, Kabupaten Batola.
- b. Jenis UEP : **sepeda dan gerobak.**
- c. Anggota KUBE 10 orang, seluruhnya perempuan
- d. Proses kegiatan dicatat dengan baik

- e. Proses dan hasil kegiatan terbukukan. dengan baik
- f. Jumlah sepeda dan gerobak ada 10 buah, saat diteliti masih operasional.
- g. Telah membawa manfaat untuk usaha, keluarga dan masyarakat
- h. Kas kelompok masih tercatat Rp 300.000,-,-
- i. Dana sosial, dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- j. Rencana pengembangan UEP, penambahan modal dan fariasi usaha
- k. Kegiatan yang mendesak memotong mata rantai tengkulak.
- l. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- m. Pengembangan fariasi dagangan

#### **10. Nama KUBE Anggrek**

- a. Alamat : Desa, Kecamatan Anjir muara , Kabupaten Batola
- b. Jenis UEP: alat dapur, makanan, minuman, kue -kue, sembako.
- c. UEP direalisir sesuai permintaan masing-masing anggota
- d. Proses kegiatan, dicatat dan terbukukan dengan baik
- e. Saat diteliti semuanya masih operasional dan dimanfaatkan.
- f. Telah membawa manfaat untuk usaha, keluarga dan masyarakat
- g. Kas kelompok masih tercatat Rp 358.000,-
- h. Dana sosial , dari iuran anggota sebesar Rp 1000,- / bulan.
- i. Rencana pengembangan UEP, penambahan modal usaha
- j. Dana sosial akan dikembangkan dengan jenis dana sosial lainnya.
- k. Pengembangan fariasi dagangan
- l. Anggota KUBE seluruhnya perempuan

## SEKILAS TENTANG EDITOR

**Drs B Mujiyadi, MSW**, menamatkan program S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1982), dan Master of Social Work dari La Trobe Universty, Melbourne, Australia (1998). Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Sosial. Selain itu juga sebagai anggota Pembina Ilmiah pada lembaga yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan *Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Penanganan Masalah Sosial Melalui Panti, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Industri, Tanggung Jawab Dunia Usaha bagi Masyarakat di sekitarnya, Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Subsidi BBM bagi Panti Sosial, Social Work With Migrant Worker, Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Studi Pekerja Migran Perkotaan, Studi Implementasi Otonomi Daerah bidang Kesejahteraan Sosial, Studi tentang Anak Berkonflik dengan Hukum, Studi tentang Child Trafficking, dan Studi Permasalahan Kemiskinan di Sub-urban*. Selain itu pernah mengikuti berbagai kursus dan seminar di dalam dan luar negeri yang meliputi topik Social Development (Melbourne, Australia, 1984), Social Work With Migrant and Refugee (Melbourne, Australia, 1985), Community Based Rehabilitation for Disabled Persons (Solo, 1993), Micro Planning for Poverty Reduction and Sustainable Development (Hyderabad, India, 2004), Senior Social Welfare Administrators (Tokyo, Japan, 2007), dan lain-lain. Demikian juga pernah menjadi anggota Pokja MPMK, Pokja JPS, Penyusunan Repelita VII bidang Kesejahteraan Sosial, penyusunan

Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2000-2004 dan 2004-2009. Pengalaman lainnya adalah bekerja sama dengan ADB, Safe the Children UK, UN DSA, JICA dan beberapa lembaga lain dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sosial.

## SEKILAS TENTANG PENULIS

**Drs. Suradi, M.Si** adalah Peneliti Madya Puslitbang Kesejahteraan Sosial. Aktif menulis di Jurnal dan media ilmiah di bidang Kesejahteraan Sosial. Beberapa tugas yang dipercayakan sampai saat ini, yaitu: Ketua Dewan Redaksi INFORMASI Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial, anggota tim Penilai Peneliti Instansi, Ketua Tim penelitian bidang Kebijakan Sosial, anggota Tim Teknis pada Forum Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Petugas Teknis pada Staf Ahli Menteri Sosial bidang Otonomi Daerah dan Ketua Forum Peneliti Kesejahteraan Sosial.

Selain tugas tersebut, tenaga dan pikirannya disumbangkan di Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Kelembagaan Sosial Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA. Menjadi nara sumber bidang Riset Kebijakan Sosial dan moderator pada berbagai seminar.

Karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain : (1) Perubahan Sosial Budaya, 2005, (2) Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial, 2007, (3) Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial, 2009, dan (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil : Filosofi, Konsep dan Strategi, 2009; serta hasil-hasil penelitian dan kajian pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial maupun kajian pada Staf Ahli Menetri Sosial RI.

**Dra. Sri Gati Setiti M.Si**, Lahir di Surakarta, 23 Nopember 1947. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Antropologi di UGM, S1 di UNHAS Tahun 1981, dan Magister Kesejahteraan Sosial di STISIP Widuri, peneliti Madya pada Kantor Kementerian Sosial RI dengan pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan IV b ini, hingga

sekarang ini aktif di Puslitbang Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Sejak menjadi peneliti hingga sekarang berpengalaman pada berbagai aktifitas antara lain: Anggota PPI (Panitya Pembina Ilmiah) Depsos. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti di Depsos. Pada Tahun 2006-2008 menjadi dewan redaksi di Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Di Tahun 2005 menjadi dewan juri Lomba Karya Tulis Masalah Sosial Tingkat Nasional.

Beberapa Jabatan yang pernah diemban antara lain; menduduki jabatan rangkap peneliti dan Kasubid Metodologi Pelayanan Sosial Puslitbang Kesos, Tahun 2008 menjadi Konsultan penelitian Potensi Penyandang Cacat Di BPRCBD Cibinong; Aktif dalam pelayanan anak yatim di Yayasan Ruhama, Aktif mendampingi wanita dengan HIV/AIDS di Yayasan Pelita Ilmu Jakarta.

Disamping itu kegiatan penelitian yang pernah dilakukan meliputi beberapa topik, antara lain: Masalah Narkoba di sekolah, Penyuluhan sebagai Gerak Dasar, Peran LK3 Pada kesejahteraan sosial keluarga, Penanganan masalah Cacat, Masalah kesejahteraan sosial di daerah Kumuh, Karang Taruna, Peranan Wanita, Anak Jalanan, Tanggung Jawab dunia Usaha, Profesionalismen Pengelolaan Orsos, Dampak Sosial Industri, Peran GNOTA pada Kesejahteraan anak, Pola rekonsiliasi Masyarakat Etnis di Daerah Konflik, Pemberdayaan Lanjut Usia, Pemberdayaan Migran, dan Masalah TKI, masalah anak nakal, intervensi pekerjaan sosial pada pasangan HIV, masalah Trafficking anak dan penelitian pemberdayaan keluarga, hingga saat ini masih aktif menulis di Majalah Jurnal Puslitbang Kesos dan berbagai media di Indonesia.

**Dra Nunung Unayah**, lahir di Bandung, 16 Mei 1957. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tahun 1987 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menjadi pegawai Departemen Sosial sejak tahun 1980. saat ini menjabat sebagai Peneliti



Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. Penelitian yang telah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan: Uji Coba di Pemukiman yang Berbaaur dengan tempat Tindak Tuna Susila, Pengembangan Uji Coba Model Pemberdayaan Remaja Melalui Karang Taruna, Model Pemberdayaan Keluarga dalam Mencegah Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, Penelitian tentang Kebutuhan dan Tingkat Kepuasan Anak Sebagai Penerima Pelayanan Sosial, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Pengembangan Program Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran (TKI) dan Keluarganya di Daerah Asal, Pengaruh Subsidi Panti Terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dalam Panti, dan Pola Penanganan Anak di Lokasi Tindak Tuna Susila

**Muslim Sabarisman**, lahir tanggal 24 Juni 1970 di Bandung, Jawa Barat, menamatkan program DIV Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 1995. **Pendidikan dan Pelatihan** yang pernah diikuti antara lain Diklat Penanggulangan Bencana Balatbangsos Depsos (2005), Diklat Dasar Penelitian BBPPKS Lembang (2005), Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI (2007), Diklat Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial BBPPKS Lembang (2007). Saat ini sebagai peneliti pertama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Depsos RI. Penelitian yang pernah diikuti Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Panti dalam Mendukung Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Provinsi Indonesia), Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kawasan Pinggiran Hutan, Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putera (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal).

# Index

## A

Advokat 17

AKSK 4, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 35, 39, 40, 43, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138

Asistensi 4, 5, 6, 18, 20, 60, 139

Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga 4, 5, 6, 20, 60

## B

by name by address 72

## C

context 20

## D

Desa Ketro 49, 51, 52

Desa maliku 31

Desa Marabahan Baru 42, 43, 44, 45

Desa Sempu 49, 53, 54, 55

Desa Tanipah 40, 41, 42

Direktorat Pemberdayaan Keluarga 106

domain praktik 17

## E

evaluasi 20, 62, 63, 79, 84, 88, 92, 99, 112, 117, 124, 134, 137

## F

Faktor penghambat 5, 99

Fasilitator 17

Fredlander 124

## G

Gamawan Fauzi 1

## H

Haryanto dan Tomagola 128

## I

implementasi 19, 20, 62, 63, 64, 71, 80, 81, 86, 90, 95, 98, 99, 102, 108, 117,  
128, 131, 135

input 5, 6, 13, 14, 19, 20, 60, 65, 101, 105, 112, 130

intervensi 17, 80, 81, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 114, 118, 129, 136

## J

James Midgley 127

Jawa Timur 21, 22, 25, 46, 47, 48, 53, 67, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 104, 114,  
116, 130

## K

Kalimantan Selatan 21, 22, 25, 37, 38, 39, 43, 64, 66, 68, 74, 75, 76, 78, 82,  
105, 114, 116, 123, 130

Kecamatan Lubuk Begalung 34, 35

kelompok 3, 6, 7, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 42, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 98, 99, 100, 107, 108, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 134, 136

kelompok usaha 133

keluarga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 51, 60, 61, 62, 64, 65, 71, 83, 84, 86, 88, 92, 105, 106, 110, 113, 119, 120, 126, 129, 134, 136, 137

Kelurahan Buyungon 28, 29, 30

Kelurahan Pegambiran Ampalu 36, 37

Kelurahan Ranomea 28, 29

Kemitraan 18

Kesejahteraan Sosial 4, 5, 6, 12, 16, 20, 60, 68, 103, 139, 140, 141

Kondisi Ekonomi 20, 24, 81, 84, 119, 120, 134

Kondisi Sosial psikologis 20, 24, 83, 121, 135

Konselor 18

## L

lembaga sosial 1, 5

## N

Negosiator 18

## O

opportunities 13, 14

## P

Pedoman Teknis 56, 59, 70, 102, 106

Pemberdayaan 1, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 46, 57, 61, 101, 106, 109, 110, 111, 139, 140

pemberdayaan keluarga 15, 17, 18, 22, 23, 71, 136  
Pemberdayaan Keluarga 4, 5, 11, 16, 17, 20, 61, 101, 106, 111, 139  
Pemenuhan Kebutuhan 20, 24, 88, 121  
pendamping 19, 22, 23, 24, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 98, 99,  
101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 122,  
123, 124, 125, 127, 130, 132, 133, 136, 137  
people-centered, participatory, empowering, and sustainable 11  
process 20  
product 20

## S

Self-Determination 12  
Sosial control 3, 10  
sosial ekonomi 3, 4, 5, 42, 110  
Sosial standard 3, 9  
statistik deskriptif 85, 90, 94  
stimulant 136  
Sulawesi Utara 21, 22, 25, 26, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 82, 114, 116, 130  
Sumatera Barat 21, 22, 25, 32, 33, 61, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 109,  
111, 114, 130

## U

UEP 39, 48, 56, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 102, 105, 106,  
108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 125, 131, 132, 133,  
134, 136, 137  
usaha ekonomis produktif (UEP). 70, 73

## W

warga binaan 39  
WDS 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  
125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

## Z

Zastrow 7, 141